



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

I

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

LAMPIRAN

I.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	Buku I
II.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD	Buku I
III.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT	Buku I
IV.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH	Buku I
IV. A	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Buku I
IV. B	DINAS KESEHATAN	Buku I
IV. C	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Buku I
IV. D	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Buku I
IV. E	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Buku II
IV. F	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Buku II
IV. G	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Buku II
IV. H	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Buku II
IV. I	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Buku II
IV. J	DINAS PERHUBUNGAN	Buku II
IV. K	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Buku III
IV. L	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Buku III
IV. M	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Buku III
IV. N	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Buku III
IV. O	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,	Buku III

	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
IV. P	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ ANNA LASMANAH	Buku III
V.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH	
V. A	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Buku IV
V. B	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Buku IV
V. C	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Buku IV
V. D	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Buku IV
V. E	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Buku IV
VI	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	
VI. A	KECAMATAN BANJARNEGARA	Buku Va
VI. B	KECAMATAN BAWANG	Buku Va
VI. C	KECAMATAN MADUKARA	Buku Va
VI. D	KECAMATAN SIGALUH	Buku Va
VI. E	KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK	Buku Va
VI. F	KECAMATAN SUSUKAN	Buku Va
VI. G	KECAMATAN MANDIRAJA	Buku Va
VI. H	KECAMATAN PURWANEGARA	Buku Va
VI. I	KECAMATAN WANADADI	Buku Va
VI. J	KECAMATAN BANJARMANGU	Buku Va
VI. K	KECAMATAN RAKIT	Buku Vb
VI. L	KECAMATAN PUNGCELAN	Buku Vb
VI. M	KECAMATAN KARANGKOBAR	Buku Vb
VI. N	KECAMATAN WANAYASA	Buku Vb
VI. O	KECAMATAN KALIBENING	Buku Vb
VI. P	KECAMATAN BATUR	Buku Vb
VI. Q	KECAMATAN PAGENTAN	Buku Vb
VI. R	KECAMATAN PEJAWARAN	Buku Vb
VI. S	KECAMATAN PAGEDONGAN	Buku Vb
VI. T	KECAMATAN PANDANARUM	Buku Vb



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

- a. menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024; dan
- b. sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP.

Pasal 4

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 59

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 8

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 77

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 87

BAB V PENUTUP 99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) program, 18 kegiatan, dan 57 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 30.376.663.959,- ,- dengan fokus utama pada Nilai Akuntabilitas Pelayanan. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Kepatuhan OPD terhadap Standar Pelayanan Publik masih belum optimal;
2. Penyusunan data dukung pengukuran kematangan kelembagaan, evaluasi pelayanan publik belum optimal;
3. Kebijakan penataan kelembagaan yang sangat dinamis;
4. Kurangnya SDM dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pembinaan ke perangkat daerah terkait dengan kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja perangkat daerah dan implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah;
5. Program-program pembangunan belum dapat terekspos dan terpublikasi secara keseluruhan dan berkala;
6. Pelaksanaan Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Setda masih belum optimal baik secara kualitas maupun kuantitas
7. Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran masih menumpuk di Triwulan IV;
8. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan belum didukung aplikasi sistem informasi yang berbasis website;

9. Masih terjadi harga elpiji 3 kg diatas harga eceran tertinggi di tingkat konsumen;
10. Pembinaan Industri kecil belum optimal;
11. Perlunya pemantapan reformasi birokrasi di seluruh area perubahan;
12. Kurangnya pemahaman bagi OPD dan kecamatan terkait pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
13. Sebagian MOU yang disusun tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
14. Kurangnya pemahaman OPD terhadap definisi operasional IKK Outcome LPPD;

Dari 3 program, 18 kegiatan, dan 57 sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, semua program/kegiatan/sub kegiatan disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 dengan total anggaran sebesar Rp. **29.865.913.959**

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 18 kegiatan, dan 57 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. **29.143.779.858,-**. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah meliputi Program Perekonomian dan Pembangunan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Program perekonomian dan pembangunan, Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:
 - Terlambatnya OPD dalam proses pengajuan tender ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Kurangnya SDM Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di UKPBJ;
 - Belum meratanya pemahaman mengenai pengddaan barang dan jasa terutama pada tenaga administrasi pengadaan barang dan jasa.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Kegiatan : Fasilitasi dan koordinasi Hukum, Fasilitasi Kerja Sama Daerah, Administrasi Tata Pemerintahan
2. Program Perekonomian dan Pembangunan meliputi Kegiatan: Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penataan Organisasi, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah,Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;

2. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur dibidang pemerintahan dan pembangunan;
4. Terwujudnya tertib laporan pelaksanaan tugas kedinasan;
5. Tersedianya sarana logistik yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran;
6. Perencanaan dan target kegiatan yang tepat;
7. Koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait;
8. Tersedianya sistem LPSE;
9. Sarana prasarana dan anggaran yang cukup memadai;
10. Dukungan jaringan banjarnegara *online*.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada indikator kinerja Sekretariat Daerah sangat dipengaruhi faktor Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai khususnya di bidang inovasi teknologi.

Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Perencanaan anggaran dan pengadaan barang jasa se awal mungkin;
2. Dukungan jaringan online untuk meningkatkan pelayanan dan kreatifitas dalam memanfaatkan teknologi informasi;
3. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pembinaan intensif terhadap SKPD pelaksana pelayanan publik;
5. Mendorong kegiatan yang bersifat inovatif

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
 s.d. Tahun 2023 TW II Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	SEKRETARIAT DAERAH									
TAHUN 2021 DAN 2022										

01	BAGIAN PEMERINTAHAN									
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah		100%	100%	100%	100%			
4.01.02.2.01.	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase fasilitasi Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%			
4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan yang tersusun	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %			
4.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Administrasi Kewilayahan yang tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %			
4.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar nasional dan hari jadi Kab. Banjarnegara	2 Dok	6 laporan	2 dokumen	2 dokumen	100 %			
4.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang tersusun	15 dok	10 dok	10 Dok	10 Dok	100 %			
4.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumah kegiatan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan	2 dokumen	0	3 laporan	3 laporan	100 %			

02	BAGIAN HUKUM									
4.01.02.2.03	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terbentuknya produk hukum daerah	220	72 %	100%	100%	100 %			
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum yang ditetapkan	220	6	18	7	39 %			
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah pelaksanaan pelaporan ranham	4	4	4	4	100%			
		Jumlah fasilitasi penanganan non litigasi yang dilaksanakan, jumlah penanganan litigasi yang dilaksanakan, jumlah perkara bantuan hukum bagi warga miskin	31	1 kasus litigasi, 25 kasus non litigasi, 5 perkara bantuan hukum warga miskin	1 kasus litigasi, 25 kasus non litigasi, 5 perkara bantuan hukum warga miskin	1 kasus litigasi, 17 kasus non litigasi, 5 perkara bantuan hukum warga miskin	74,19%			
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan		2	2	2	100%			
		Jumlah dokumen himpunan produk hukum		1	1	1	100%			

		Jumlah produk hukum yang terdokumentasikan secara elektronik		100	100	100	100%			
03	BAGIAN KESRA									
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									
<i>4.01.02.2.01</i>	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- jml juara yg dikirim ke prop. - jml keg2 pengembangan keh. Beragama. - jml TPHD yg mendampingi jamaah Haji - jml jmaah Haji yg terlayani dari kota asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke kota asal.								
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial.	Jumlah anak yang terlayani								
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan capaian	-menumbuhkan kesadaran masyarakat akan Kesehatan dan olahraga								

	kinerja terkait kesejahteraan Sosial.	-jumlah desa/kel olahraga								
04	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM									
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	BUMD 5 % dan pengendalian laju inflasi daerah		100%	100 %	100 %	100 %			
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Prosentase peningkatan pendapatan, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		100%	100 %	100 %	100 %			
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Peningkatan pendapatan BUMD yang disetor Kasda (5 %) Jumlah dokumen Evaluasi Kierja BUMD (6 Dok) 1 Direktur BUMD yang terpilih (Pertambangan) Jumlah Dewan Pengawas 2 BUMD terpilih (Percetakan dan PDAM)			Jumlah Peningkatan pendapatan BUMD yang disetor Kasda (5 %) Jumlah dokumen Evaluasi Kierja BUMD (6 Dok) 1 Direktur BUMD yang terpilih (Pertambangan)	Jumlah Peningkatan pendapatan BUMD yang disetor Kasda (5 %) Jumlah dokumen Evaluasi Kierja BUMD (6 Dok) 1 Direktur BUMD yang terpilih (Pertambangan)	100 %			

					Jumlah Dewan Pengawas 2 BUMD terpilih (Percetakan dan PDAM	Jumlah Dewan Pengawas 2 BUMD terpilih (Percetakan dan PDAM				
4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah OPD pengampu kegiatan DBHCHT (6 OPD) Jumlah Rakor (2 Kali) dan Monev Tim LPG (4 kali) Jumlah Rakor (2 Kali) dan Monev TPID (4 kali)			Jumlah OPD pengampu kegiatan DBHCHT (6 OPD) Jumlah Rakor (2 Kali) dan Monev Tim LPG (4 kali) Jumlah Rakor (2 Kali) dan Monev TPID (4 kali)	Jumlah OPD pengampu kegiatan DBHCHT (6 OPD) Jumlah Rakor (2 Kali) dan Monev Tim LPG (4 kali) Jumlah Rakor (2 Kali) dan Monev TPID (4 kali)	100 %			
4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah sosialisasi akses permodalan 80 UMKM Jumlah pembinaan 8 LKM		Jumlah sosialisasi akses permodalan 80 UMKM Jumlah pembinaan 8 LKM	80 Org 5 LKM	80 Org 5 LKM	100 %			
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,		100%	100 %	100 %	100 %			

		Kehutanan, Kelautan dan Perikanan								
4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah rakor pupuk dan Pestisida (2 kali) Jumlah monev pupuk dan pestisida (20 Kecamatan)		2	4 dokumen	4 dokumen	100%			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan LH				4 dokumen	4 dokumen	100%			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				4 dokumen	4 dokumen	100%			
05	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4.01 . 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu		100%	100%	100%	100%			
4.01 .03 . 2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya pelaporan kegiatan yang dilaksanakan secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%			

4.01 .03 .2.02 . 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangun	Tersusunnya dokumen perencanaan		3 dok	8 Dokumen	8 Dokumen	100%			
4.01 .03 .2.02 . 02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi Rakor POK		1.500 keg 4 ke	1500 keg 4 keg	1.500keg 4 keg	100%			
4.01 .03 .2.02 . 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun		12	14 laporan	14 laporan	100%			
		Jumlah informasi hasil pembangunan yang terekspos			0 keg	0 keg	0%			
06	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA									
	Program Perekonomian dan Pembangunan									
4.01.03.02.03.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik		98%	98 %	80,5%	82,1 %			
4.01.03.02.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa di UKPBJ		125 paket	125 paket	116 paket	93 %			
4.01.03.02.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses		707 paket	250 paket	697 paket	279 %			

		pengadaan barang dan jasa secara elektronik								
4.01.03.02.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang meningkat kemampuan teknis pengadaan barang dan jasa		44 OPD	44 OPD	44 OPD	100%			
07	BAGIAN ORGANISASI									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan nilai evaluasi kelembagaan pelayanan publik dan kinerja		100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.01 .01 . 2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan pelayanan publik dan tata laksana kinerja dan implementasi reformasi birokrasi		100%	100%	100%				
4.01 .01 .2.13 . 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab	Jumlah dokumen kelembagaan yang disusun		24	20	20	100			
		Jumlah dokumen analisis jabatan yang disusun		44	44	44	100			
4.01 .01 .2.13 . 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang dibina		44	44	44	100			
4.01 .01 .2.13 . 03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen LKJIP Kabupaten yang disusun		3	3	3	100			

		Jumlah dokumen LKJIP dan PK yang disusun oleh OPD		44	44	44	100			
		Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun		1	1	1	100			
08	BAGIAN UMUM									
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran.		100%	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan		100%	100%	100%	100%			
4.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 orang/bulan	100 orang/bulan	100%			
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan			2 Laporan	2 Laporan	100%			

		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%	100%	100%			
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			1 Paket	1 Paket	100%			
4.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Paket	1 Paket	100%			
4.01.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%			
4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya rumah jabatan/dinas bupati, wakil bupati, sekda dan lingkungan Setda		100%	100%	100%	100%			
4.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			75 Unit	75 Unit	100%			
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			35 Unit	35 Unit				
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor		100%	100%	100%	100%			

4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100%			
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			26 Laporan	26 Laporan	100%			
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang pada rumah dinas dan sekretariat		100%	100%	100%	100%			
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara yang dibayarkan Pajaknya			6 Unit	6 Unit	100%			
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			33 Unit	33 Unit	100%			
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			30 Unit	30 Unit	100%			
4.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	20 Unit	100%			

	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	100%			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			30 Unit	30 Unit	100%			
4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Presentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah		100%	100%	100%	100%			
4.01.01.2.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%			
4.01.01.2.11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%			
4.01.01.2.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang	2 Orang	100%			
4.01.01.2.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional			2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	100%			

	Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
TAHUN 2023 DAN 2024										
01	BAGIAN PEMERINTAHAN									
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra	100%						100%	100%
4.01.02.2.01.	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda	100%					100%	100%	100%
4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	4 Dok					4 dok	4 Dok	100%
4.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Administrasi Kewilayahan	1 dok					1 dok	1 dok	100%
4.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 dok					2 dok	2 dok	100%
4.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah	100 %					100%	100 %	100%
4.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	15 Dok					10 dok	10 Dok	100%

		Dalam Negeri								
4.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 dok					2 dok	2 dok	100%
02	BAGIAN HUKUM									
4.01.02.2.03										
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	100%					100%		
4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	220 dok					220 dok		
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	31 kasus					31 kasus		
		Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun	4 lap					4 lap		
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	220 dok					220 dok		

		Jumlah jenis buku peraturan perundang-undangan yang dihimpun	15					15		
		Jumlah produk hukum daerah yang disosialisasikan	2 dok					2 dok		
03	BAGIAN KESRA									
4.01.02.2.01	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Prosentase terlaksananya kegiatan mental spiritual dan kesejahteraan rakyat	100%					100%	100%	100%
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 dok					7 dok		
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 dok					1 dok		
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan capaian	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	3 dok					3 dok		

	kinerja terkait kesejahteraan Sosial.	Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								
04	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase engkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	100%					100%	100%	
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	100 %					100%	100%	100%
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	100%
4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 laporan					12 laporan	12 laporan	100%

4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100%
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam bidang Pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air	100%					100%	100%	100%
4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan LH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100%

		Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan								
05	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4.01 .03 . 2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan	100%					100%	100%	100%
4.01 .03 .2.02 . 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10 dok					8 dok	8 dok	100%
4.01 .03 .2.02 . 02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 lap					12 lap	12 lap	100%
4.01 .03 .2.02 . 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan Pembangunan	14 lap					14 lap	14 lap	100%
06	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA									
	Program Perekonomian dan Pembangunan									
4.01.03.02.03.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik	98 %					98 %		

4.01.03.02.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa di UKPBJ	125 paket					125 paket		
4.01.03.02.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik	250 paket					250 paket		
4.01.03.02.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang meningkat kemampuan teknis pengadaan barang dan jasa	44 OPD					44 OPD		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase peningkatan nilai evaluasi kelembagaan, pelayanan publik dan kinerja	100%							
07	BAGIAN UMUM									
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100%					100%		
4.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan					100 Orang/ Bulan		
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen		

4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan					2 Laporan		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Setda	100%					100%		
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen					1 Dokumen		
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 Orang					100 Orang		
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan jasa kantor	100%					100%		
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1 Paket		
4.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket					1 Paket		
4.01.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket					1 Paket		

		Disediakan								
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket					1 Paket		
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan					12 Laporan		
4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlayannya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan pada Rumah Jabatan dan Sekretariat	100%					100%		
4.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit					50 Unit		
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 Unit					25 Unit		
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhinya jasa kantor	100%					100%		
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan		
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	12 Laporan					12 Laporan		
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	26 Laporan					26 Laporan		

4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlayannya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang pada Rumah Dinas dan Sekretariat	100%					100%		
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit					6 Unit		
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit					33 Unit		
4.01.01.2.09.09	Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit					15 Unit		
4.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit					5 Unit		
4.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit					3 Unit		

4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah	100%					100%		
4.01.01.2.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	2 Orang/ Bulan					2 Orang / Bulan		
4.01.01.2.11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yg disediakan	1 Paket					1 Paket		
4.01.01.2.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang					2 Orang		
4.01.01.2.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	2 Orang/ Bulan					2 Orang/ Bulan		
	Keg. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah	100%					100%		
	Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Paket					1 Paket		
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah	jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil KDH yang disediakan	1 Paket					1 Paket		

	Tangga Wakil Kepala Daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket					1 Paket		
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase pemenuhan Pelayanan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100%					100%		
	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan					12 Laporan		
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi	12 Laporan					12 Laporan		
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	12 Laporan					12 Laporan		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Penataan Organisasi	48,2							
08	BAGIAN ORGANISASI									
4.01 .01 . 2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan pelayanan publik dan tata laksana kinerja dan implementasi reformasi birokrasi	100%							

4.01 .01 .2.13 . 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disusun								
4.01 .01 .2.13 . 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	44							
4.01 .01 .2.13 . 03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, sekretariat Daerah mengampu 19 Indikator. Dari 19 indikator tersebut, 18 berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Tercapai karena faktor :

- Penambahan kuantitas dan kualitas SDM yang mampu bekerja optimal;
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah dan *stake holder* terkait;
- Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat pencapaian informasi;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan yang optimal;
- Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah terkait;
- Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat pencapaian informasi.
- Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2. Tidak tercapai karena faktor :

- Penetapan Peraturan Daerah tidak sesuai Rancangan Perda yang diusulkan;
- Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha, hal ini terkait dengan adanya sistem izin usah ke OSS yang diakses oleh pelaku UMKM;

- Belum terintegrasinya penggunaan sistem pengukuran kinerja dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.
- Belum semua perangkat daerah tertib dalam mengumpulkan berkas/dokumen evaluasi pelayanan publik, Survei Kepuasan Masyarakat, kematangan kelembagaan, analisis jabatan dan pengukuran kinerja perangkat daerah per triwulan.
- Belum semua pimpinan perangkat daerah memberikan perhatian dalam mengoptimalkan data-data pendukung terkait kematangan kelembagaan, pengukuran kinerja, pelayanan publik.
- Masih minimnya inovasi pelayanan publik
- Adanya refocusing anggaran.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Melaksanakan sosialisasi produk UKM/IKM kepada masyarakat;
2. Mempermudah mekanisme perizinan;
3. Meningkatkan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap BUMD.
4. Mengoptimalkan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka menyusun dokumen kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana, kinerja perangkat daerah dan implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah.
5. Melaksanakan penjaringan dan fasilitasi inovasi pelayanan public serta mengikutsertakan dalam setiap kompetisi inovasi pelayanan public.

Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP8/'08)	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masyarakat		Angka capaian	100%	100%			0	100%			
2	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin			100%	100%			100%	100%			
3	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, olah raga dan pemberdayaan perempuan			100%	100%			100%	100%			

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP8/'08)	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran.			100%	100%			100%	100%			
5	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang menunjang kinerja aparatur			100%	100%			100%	100%			
6	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur pengelolaan keuangan aparatur di lingkungan setda			100%	100%			100%	100%			
7	Persentase fasilitasi pemrosesan perda			100%	100%			100%	33%			

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP8/'08)	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Persentase pelaksanaan bantuan hukum dan hak asasi manusia			100%	100%			100%	100%			
9	Persentase produk hukum yang di publikasikan			80%	80%			80%	80%			
10	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat			79	79			82.30	82,5			
11	Skoring LPPD Kabupaten Banjarnegara			3,03	3,04							Skoring LPPD Tahun 2020 dari Tim Daerah Maupun Tim Pusat belum keluar.
12	Persentase Fasilitasi Penyusunan regulasi Pemerintah Desa			100%	100%			100%	100%			Berdasarkan Perbup No. 77 Tahun 2020 bukan menjadi kewenangan Bag. Pemotda, tetapi menjadi kewenangan Dispermades PPKB
13	Persentase fasilitasi kerja sama			100%	100%			100%	100%			

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP8/'08)	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik			98%	98%			100%	165%			
15	Persentase kegiatan yang dilaksanakan secara tepat waktu			100%	100%			100%	100%			
16	Persentase penyerapan anggaran			86%	86%			93%	86%			
17	Nilai SAKIP Kabupaten Banjarnegara			B	B			B	B			
18	Persentase Peningkatan Pendapatan BUMD yang disetor ke Kasda		5%	5%	5%			15,288,107,95 2.13 5 %	12%			

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP8/'08)	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Tingkat inflasi daerah		4 ± 1%	4 ± 1%	4 ± 1%			3,50	6.49%			
TAHUN 2023 dan 2024												
No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP8/'08)	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra					100%	100%			100%	100%	
2	Persentase engkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian					100%	100%			100%	100%	

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP8/'08)	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	an dan pembangun an											
3	Persentase peningkatan nilai evaluasi kelembagaan, pelayanan publik dan kinerja					100%	100%			100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu urusan, yaitu pendukung urusan pemerintahan berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup satu urusan tersebut. Permasalahan dan / hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Penyusunan data dukung pengukuran kematangan kelembagaan, evaluasi pelayanan publik, pengukuran kinerja perangkat daerah dan implementasi reformasi birokrasi belum maksimal;
2. Kebijakan Penataan Kelembagaan yang sangat dinamis.
3. Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum berjalan secara maksimal
4. Pemahaman yang kurang bagi OPD dan kecamatan terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat.
5. Adanya peraturan baru terkait penyusunan LPPD dan LKPJ sehingga perlu penyesuaian OPD teknis dengan menyiapkan data dukung IKK dan isian LKPJ.
6. Terlalu banyak Mou yang disusun dan tidak ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama;
7. Belum optimalnya koordinasi terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Implementasi kebijakan bidang perekonomian belum optimal;
9. Pengendalian dan monitoring kegiatan pembangunan belum optimal dan belum didukung sistem informasi berbasis website yang mudah diakses seluruh perangkat daerah.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Hasil Pengukuran kematangan kelembagaan, evaluasi pelayanan publik, pengukuran kinerja perangkat daerah dan implementasi reformasi birokrasi belum maksimal;
2. Dokumen analisis jabatan sering mengalami perubahan;
3. Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tidak bisa berjalan maksimal, sehingga konsep memudahkan pelayanan masyarakat yang cukup hanya ditingkat kecamatan sulit dicapai;
4. Pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum dapat dilaksanakan sepenuhnya terutama terkait dengan perizinan;
5. Data dukung IKK dan isian LKPJ yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 menyulitkan bagi Tim Penyusun, sehingga Tim Penyusun harus menyampaikan informasi kembali untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan yang dibutuhkan;
6. MOU yang tidak ditindaklanjuti dengan PKS, kedua belah pihak tidak bisa melaksanakan program secara optimal sehingga beberapa Perangkat Daerah belum bisa memanfaatkan hasil dari kerjasama tersebut;
7. Kurangnya pelayanan kesehatan masyarakat khususnya untuk keluarga/masyarakat kurang mampu;
8. Peningkatan perekonomian lambat.
9. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kurang tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat administrasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Belum semua unit-unit pelayanan perangkat daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP).
2. Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah. Laporan kinerja yang disajikan OPD belum menggambarkan

kinerja PD, tetapi masih sebatas menceritakan proses ataupun aktifitas yang dilaksanakan.

- 3 Masih lemahnya pengendalian intern yang disertai pemantauan secara rutin.
- 4 Masih belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- 5 Masih belum optimalnya keterlibatan peran masyarakat dalam proses-proses penyusunan perencanaan.
- 6 Tuntutan adanya SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai IPTEK.
- 7 Tantangan pada proses Pengadaan barang dan jasa:
 - Kurangnya SDM fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di UKPBJ;
 - Trend pengajuan tender di triwulan 2 dan triwulan 3 masih tinggi dan masih banyak dokumen perencanaan pengadaan yang perlu kaji ulang.
 - Belum meratanya kompetensi penyedia barang dan jasa terutama pada tenaga administrasi pengadaan barang dan jasa.
- 8 Belum termanfaatkannya website Setda sebagai media informasi online tentang produk layanan;
- 9 Belum optimalnya pembinaan bagi organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah :

1. Adanya penyederhanaan birokrasi dan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional;
2. Tersedianya regulasi kebijakan pelayanan publik yang mendukung inovasi untuk memberikan pelayanan prima;
3. Adanya aplikasi e-Perda dari kementerian untuk membangun sinergi dan akselerasi pembentukan produk hukum daerah berbasis digital sesuai perkembangan aturan dari pusat,
4. Peluang diklat peningkatan kualitas SDM;

5. Peluang untuk pengembangan pengembangan PAD masih cukup terbuka;
6. Pembinaan kapasitas barang/jasa kepada penyedia barang dan jasa;

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - a. Budaya kerja pegawai antara lain disiplin dan inovasi pegawai yang kurang;
 - b. Perubahan Peraturan ditingkat pusat yang terlalu cepat sehingga butuh waktu bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan;
 - c. Penyusunan Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah belum maksimal sehingga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selalu memperoleh peringkat 5 (lima) besar dari bawah;
2. Isu terkait perekonomian dan pembangunan
 - a. Perlambatan perekonomian daerah secara makro;
 - b. Ketidaksesuaian realisasi fisik kegiatan dengan target yang telah direncanakan;
 - c. Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap kinerja hasil pembangunan dan informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - d. Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan e procurement bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - e. Ketersediaan informasi pembangunan melalui media
3. Isu terkait pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
 - a. Pemahaman ASN terkait gratifikasi masih kurang;

- b. Belum optimalnya kordinasi terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Reformasi birokrasi di lingkungan Setda;
 - d. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.
4. Isu terkait Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kinerja Perangkat Daerah
- a. Implementasi Reformasi Birokrasi dan ketersediaan data pendukung ;
 - b. Kinerja Perangkat Daerah dapat dievaluasi secara periodik (triwulanan).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023 meliputi tiga Program yaitu :

1. Program Administrasi Umum
2. Program Pemerintahan dan Kesra
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tar- get Ca- paia n	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tar- get Ca- paian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat		Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra	100%		Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat		Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra			
1	Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Kab.Banjarnegara	Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda	100%	300.000.000	Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Kab.Banjarnegara			685.522..000	
1.1	Sub Keg. Penataan		Jumlah Dokumen	4 dok	300.000.000	Sub Keg. Penataan Administrasi				120.522.000	

	Admin-istrasi Pemerinta-han		Hasil Pena-taan Ad-ministrasi			Pemerinta-han					
1.2	Sub Keg. Pengel olaan Ad-ministrasi Kewilaya-han		Kewilaya-han	1 dok	250.000.000					100.000.000	
1.3	SubKeg. Fasilitas Pelaksa-naan Otonomi		Jml Dok.Hasil fasilitas pelaks Otonomi Daerah	1 dok	800.000.000					465.000.000	
2	Keg. Fasili-tasi Ker-jasama Daerah		Persentase fasilitas kerjasama daerah	100%	30.000.000					19.746.000	
2.1	SubKeg. Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasil-itasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 dok	25.000.000					15.000.000	
2.2	Evaluasi Pelaksa-naan Ker-jasama		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksa-naan	3 dok	5.000.000					4.746.890	

3.	Keg.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Prosentase terlaksananya kegiatan mental spiritual dan kesejahteraan rakyat	100%	3.220.798.600					3.220.798.600	
3.1	SubKeg. Fasilitas pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 dok	3.097.936.000					3.097.936.000	
3.2	Sub-Keg.Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan	1 dok	50.000.000					50.000.000	

			Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
3.3	Sub-Keg.Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	1 dok	72.853.600					72.853.600	

			Pendidikan, Ke- budayaan, Per- pustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								
4	Keg. Fasili- tasi dan Koordinasi Hukum		Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	100%	414.750.000	Fasilitasi dan Koordina- nasi Hukum		Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	100%	414.750.000	
4.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	220 Dokumen	157.500.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	220 Dokumen	157.500.000	
4.2	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi	31 kasus	178.500.000	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi	31 kasus	178.500.000	

			Bantuan Hukum					Bantuan Hukum			
			Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun	4 laporan				Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun	4 laporan		
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	220 Dokumen	78.750.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	220 Dokumen	78.750.000	
			Jumlah jenis buku peraturan perundang-undangan yang dihimpun	15 Dokumen				Jumlah jenis buku peraturan perundang-undangan yang dihimpun	15 Dokumen		
			Jumlah produk hukum daerah yang disosialisasikan	2 produk hukum				Jumlah produk hukum daerah yang disosialisasikan	2 produk hukum		
II	Program Perekonomian dan		Persentase engkoordinasi		1.868.450.000					1.868.450.000	

	Pem- angunan		nasian pe- rumusan kebijakan bidang perekonom ian dan pem- angunan								
1	Keg.Pelaks anaan Kebijakan Perekonom ian		Prosentase pelaksa- naan ke- bijakan perekonomi an untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev un- tuk pengem- dalian dan distribusi perekonomi an, ter- susunnya perencanaa n dan pengawasa n ekonomi mikro kecil	100 %	724.500.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomi an		Prosentase pelaksa- naan ke- bijakan perekonomi an untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev un- tuk pengem- dalian dan distribusi perekonomi an, ter- susunnya perencanaa n dan pengawasa n ekonomi mikro kecil	100%	724.500.000	
1.1	Koordi- nasi, Sink- ronisasi, Monitoring		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	5 Doku men	477.750.000	Koordinasi, Sink- ronisasi, Monitoring dan Evaluasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	5 Doku men	477.750.000	

	dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	183.750.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	183.750.000	
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	63.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	63.000.000	
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Prosentase pelaksanaan fasilitas dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Sumber	100,00%	89.250.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Prosentase pelaksanaan fasilitas dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Sumber	100,00%	89.250.000	

			Daya Alam bidang Pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan Air					Daya Alam bidang Pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan Air			
2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	63.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	63.000.000	
2.2	SUBKeg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	4 Dokumen	15.750.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	4 Dokumen	15.750.000	

	Per- tambangan dan Ling- kungan Hidup		dan Eval- uasi Ke- bijakan Urusan Per- tambangan dan Sum- ber Daya Mineral, Lingkungan Hidup			dan Ling- kungan Hidup		dan Eval- uasi Ke- bijakan Urusan Per- tambangan dan Sum- ber Daya Mineral, Lingkungan Hidup			
2.3	Koordi- nasi, Sink- ronisasi dan Eval- uasi Ke- bijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sink- ronisasi, dan Eval- uasi Ke- bijakan Urusan En- ergi dan Air	4 Doku men	10.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sink- ronisasi, dan Eval- uasi Ke- bijakan Urusan En- ergi dan Air	4 Doku men	10.500.000	
3	Kegiatan Pelaksana an Administra si Pembangu nan	Ban- jarnegar a	Persentase pelaksa- naan fasili- tasi penyusu- nan pen- gendalian , monev dan pelaporan program pem- angunan	100%	154.700.000	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangun an	Ban- jarnegar a	Persentase pelaksa- naan fasili- tasi penyusu- nan pen- gendalian , monev dan pelaporan program pem- angunan	100%	154.700.000	

3.1	SubKeg. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10 dok	25.000.000	SubKeg. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10 dok	25.000.000	belanja peningkatan SDM dan penambahan target dari 8 menjadi 10 dokumen
3.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi program pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	21.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi program pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	21.000.000	Tambahan belanja honorarium narasumber monev APBD dan honorarium pendukung pelaksanaan kegiatan serta Upgrade/pening-

											katan ka- pasitas aplikasi SIPOK
3.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan program pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan	14 laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan program pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan	14 laporan	50.000.000	
4	Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	98%	900.000.000					900.000.000	
4.1	SubKeg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dok	500.000.000					500.000.000	
4.2	SubKeg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan	150 dok	150.000.000					150.000.000	

4.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Org	250.000.000					250.000.000	
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase peningkatan nilai evaluasi kelembagaan, pelayanan publik dan kinerja	100%	28.122.085.323					28.122.085.323	
1	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100%	14.008.085.323					14.008.085.323	
1.1	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan AASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Org	13.603.835.323					13.603.835.323	
1.2	Subkeg. Pelaksa-		Jumlah Dokumen	3 dok	367.500.000					367.500.000	

	naan Pena- tausahaan dan pen- gujian/ver- ifikasi keu- angan SKPD		Pena- tausahaan dan Pen- gujian/Ver- ifikasi Keu- angan SKPD								
1.3	Subkeg. Koordinasi Penyusu- nan Laporan Keuangan Bu- lanan/Triw ulan/Se- mester		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwu- lanan/ Se- mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusu- nan Laporan Keuangan Bu- lanan/Triw ulanan/Se- mesteran SKPD	2 lap	36.750.000					36.750.000	
2	Keg. Ad- ministrasi Kepega- waian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan ad- ministrasi Kepega- waian Setda	100%	52.500.000					52.500.000	

2.1	Subkeg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	26.250.000					26.250.000	
2.2	SubKeg. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 ORG	26.250.000					26.250.000	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan jasa kantor	100%	4.572.750.000					4.572.750.000	
3.1	Sub-Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penyerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	68.250.000					68.250.000	

3.2	Subkeg. Penye- diaan pra- latan dan perlengka- pan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Per- engkapan	1 paket	157.500.000					157.500.000	
3.3	Penyediaa n alat rumah tangga		Jumlah Pa- ket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	52.500.000					52.500.000	
3.4	Penyediaa n bahan logistik kantor		Jumlah Paket Ba- han Logis- tik Kantor yang Disediakan	1 paket	3.282.000.000					3.282.000.000	
3.5	Penye- diaan ba- rang ce- takan dan penggan- daan		Jumlah Pa- ket Barang Cetakan dan Peng- gandaan yang Dise- diakan	1 paket	78.750.000					78.750.000	
3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamuk		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuk	3 lap	933.750.000					933.750.000	
4	Keg.Penga- daan Ba- rang Milik		Terlaya- ninya Kebutuhan	100%	1.441.250.000					1.441.250.000	

	Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Peralatan dan perlengkapan pada Rumah Jabatan dan Sekretariat								
4.1	Sub Keg. Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 unit	619.750.000					619.750.000	
4.2	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	821.500.000					821.500.000	
5	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase terpenuhinya jasa kantor	100%							
5.1	SubKeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lap	630.000.000					630.000.000	

			yang Dise- diakan								
5.2	SubKeg. Penye- diaan Jasa Peralatan dan Per- engkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	12 lap	367.500.000					367.500.000	
5.3	Penye- diaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pela- yanan Umum Kantor yang Dise- diakan	26 lap	2.625.000.000					2.625.000.000	
6	Keg. Pemeli- haraan Ba- rang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta- han Dae- rah		Terlaya- ninya Kebutuhan Jasa Pemeli- haraan Ba- rang Milik Daerah Penunjang pada Ru- mah Dinas dan Sekretariat	100%	1.837.500.000					1.837.500.000	

6.1	sub-Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	525.000.000					525.000.000	
6.2	SubKeg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	472.500.000					472.500.000	
6.3	SubKeg. Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	52.500.000					52.500.000	

6.4	SubKeg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 unit	105.000.000					105.000.000	
6.5	Sub-Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	420.000.000					420.000.000	
6.6	SubKeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	262.500.000					262.500.000	
7	Keg. Administrasi Keuangan Operasional KDH dan Wakil KDH		Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil	100%	945.000.000					945.000.000	

			Kepala Daerah								
7.1	SubKeg. Penye- diaan Gaji dan Tun- jangan KDH dan Wakil KDH		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Org/ bln	105.000.000					105.000.000	
7.2	SUBKeg. Penye- diaan Pa- kaian di- nas dan atribut KDH dan wakil KDH		Jumlah Paket Pa- kaian Di- nas dan Atribut Kelengka- pan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	105.000.000					105.000.000	
7.3	SubKeg. Pelaksa- naan Medi- cal chekUp KDH dan Wakil KDH		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Dae- rah dan Wakil	2 Org	630.000.000					630.000.000	

			Kepala Daerah								
8	Keg. Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah		Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah	100%	965.250.000					965.250.000	
8.1	SubKeg. Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	720.000.000					720.000.000	
8.2	SubKeg. Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	5.250.000					5.250.000	
8.3	SubKeg. Penyediaan		Jumlah Paket Kebutuhan	1 paket	240.000.000					240.000.000	

	kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah		Rumah Tangga Setda yg disediakan								
9	Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Prosentase pemenuhan Pelayanan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100%	525.000.000					525.000.000	
9.1	SubKeg. Fasilitas Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 lap	315.000.000					315.000.000	
9.2	SubKeg. Fasilitas Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 lap	157.500.000					157.500.000	
9.3	SubKeg. Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 lap	52.500.000					52.500.000	

10	Keg. Penataan Organisasi		Persentase dokumen evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan, kinerja dan implementasi Reformasi Birokrasi	100%	152.250.000					152.250.000	
			Nilai Penataan Kelembagaan	48.2							
10.1	SubKeg. Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab		Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disusun	44 dok	47.250.000					47.250.000	
10.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	44 lap	52.500.000					52.500.000	

10.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	49 dok	52.500.000					52.500.000	
------	---	--	--	--------	------------	--	--	--	--	------------	--

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Mewujudkan organisaasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran paska penyederhanaan birokrasi;
2. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan implementasi reformasi birokrasi sampai dengan unit kerja;
3. Monitoring kegiatan pembangunan perlu ditingkatkan;
4. Penyusunan Dokumen dan expos program pembangunan Daerah secara lengkap;
5. Untuk segera menyusun Raperda Penyertaan Modal dan Perubahan Kelembagaan BUMD, serta menyelenggarakan seleksi 2(dua) Dewan Pengawas BUMD;
6. Kebijakan Perekonomian diarahkan pada Pameran UMKM fisik dan Virtual, Implementasi digitalisasi UMK, data profil potensi pertambangan, LH, Sumber daya energi dan air untuk penyusunan rekomendasi kebijakan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional serta program strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia di Tahun 2020 sampai dengan 2021, menjadikan hampir seluruh provinsi mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Hampir semua provinsi pertumbuhan ekonominya minus.

Tema Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2024 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Perencanaan Pembangunan tahun 2024 diharapkan sebagai momentum bangkitnya dari pandemi dengan mewujudkan transformasi ekonomi sekaligus sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045. Indikasi isu penting nasional tahun 2024 adalah Pemulihan Ekonomi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dan Transformasi Ekonomi yang Inklusif.

RKP tahun 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) antara lain : PN 5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar. RKP tahun 2024 juga menetapkan sejumlah sasaran pembangunan nasional, antara lain yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5 – 6,2 persen, Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0 persen, Rasio Gini 0,376 – 0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,44 – 73,48, Nilai Tukar Petani 102 – 104. Untuk mencapai sasaran tersebut, transformasi ekonomi akan dilaksanakan secara inklusif dan terpadu dengan meningkatkan daya beli dan usaha. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan diversifikasi ekonomi yang

dilakukan dengan peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, pembangunan nredah karbon, dan peningkatan pemerataan infrastruktur serta kualitas layanan digital.

Tema indikatif pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu : “ Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM”. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutann lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana; penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM meunju SDM berdaya saing serta **pemantapan tata kelola pemerintahan serta kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.**

Tema kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 yaitu: Penguatan terhadap cakupan pemenuhan layanan dasar pemerintah melalui pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 diarahkan pada "Perwujudan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Daerah sebagai Penopang Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar dan Penguatan Daya Saing Daerah", dengan prioritas ditujukan pada :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat;
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah mlalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya

melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai;

- 3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab;
- 4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Target makro tahun 2024 dalam RPD Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% - 5,5%
- b. Inflasi 3% ± 1%
- c. PDRB Per Kapita > 21,5 juta rupiah
- d. Penduduk miskin 15,64% - 14,46%
- e. Pengangguranterbuka < 5%
- f. IPM 68%

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Dengan telah berakhirnya masa perencanaan dalam Renstra 2017 – 2022 dan belum disusunnya dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode berikutnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan

- 1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, Misi, dan Tujuan. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan, maka Sasaran yang akan dicapai adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor LPPD Kabupaten Banjarnegara	Angka	3,12
		SAKIP Setda	nilai	B
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka	80

3.3 Program dan Kegiatan

Sasaran dan Program kegiatan pada Sekretariat Daerah ada pada **Tabel 3.3.** berikut :

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Pemerintahan dan Kesra, kegiatan: 1) Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan : a. Penataan Administrasi Pemerintahan b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2) Fasilitasi Kerja Sama Daerah, Sub Kegiatan :

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri b. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
		3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, sub kegiatan : a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah b. Fasilitasi Bantuan Hukum c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		4) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, sub kegiatan : a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
		Program Perekonomian dan Pembangunan, kegiatan: 5) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, sub kegiatan : a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 6) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
		7) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, sub kegiatan : a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 8) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
2	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Pelayanan Publik	Program Adiministrasi Umum, kegiatan: 9) Penataan Organisasi, sub kegiatan : a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		10) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan : a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, sub kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		12) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan : a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan : a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 15) Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan: a. Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 16) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operaional Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan : a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil KDH b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala dan Wakil KDH c. Pelaksanaan Medical ChekUp Kepala dan Wakil KDH d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil KDH 17) Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Setda, Sub Kegiatan : a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		b. Penyediaan Kebutuhan Wakil KDH c. Penyediaan Kebutuhan RT Setda 18) Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Kegiatan : a. Fasilitasi Keprotokolan b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertujuan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, meningkatnya pelayanan terhadap penduduk miskin, meningkatnya sarana dan prasarana ibadah.

Program didukung dengan kegiatan : Administrasi Pemerintahan, Fasilitasi Kerjasama Daerah, Fasilitasi Koordinasi Hukum dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan bertujuan : meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, efektif dan efisien melalui pengembangan produksi, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengendalian program, evaluasi dan laporan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran serta pengadaan barang dan jasa melalui LPSE.

Program Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Program Administrasi Umum

Program Administrasi Umum bertujuan : Meningkatkan kinerja apatur pemerintah daerah yang kompeten melalui mekanisme kerja/prosedur yang transparan, efisien dan efektif serta mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran; Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana kerja; serta Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Program Administrasi Umum didukung dengan kegiatan Penataan Organisasi, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah
Setda Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2024

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan									
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 241.040.800				Rp. 241.040.800	Rp. 700.000.000
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayah-an	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 300.000.000
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 465.000.000				Rp. 465.000.000	Rp. 800.000.000

4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp.2.941.112.300				Rp.2.941.112.300	Rp. 3.297.936.000
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 100.000.000
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 100.000.000
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 165.375.000
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 187.425.000
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 82.687.500
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah									
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 4.745.500				Rp. 4.745.500	Rp. 10.000.000

4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 42.999.900				Rp. 42.999.900	Rp. 500.000.000
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 4.080.000				Rp. 4.080.000	Rp. 200.000.000
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 20.999.900				Rp. 20.999.900	Rp. 100.000.000
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan									
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 41.000.000
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000			Rp. 30.000.000	Rp. 100.000.000
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 75.000.000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 201.510.000				Rp. 201.510.000	Rp. 600.000.000

4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 19.320.000				Rp. 19.320.000	Rp. 200.000.000
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 77.185.000	Rp. 6.985.000			Rp. 84.170.000	Rp. 300.000.000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp.2.927.833.200				Rp.2.927.833.200	Rp. 100.000.000
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 200.000				Rp. 200.000	Rp. 25.000.000
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 200.000				Rp. 200.000	Rp. 25.000.000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 11.902.117.277				Rp. 11.902.117.277	Rp. 13.603.835.323
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 316.230.000				Rp. 316.230.000	Rp. 367.500.000

4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 35.000.100				Rp. 35.000.100	Rp. 36.750.000
---	----	----	------	------	---	--------------------------------------	--	--	----------------	--	--	--	----------------	----------------

4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
4	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp. 26.250.000
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp. 26.250.000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 64.120.400			Rp. 64.120.400		Rp. 68.250.000
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 26.327.100	Rp. 3.690.000		Rp. 30.017.100		Rp. 52.500.000
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 1.696.083.000			Rp. 1.696.083.000		Rp. 3.282.000.000
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 74.760.500			Rp. 74.760.500		Rp. 78.750.000
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 952.195.000			Rp. 952.195.000		Rp. 933.750.000

4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
---	----	----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 500.000	Rp.269.618.000			Rp. 270.118.000	Rp. 619.750.000
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 500.000	Rp. 99.621.000			Rp. 100.121.000	Rp. 821.500.000
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 550.000.000				Rp. 550.000.000	Rp. 630.000.000
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 98.543.100				Rp. 98.543.100	Rp. 367.500.000
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 1.790.375.880				Rp. 1.790.375.880	Rp. 2.625.000.000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 99.993.000				Rp. 99.993.000	Rp. 525.000.000

4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 255.835.000				Rp. 255.835.000	Rp. 472.500.000
---	----	----	------	------	---	--------------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	-----------------

4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 49.996.300				Rp. 49.996.300	Rp. 52.500.000
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 100.021.700				Rp. 100.021.700	Rp. 105.000.000
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 348.740.780				Rp. 348.740.780	Rp. 420.000.000
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 199.988.050				Rp. 199.988.050	Rp. 262.500.000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 5.005.563				Rp. 5.005.563	Rp. 105.000.000
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 99.178.200				Rp. 99.178.200	Rp. 105.000.000
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 41.071.700				Rp. 41.071.700	Rp. 105.000.000
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 600.000.000				Rp. 600.000.000	Rp. 630.000.000
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									

4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 770.000.000				Rp. 770.000.000	Rp. 720.000.000
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 4.000.000				Rp. 4.000.000	Rp. 5.250.000
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 227.844.000				Rp. 227.844.000	Rp. 240.000.000
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi									
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 49.612.500
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 55.125.000
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 55.125.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Ter- duga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komu- nikasi Pimpinan									
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 98.705.200	Rp. 5.903.000			Rp. 104.608.200	Rp. 315.000.000
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 84.996.500				Rp. 84.996.500	Rp. 157.500.000
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 143.547.000				Rp. 143.547.000	Rp. 52.500.000
Jumlah									Rp. 27.971.901.950	Rp. 400.817.000			Rp. 28.372.718.950	Rp.38.420.371.323
									SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  Drs. INWARTO, M.Si Pemdana Utama Madya NIP. 19651003 198407 1 001					

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi rencana kerja operasional bagi Perangkat Daerah untuk menjalankan programnya guna menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Akhirnya, untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah ditetapkan pada tahun 2023, selain perlu didukung dengan program dan kegiatan juga diperlukan sinergitas melalui koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal : 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. INARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196510031986071001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	58
BAB V PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan

berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 245);
27. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 78);
 28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
 29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
 30. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD,

serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Urusan Pemerintahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 2 program, 15 kegiatan, dan 45 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 47.224.000.000,-, dengan fokus utama pada pada Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi tersebut dilaksanakan untuk memfasilitasi tugas DPRD yang meliputi:

1. Penganggaran;
2. Legislasi;
3. Pengawasan.

Dari 2 program, 15 kegiatan, dan 45 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 2 program, 15 kegiatan, dan 44 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 44.342.840.582,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok

sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 2 program, 15 kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 45.337.849.788,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi semua program, kegiatan maupun sub kegiatan kecuali Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Jadwal kegiatan yang padat sehingga mempengaruhi tingkat capaian kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan terutama pada urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, disamping itu jadwal kegiatan kunjungan lapangan

bersamaan dengan jadwal alat kelengkapan lain yang sebagian besar anggotanya dari Komisi I DPRD.

2. Kekurangan SDM karena ASN yang purna tugas dan promosi jabatan tetapi tidak diganti dengan personel yang baru menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih padat.
3. Adanya power politik dalam memfasilitasi DPRD yang menyebabkan tekanan yang tinggi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program Sekretariat DPRD.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi semua Program/Kegiatan/Sub Kegiatan selain 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup;
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
4. Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka apabila terdapat kondisi yang stabil, tidak terjadi perubahan SOTK yang menyebabkan kegiatan kurang optimal, dan koordinasi yang baik dengan pimpinan dan anggota DPRD. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sedini mungkin setelah anggaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengoptimalan dan pengaturan jadwal kegiatan DPRD secara lebih seksama, sehingga semua kegiatan DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat difasilitasi dengan baik dan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
3. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan anggota DPRD, terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara;
4. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga semua program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan									
4.02	Sekretariat DPRD									
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	88,33%	100 %	85,1 %	85,1 %	100 %	100 %	100 %

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	16 dokumen	100 %	16 dokumen	16 dokumen	100 %	16 dokumen	16 dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan dan Capaian Kinerja yang disusun	4 dokumen	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang	24 dokumen	100 %	26 dokumen	26 dokumen	100 %	26 dokumen	26 dokumen	100 %

		disusun								
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah Pelatihan yang diikuti sesuai tugas dan fungsi	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi	8 orang	6 orang	18 orang	18 orang	100 %	19 orang	19 orang	100 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %

	kantor	kantor yang terpenuhi								
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor yang terpenuhi	18 paket	18 paket	18 paket	18 paket	100 %	18 paket	18 paket	100 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang terpenuhi	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	3 paket	100 %
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL yang dibayarkan honornya	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	100 %	14 orang	14 orang	100 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yabg terpenuhi								
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100 %	22 unit	22 unit	100 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin yang dipelihara	7 unit	7 unit	7 paket	7 paket	100 %	79 unit	79 unit	100 %

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan pemeliharaan dan rehab gedung kantor yang dilaksanakan	6 paket	5 paket	6 paket	6 paket	100 %	1 unit	1 unit	100 %
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Hak Administratif dan Keuangan Anggota DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah dokumen pembayaran uang representatif dan tunjangan anggota DPRD yang disusun	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100 %	50 orang	50 orang	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang diadakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	0 paket	0 paket	0 %
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah dokumen laporan kegiatan pemeriksaan kesehatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	50 orang	50 orang	100 %

		anggota DPRD yang dilaksanakan								
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	68,27%	100 %	98,5%	98,5 %	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase rancangan perda yang dibahas berdasarkan propemperda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Raperda yang difasilitasi pembahasannya	8 Raperda	5 Raperda	8 Raperda	5 Raperda	62,5 %	10 Raperda	10 Raperda	100 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah laporan hasil pengkajian perundang-undangan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah Raperda inisiatif DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Raperda	5 Raperda	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

	dan/atau Naskah Akademik	yang disusun								
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Nota Kesepakatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah laporan pembahasan laporan semester yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Nota Kesepakatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan kunjungan kerja/kunjungan lapangan urusan pemerintahan yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan kunjungan kerja /kunjungan lapangan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum yang disusun	36 Laporan	22 Laporan	14 Laporan	7 Laporan	50 %	15 Laporan	15 Laporan	100 %
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan kunjungan kerja /kunjungan lapangan urusan pemerintahan bidang infrastruktur yang disusun	36 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	28 Laporan	90,3 %	15 Laporan	15 Laporan	100 %

	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan kunjungan kerja /kunjungan lapangan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yang disusun	36 Laporan	30 Laporan	31 Laporan	29 Laporan	93,5 %	15 Laporan	15 Laporan	100 %
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan kunjungan kerja /kunjungan lapangan urusan pemerintahan bidang perekonomian yang disusun	36 Laporan	23 Laporan	30 Laporan	24 Laporan	80 %	15 Laporan	15 Laporan	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase dokumen terkait peningkatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Kapasitas DPRD yang disusun								
	Sub Kegiatan Bintek DPRD/ Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan bintek DPRD yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorinya	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100 %	8 orang	8 orang	100 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan kehumasan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	85,7 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Penyerapan dan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun								
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan Reses yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Dokumen laporan Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		DPRD yang difasilitasi								
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	7 Dokumen	7 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah jadwal kegiatan DPRD yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan memfasilitasi undangan-undangan DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 (tiga) Indikator. Dari 3 (tiga) indikator tersebut, 3 (tiga) berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD selama tahun 2022.
2. Adanya kerjasama antar Kabag, Kasubag dan Pelaksana dalam berkoordinasi dan penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada jadwal dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah.
3. Adanya koordinasi dan Komunikasi antara Sekretaris dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan semua kegiatannya.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD selama tahun 2022.
2. Lebih mengoptimalkan evaluasi internal dan pengukuran kinerja agar capaian kinerja dapat terukur secara berkala dan mendukung optimalnya pencapaian kinerja organisasi.
3. Adanya kerjasama antar Kabag, Kasubag dan Pelaksana dalam berkoordinasi dan penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan.
4. Berpedoman pada jadwal dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah.
5. Adanya koordinasi dan Komunikasi antara Sekretaris dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan semua kegiatannya.
6. Melakukan inovasi dan melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka memfasilitasi kegiatan-

kegiatan maupun memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	-	-	78	79	80	81	77,811	79,5	78	79	
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	83	84	85	86	79,55	79,867	80	81	
3.	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	-	-	72 (BB)	73 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	65,31 (B)	66,25 (B)	71,65	72	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
2. Kekurangan SDM karena ASN yang purna tugas dan promosi jabatan tetapi tidak diganti dengan personel yang baru menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih padat.
3. Adanya power politik dalam memfasilitasi DPRD yang menyebabkan tekanan yang tinggi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program Sekretariat DPRD.
4. Jadwal kegiatan yang padat sehingga mempengaruhi tingkat capaian kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Terdapatnya pemahaman yang berbeda terhadap interpretasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan membutuhkan koordinasi yang optimal antara Sekretariat DPRD dan DPRD.

2. Kompetensi SDM yang ada di Sekretariat DPRD belum dapat mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD (Sebagian besar hanya pada fungsi administrasi).
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
5. Belum tersedianya standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dalam rangka mempercepat fasilitasi tugas DPRD, perlu adanya inovasi misalnya jadwal kegiatan DPRD yang terdigitalisasi, survey kepuasan DPRD yang terdigitalisasi, inovasi layanan dan informasi DPRD.
2. Dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat, perlu juga inovasi dalam menyerap aspirasi masyarakat secara cepat dan akurat dan transparan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dalam memfasilitasi semua tugas dan fungsi DPRD.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Inovasi digitalisasi dalam fasilitasi tugas Sekretariat DPRD;
4. Digitalisasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;
3. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					
1	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	9.500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	9.500	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 dokumen	8.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	4 dokumen	8.500	

	Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	4.403.491	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	3.673.910	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	119.020	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	123.600	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti	25 orang	205.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti	10 orang	100.000	

	Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan					Pendidikan dan Pelatihan			
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	30.000	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	30.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18 paket	350.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18 paket	352.000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 unit	165.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 unit	165.000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					

	Pemerintahan Daerah					Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	175.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	169.200	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	365.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	380.218	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 unit	81.380	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 unit	81.380	

	Dinas Jabatan										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	337.380	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	337.380	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	93.114	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	101.087	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	99.996	
8	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	28.762.370	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	28.509.345	

	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	537.811	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	553.918	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	47.196	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	44.431	
9	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 dokumen	2.128.357	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 dokumen	1.252.715	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	3 dokumen	605.664	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	1 dokumen	215.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	5 dokumen	932.001	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	2 dokumen	219.000	

10	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran					Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran					
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	667.428	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	351.249	
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	689.317	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	348.429	
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	667.337	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	350.382	
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	690.954	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	350.382	
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	7.126	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	8.126	
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungja	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 dokumen	999.634	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawab	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 dokumen	213.000	

	waban APBD		Pertanggungjawaban APBD			an APBD		Pertanggungjawaban APBD			
11	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	79.850	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Laporan	86.500	
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	90.690	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Laporan	83.535	
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	90.270	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Laporan	89.260	
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	97.290	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	15 Laporan	377.907	

	Bidang Perekonomian		Pemerintahan Bidang Perekonomian			Bidang Perekonomian		Pemerintahan Bidang Perekonomian			
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	301.529	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	377.170	
12	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD					Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD					
	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	449.406	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Orientasi DPRD	1 dokumen	444.806	
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 dokumen	2.611.443	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 dokumen	744.647	
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 Dokumen	286.264	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 Dokumen	272.014	

	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 orang	34.800	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 orang	34.800	
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	240.200	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	240.200	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7 Dokumen	522.794	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	300.773	
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	449.693	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	423.823	
13	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	672.611	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	329.414	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 dokumen	884.424	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 dokumen	984.390	

14	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					
	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	646.764	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	605.286	
15	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD					Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	3.217.597	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	2.720.892	
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	152.184	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Dokumen	189.022	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	902.533	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	643.968	

	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	384.050	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	351.277	
					55.292.000					47.052.648	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
2. Program kerja DPRD belum bisa terakomodir dalam RKPD awal Tahun 2024.

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.2. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tidak ada Usulan program dan kegiatan hasil penelaahan usulan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Sekretariat DPRD mendukung prioritas tersebut yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, mendukung terselenggaranya peningkatan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan sebuah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai visi tertentu,

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan yang ada, dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang lebih terukur.

Adapun tujuan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

“ MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DALAM RANGKA MEMFASILITASI KEGIATAN-KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA ”

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD.
3. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.

2.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2024 merupakan upaya-upaya dalam tema arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang ingin diwujudkan pada 2024 yaitu ***“Pemantapan kondusivitas wilayah untuk mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pertanian”***.

Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2024 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ada 2 program, 15 Kegiatan dan 47 sub kegiatan, sebagai berikut :

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Capaian kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penang gung Jawab
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah)	Lokasi	Sumber Dana	Target Kinerja	Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah)	
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
4.02	Sekretariat DPRD									
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota									
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	16 dokumen	9.500	Kab. Banjarnegara	DAU	16 dokumen	10.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 Laporan	8.500	Kab. Banjarnegara	DAU	4 Laporan	9.000	Sekretariat DPRD

4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	35 orang/ bulan	4.403.491	Kab. Banjarnegara	DAU	35 orang/ bulan	5.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	119.020	Kab. Banjarnegara	DAU	12 dokumen	125.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 orang	25 orang	205.000	Kab. Banjarnegara	DAU	25 orang	220.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	30.000	Kab. Banjarnegara	DAU	1 paket	32.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 paket	18 paket	350.000	Kab. Banjarnegara	DAU	18 paket	365.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 dokumen	25.000	Kab. Banjarnegara	-	-	-	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	30 unit	165.000	Kab. Banjarnegara	DAU	30 unit	250.000	Sekretariat DPRD

4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	1 unit	100.000	Kab. Banjarnegara	-	-	-	-
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 dokumen	175.000.00	Kab. Banjarnegara	DAU	12 dokumen	185.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 dokumen	365.000	Kab. Banjarnegara	DAU	12 dokumen	380.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 unit	2 unit	81.380	Kab. Banjarnegara	DAU	2 unit	85.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	22 unit	337.380	Kab. Banjarnegara	DAU	22 unit	350.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	50 unit	93.114	Kab. Banjarnegara	DAU	50 unit	95.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100.000	Kab. Banjarnegara	DAU	1 unit	200.000	Sekretariat DPRD

4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	50 orang	28.763.370	Kab. Banjarnegara	DAU	50 orang	29.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	1 paket	537.811	Kab. Banjarnegara	DAU	1 paket	550.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	50 orang	47.196	Kab. Banjarnegara	DAU	50 orang	50.000	Sekretariat DPRD
04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD									
04.02.02.2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD									
04.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 dokumen	10 dokumen	2.128.357	Kab. Banjarnegara	DAU	10 dokumen	2.200.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	3 dokumen	3 dokumen	605.664.000	Kab. Banjarnegara	DAU	3 dokumen	630.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.01.04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	5 dokumen	5 dokumen	932.001	Kab. Banjarnegara	DAU	5 dokumen	1.000.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran									
04.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	667.428	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	700.000	Sekretariat DPRD

04.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	689.317	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	700.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	667.337	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	700.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	1 dokumen	690.954	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	720.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	1 dokumen	7.126	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	7.500	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	999.634	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	1.100.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan									
04.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 dokumen	20 Laporan	79.850	Kab. Banjarnegara	DAU	20 Laporan	85.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	20 Laporan	90.690	Kab. Banjarnegara	DAU	20 Laporan	95.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	20 Laporan	90.270	Kab. Banjarnegara	DAU	20 Laporan	90.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	20 Laporan	20 Laporan	97.290	Kab. Banjarnegara	DAU	20 Laporan	105.000	Sekretariat DPRD

		Perekonomian								
04.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 rekomendasi	1 rekomendasi	301.529	Kab. Banjarnegara	DAU	1 rekomendasi	320.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD									
02.2.04.02	Orientasi DPRD	Jumlah Dokument Hasil Penyelegaraan Orientasi DPRD	-	-	-	Kab. Banjarnegara	1 Dokumen	1 Dokumen	449.406	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 dokumen	5 dokumen	2.611.443	Kab. Banjarnegara	5 dokumen	5 dokumen	2.750.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 dokumen	5 dokumen	286.264	Kab. Banjarnegara	DAU	5 dokumen	300.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	1 orang	34.800.	Kab. Banjarnegara	DAU	1 orang	70.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8 orang	240.200	Kab. Banjarnegara	DAU	8 orang	250.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7 dokumen	7 dokumen	522.794	Kab. Banjarnegara	DAU	7 dokumen	550.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	449.693	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	465.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									
04.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	672.611	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	685.000	Sekretariat DPRD

04.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Laporan	2 dokumen	884.424	Kab. Banjarnegara	DAU	2 dokumen	1.200.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									
04.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2 Laporan	646.784	Kab. Banjarnegara	DAU	2 Laporan	665.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD									
04.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	4 dokumen	3.217.597	Kab. Banjarnegara	DAU	4 dokumen	3.500.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	152.184	Kab. Banjarnegara	DAU	1 Laporan	160.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	12 dokumen	902.533	Kab. Banjarnegara	DAU	12 dokumen	920.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	4 dokumen	384.050	Kab. Banjarnegara	DAU	4 dokumen	400.000	Sekretariat DPRD
	Jumlah				55.292.000				57.278.500	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluar program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjut :nya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing program/ kegiatan di Segagai berikut :

1. Program Penunjukan Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD.

Program penunjukan urusan pemerintahan daerah Sekretariat terdiri 2 Program, 8 Kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Dengan 18 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan logistik

kantor, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

2. Program Dukung Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD.

Program dukung pelaksana tugas dan fungsi DPRD terdiri dari 8 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik, Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah, Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program Kerja DPRD, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Pelaksanaan Reses,

Pengawasan Kode Etik DPRD, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.

BAB V PENUTUP

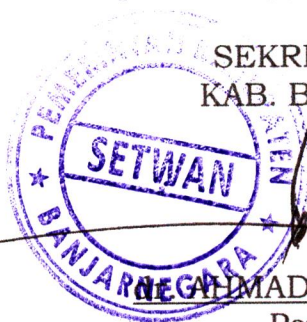
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DPRD
KAB. BANJARNEGARA



ILHAM SETIAWAN, M.PH.

Pembina Tk I

NIP. 197209182005011008



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA INSPEKTORAT
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2023**

**Jl. Dipayuda No. 10, Kutabanjarnegara, Banjarnegara 53415
Telp. (0286) 591459, 591084 Fax. 591459**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan oleh Inspektur.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 merupakan salah satu kewajiban Inspektorat dalam merencanakan sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Rencana Kerja Inspektorat digunakan sebagai pedoman dan pengendali dalam pelaksanaan program-program kerja yang akan dijalankan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dan semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20 Juni 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. AGUNG YUSianto, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30
BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	32
3.1. Telaahan Terhadap Arah Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan	34
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	43
BAB V Penutup	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni

sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 kedalam rencana program kegiatan prioritas tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Kerja K/L Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Urusan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yaitu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 3 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp5.989.039.505,00 dengan fokus utama pada capaian Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPK RI serta Peningkatan Kapabilitas APIP. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pengawasan daerah yang meliputi:

1. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang masih belum terintegrasi dan belum menjadi bagian dalam pelaksanaan tata kelola organisasi perangkat daerah;
2. Cakupan pengawasan yang luas dengan berbagai penugasan mandatori yang memerlukan langkah audit yang tepat dan cepat;
3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
4. Terbatasnya jumlah SDM pemeriksa dan kurangnya kompetensi SDM pemeriksa;

Pada Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi pengurangan pagu. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.897.220.956,00. Pada Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022, rincian belanja pada sub kegiatan yang berkurang berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pengawasan Desa, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah serta Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target.

Sesuai dengan perhitungan target dan realisasi atas program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2022 yang direncanakan seluruhnya telah terpenuhi. Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan Asistensi, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai yang merupakan kegiatan utama pengawasan dan pendukung kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung terlaksananya kepatuhan obyek pengawasan dalam memenuhi tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Optimalisasi sumber daya manusia APIP dan sarana prasarana pendukung pada kegiatan pengawasan;
4. Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator Inspektorat Kabupaten Banjarnegara diperlukan strategi dan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Penyelenggaraan pengawasan intern dalam bentuk *assurance* dan *consulting* yang diselenggarakan secara efektif dan memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan;

2. Mengintensifkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk pendampingan/ fasilitasi/ asistensi;
3. Pemantapan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas APIP yaitu Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
4. Menyusun dan menyempurnakan kebijakan, pedoman dan prosedur yang disesuaikan dengan standar audit AAIP;
5. Menyusun rencana pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan;
6. Mengoptimalkan Peran APIP dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengawasan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	79,30	98	65	74,19	100%			
06.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan	100%	5 Laporan						
06.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Aksi, Renstra, RKT, KAK, DPA, RKA, IKK, Renja yang tersusun	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
06.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP, SPIP, POK, LKPI, Pengukuran Kinerja, IKK yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%			
06.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan	100%	47 Orang						
06.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	43 Orang	39 Orang	40 Orang	39 Orang	97,5%			
06.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD yang terbayarkan	30 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	100%			
06.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pelaporan keuangan semesteran, neraca manual akuntansi, LPO,LPE, Dokumen Gaji, Laporan Akhir,	4 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Dokumen SPj/GU/LS yg tersusun								
06.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5 Kali						
06.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur pengawasan yg mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan teknis	25 Diklat		10 Diklat	10 Diklat	100%			
06.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	7 Paket						
06.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia dan terfasilitasinya perjalanan dinas	8 Paket	7 Paket	9 Paket	9 Paket	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
06.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	3 Paket 7 Orang THL						
06.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang terbayarkan	12 Paket	7 Paket	12 Paket	12 Paket	100%			
06.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan umum yang terbayarkan (THL)	12 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	100%			
06.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	7 Unit 10 Paket						
06.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak STNK kendaraan dinas jabatan yang terbayarkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
06.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak STNK kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%			
06.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya selama 1 tahun yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%			
06.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	8 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%			
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
06.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	102 Laporan	84 Laporan						
06.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
06.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9 Laporan	37 Laporan	6 Laporan	37 Laporan	100%			
06.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	100%			
06.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%			
06.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	30 Laporan	56 Laporan	54 Laporan	56 Laporan	103%			
06.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT	18 Laporan	16 Laporan						
06.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	6 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	66,6%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
06.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	28 laporan	6 Laporan	28 Laporan	100%			
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
06.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	3 Dokumen	3 Dokumen						
06.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
06.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	44 OPD	11 Laporan						
06.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (ILHPS)	44 OPD	2 Laporan	2	2	100%			
06.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 OPD	3 Laporan	1	3	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
06.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%			
06.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 OPD	2 Laporan	2	2	100%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

Dalam pelaksanaan pelayanan, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mengampu 5 Indikator. Dari 5 indikator tersebut, semuanya berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ ketidaktercapaian tersebut antara lain :

1. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan audit intern dalam rangka memberikan jaminan (quality assurance) atas tata kelola pemerintahan daerah;
2. Fasilitasi dan pendampingan peningkatan maturitas SPIP;
3. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan menerapkan pemeriksaan sesuai pelaksanaan penugasan berdasarkan standar dan kode etik audit serta implementasi kendali mutu pelaksanaan audit;
4. Penyusunan pedoman pengawasan yang digunakan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat;
5. Membangun layanan konsultansi dalam bentuk asistensi pendampingan guna memberikan *insight* berupa pengetahuan dan keyakinan dalam pelaksanaan tata kelola perangkat daerah.

Dalam rangka mendorong faktor-faktor keberhasilan tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan intern secara berkala dengan menggunakan metode dan pendekatan sesuai dengan jenis pengawasannya sehingga diperoleh simpulan dan rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi obyek pengawasan;
2. Mengintensifkan penyelesaian tindak lanjut melalui rapat koordinasi pengawasan dan pendampingan baik melalui tatap muka maupun secara online dan mendorong auditan untuk proaktif dalam penyelesaian tindak lanjut;
3. Pendampingan kepada perangkat daerah dalam meningkatkan pengendalian intern melalui evaluasi atas dokumen rencana tindak pengendalian SPIP;
4. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan SDM APIP;
5. Penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

6. Melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pelayanan konsultasi dan pengaduan serta menyempurnakan standar operasional prosedur.

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan :	-	IKK						-
	Inskab			90%	90,5%	92,63%	90%	90,5%	
	Insprov			95%	96%	100%	95%	96%	
	BPK RI			94%	94%	96,22%	94%	94%	
2	Level kapabilitas APIP	-	IKK	2	3	2	3	3	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten Banjarnegara

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2024 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara diantaranya adalah:

1. Belum maksimalnya pemenuhan level Kapabilitas APIP terutama dalam pelaksanaan audit kinerja pada OPD yang mendukung capaian visi dan misi kepala daerah;
2. Jumlah penugasan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan jumlah aparatur pengawasan yang ada saat ini;
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara memadai oleh Kepala OPD, sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi constraint dalam pencapaian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Adanya keterlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan;
3. Terdapat perbedaan persepsi implementasi kebijakan antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, yaitu:

1. APIP yang saat ini dituntut harus mampu berperan sebagai *trusted advisory* yang merupakan implikasi pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi peran katalis yang harus dapat menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*);
2. Atas tuntutan tersebut maka diperlukan APIP yang memiliki kompetensi dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas selain tentunya didukung dengan peningkatan jumlah personil;
3. Tingkat maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP masih berada pada level 2;
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima;
5. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi;
6. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkendala dengan masih belum tersusun dan terlaksananya Manajemen Risiko Pemerintah Daerah secara memadai;
3. Belum optimalnya peran APIP yang disebabkan kurangnya kompetensi dan terbatasnya jumlah SDM APIP;
4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pengawasan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas

arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 meliputi:

1. Mendorong kepatuhan OPD terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;
2. Peningkatan penerapan SPIP;
3. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
4. Mengawal peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi;
5. Menyederhanakan prosedur layanan publik, dan meningkatkan pelayanan yang tertib dengan berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				8.756.030.569	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				11.050.000.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Nilai SAKIP OPD	79,25 Nilai	7.450.916.169	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Nilai SAKIP OPD	79,30 Nilai	8.485.041.500	
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	12.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	11.773.600	
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.784.860.569	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.805.873.600	
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	355.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	590.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	307.849.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	596.691.800	
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	373.956.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	942.579.800	
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	210.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	197.598.800	
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	407.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	340.483.900	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase hasil pengawasan sesuai dengan bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu	70%	793.188.400	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase hasil pengawasan sesuai dengan bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu	75%	1.276.883.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	99 laporan	657.888.400	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	102 laporan	934.618.000	
2)	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	16 laporan	135.300.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	18 laporan	342.265.000	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Level Kapabilitas APIP	Level 3	511.926.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Level Kapabilitas APIP	Level 3	1.288.075.500	
1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan	3 dokumen	29.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan	3 dokumen	50.015.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	44 OPD	482.926.000	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	44 OPD	1.238.059.900	
Jumlah Total					8.756.030.569					11.050.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

- 1. Perlunya perumusan dan penyusunan kebijakan pengawasan yang memadai guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik;
- 2. Perlunya optimalisasi sumber daya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengawasan intern yang efektif;
- 3. Perlunya optimalisasi dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengawasan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Musrenbang Kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Arah Kebijakan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 tersebut, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui Sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartaba, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mencapai sasaran pembangunan dan visi misi Presiden maka ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, Presiden telah memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 tersebut, yaitu:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.

Sesui dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi Presiden melalui misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” yang dijabarkan dengan agenda pembangunan ke-7 “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”.

Peran APIP yang dikawal oleh BPKP yang merupakan auditor internal adalah mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut indikator capaian yang akan dicapai pada Renstra BPKP tahun 2020-2024 yaitu dengan mengawal program prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola. Indikator yang akan dicapai adalah Indeks Penerapan Manajemen Risiko di kabupaten/kota pada level 3. Untuk itu peran Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mencapai indikator tersebut adalah melakukan kegiatan asistensi dan pendampingan dalam rangka mendukung prioritas Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, terarah dan berkesinambungan.

Untuk memaksimalkan peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka rumusan tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 diperlukan rumusan program dan kegiatan. Rumusan program dan kegiatan dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan :
 - 1.1.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 - 1.2.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :
 - 2.1.Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - 2.2.Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 3.1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 3.2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3.3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 3.4.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

3.5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		INSPEKTORAT						11.050.000.000,00							13.307.000.000,00		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						11.050.000.000,00							13.307.000.000,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						11.050.000.000,00							13.307.000.000,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	79,50 Nilai			79,30 Nilai 85 Nilai	8.485.041.500,00						79,35 Nilai	9.735.000.000,00		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %			100 %	11.773.600,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	100 %	14.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	6.000.000,00	- Kab Banjarmegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		7.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	5.773.600,00	- Kab Banjarmegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		7.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %			100 %	5.805.873.600,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	100 %	6.997.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	5.710.000.000,00	- Kab Banjarmegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		6.870.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	90.100.000,00	- Kab Banjarmegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		120.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	273.495.000,00	- Kab Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		199.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi	66,7 %			33,3 %	1.288.075.500,00						50 %	1.311.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	3 Kegiatan			3 Kegiatan	50.015.600,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	3 Kegiatan	34.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	50.015.600,00	- Kab Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		34.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	44 OPD			44 OPD	1.238.059.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	44 OPD	1.277.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				44 perangkat daerah	500.348.200,00	- Kab Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		365.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				44 perangkat daerah	372.029.100,00	- Kab Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		625.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan :
 - 1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pengawasan Desa;
 - f. Kerjasama Pengawasan internal;
 - g. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan tindak lanjut pemeriksaan APIP.
 - 1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
Sub Kegiatan :
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :
 - 2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
Sub Kegiatan :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - 2.2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
Sub Kegiatan :
 - a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah;
 - b. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;
 - c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - d. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 3.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 3.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;
 - 3.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 - 3.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan bahan logistik kantor.
 - 3.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan mebel;
 - c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
 - 3.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

3.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- c. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya;
- d. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Inspektorat selanjutnya menjadi platform operasional bagi Inspektorat dalam menjalankan programnya serta menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menjadi acuan bagi Inspektur Kabupaten Banjarnegara dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28 Juni 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. AGUNG YUSianto, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720811 199203 1 002



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga kita dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024. Penyusunan Renja ini mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan Visi Misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yaitu : Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat serta mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara mendukung dalam pencapaian meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas. Dengan tercukupinya pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas, diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, dan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia khususnya di Kabupaten Banjarnegara, melalui peningkatan capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Beberapa keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya asset serta kondisi geografis yang cukup variatif, tidak menjadikan hal tersebut sebagai kendala namun merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi serta dicarikan upaya pemecahannya agar target tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Saran, pendapat, kritik yang membangun diharapkan dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ini di waktu yang akan datang.

Kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program kerja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tidak hanya tergantung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga semata, tetapi berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu

kami harapkan dukungan dari stakeholder terkait, satuan pendidikan ataupun berbagai pihak agar target Rencana Kerja Tahun 2024 bisa tercapai sebagaimana yang ditetapkan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Banjarnegara, Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara,



TEGUH HANDOKO, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	43
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	72
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	79
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	89
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	90
3.3. Program dan Kegiatan	90
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni

sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan;

19. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, tanggal 18 Februari 2023 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
 32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
 33. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan

usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 6 program, 16 kegiatan, dan 56 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 768.172.847.500,-, dengan fokus utama pada peningkatan angka partisipasi anak sekolah baik jenjang PAUD, SD, SMP, dan non formal, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk mendorong meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah sebagai tolak ukur peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini mengampu 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah di 2 (dua) urusan tersebut, yang meliputi:

1. Potensi tingginya anak putus sekolah / anak tidak sekolah, terutama untuk jenjang SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMA/SMK, akibat keterbatasan ekonomi ataupun imbas pandemi covid-19 yang melanda dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
2. Masih tingginya anak tidak sekolah (ATS) yang tersebar di masing-masing kecamatan;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
4. Berkurangnya kualitas dan layanan pendidikan di lembaga pendidikan negeri, sehingga masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan swasta;
5. Sarana prasarana pendidikan, baik berupa fisik maupun non fisik yang belum terpenuhi secara menyeluruh, merata dan belum sesuai standar;

6. Kebutuhan antara jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang belum seimbang dengan jumlah siswa di masing-masing satuan pendidikan;
7. Rendahnya minat guru untuk menjadi Kepala Sekolah, terutama di jenjang Sekolah Dasar, dikarenakan tugas dan tanggung jawab yang semakin berat, tidak seimbang dengan tunjangan Kepala Sekolah yang diterimakan;
8. Belum meratanya kesempatan pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat Banjarnegara yang beragam berkontribusi dalam pencapaian angka partisipasi sekolah di Kabupaten Banjarnegara. Ada yang mudah mengakses pendidikan, sebaliknya ada pula yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan disebabkan berbagai kendala yang dihadapinya, terlebih-lebih dikaitkan dengan pemerataan mutu dan kualitasnya;
9. Masih banyak satuan pendidikan yang belum tercukupi pemenuhan sarana dan prasarana pembelajarannya, sehingga mengakibatkan proses kegiatan belajar mengajar belum dapat berjalan optimal;
10. Belum meratanya sebaran jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya;
11. Belum meratanya penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan;
12. Belum optimalnya peran pendidikan non formal di masyarakat;
13. Kualitas layanan dan akses pendidikan masih perlu ditingkatkan
14. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah menunjukkan belum optimalnya kualitas dan akses layanan pendidikan;
15. Belum optimalnya sarana prasarana dan pengembangan pembibitan atlet olahraga;
16. Lunturnya nilai-nilai sosial dan rasa nasionalisme pemuda;
17. Masih rendahnya partisipasi pemuda pelopor dan kewirausahaan yang menyebabkan minat masyarakat untuk berwirausaha rendah.

Dari 6 program, 16 kegiatan, dan 56 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 6 program, 16 kegiatan, dan 80 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 764.843.970.640,-.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau

pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 18 kegiatan, dan 87 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 720.791.108.002,-. Angka tersebut berkurang dari Renja Awal yaitu sebesar Rp. 44.052.862.638,-. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, total program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah (alokasi anggarannya bertambah) meliputi Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 6) Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- 7) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 6) Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- 7) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 8) Perlengkapan Belajar Peserta Didik
- 9) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 10) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 2) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan

- 1) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan

Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- 1) Standardisasi Organisasi Keolahragaan

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- 1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Selain sub kegiatan tersebut yang bertambah alokasi anggarannya, pada APBD Perubahan juga banyak yang kegiatan/sub kegiatan yang berkurang anggarannya sebagaimana berikut :

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 2) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

- 1) Prosentase guru tersertifikasi

Pada Tahun 2022, realisasi indikator persentase guru tersertifikasi tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar 95,00%, hanya terealisasi sebesar 86,85% dengan persentase capaian sebesar 91,42%. Atau dari guru tetap sejumlah 6.235 orang yang telah tersertifikasi sejumlah 5.415 orang. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 78,77%, capaian kinerja persentase guru tersertifikasi pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 8,07%.

Target tersebut belum sepenuhnya dapat dicapai, dikarenakan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta pre tes belum memenuhi ambang batas (Passing grade), sebagai prasyarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru.
 2. Adanya PPPK, CPNS / PNS formasi umum blm memiliki sertifikat pendidik sebagai prasyarat untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
 3. Banyaknya PNS guru yang pensiun di Tahun 2022.
- 2) Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD.

Pada Tahun 2022, SKM Dindikpora belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena hanya tercapai 78,46 dari target 80,00 dengan prosentase capaian 98,08%. Dibandingkan dengan realisasi SKM Tahun 2021, untuk Tahun 2022 mengalami penurunan dari capaian tahun 2021 sebesar 2,74. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan, sehingga nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut dapat meningkat.

Sebagai upaya untuk memenuhi pelayanan yang optimal kepada masyarakat, kita berupaya dengan melengkapi sarana prasarana yang kurang memadai, merawat dan memelihara yang sudah ada, serta tidak menutup kemungkinan menambah prasarana lain agar pelayanan dapat dioptimalkan. Adapun saran dan masukan masyarakat yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, terkait peningkatan pelayanan prima, antara lain :

- 1) Perluasan tempat parkir yang memadai dan adanya petugas parkir agar tertib;
 - 2) Penataan ruang layanan yang memadai, tidak menjadi tempat penumpukan berkas dokumen;
 - 3) Penambahan ruang tunggu / kursi tunggu tiap layanan, ramah disabilitas, penambahan area bermain anak dan pembuatan ruang laktasi;
 - 4) Penambahan penyebaran informasi lewat media sosial untuk peningkatan kelancaran komunikasi dan informasi secara online untuk kecepatan dan kemudahan bagi pengguna layanan;
 - 5) Memaksimalkan saluran penanganan pengaduan masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti;
 - 6) Peningkatan keramahan dan kompetensi petugas layanan;
 - 7) Ketertiban dan kedisiplinan petugas layanan terhadap waktu pelayanan;
 - 8) Penambahan personil pelayanan dan petugas resepsionis untuk pelayanan cepat dan lancar;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

- 1) Prosentase APS 5-6 Tahun

Tingkat pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun, jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022 sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 80,00% dapat terealisasi sebesar 93,25% dengan persentase capaian sebesar 116,57%. Atau dari penduduk usia 5-6 tahun sejumlah 32.831 orang, yang terlayani dalam proses

penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD sejumlah 30.616 orang.

Ketercapaian APS 5-6 tahun pada Tahun 2022 diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam layanan pendidikan Anak Usia Dini, dengan menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga layanan PAUD. Selain itu hal tersebut tercapai seiring dengan semakin meratanya akses pelayanan pendidikan dengan indikasi meningkatnya lembaga layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, terutama jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Walaupun target APS 5-6 tahun telah terlampaui, namun pemerintah tetap mengupayakan layanan pendidikan dapat terlaksana secara optimal terutama dalam hal perluasan akses dengan menjamin penduduk usia 5-6 tahun terlayani pada jenjang PAUD.

Untuk mendukung ketercapaian APS 5-6 tahun, kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2022 antara lain :

- 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan PAUD melalui sumber pendanaan, dapat melalui APBD maupun alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 2) Pemerataan layanan pendidikan PAUD di masing-masing kecamatan dan ketersediaan pendidik maupun tenaga kependidikan khususnya dalam pemberian layanan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3) Menggandeng pihak desa, kecamatan maupun stake holder terkait untuk mengedukasi warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pengoptimalan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 4) Bantuan Operasional PAUD (BOP PAUD) guna mendukung operasional pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga PAUD.
- 2) Persentase TK Terakreditasi

Pada Tahun 2022 capaian indikator persentase TK terakreditasi terealisasi sebesar 73,86% dari target yang ditetapkan sebesar 15,00% dengan persentase capaian sebesar 492,37%. Atau dari keseluruhan TK sejumlah 306 lembaga, yang telah terakreditasi sejumlah 226 lembaga. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi 72,22%, untuk capaian

indikator persentase TK terakreditasi mengalami peningkatan sebesar 1,63%.

Terpenuhinya target akreditasi TK pada Tahun 2022 didukung oleh komitmen yang tinggi dari Dindikpora melalui Bidang PAUD Dikmas dalam mengupayakan kesiapan lembaga dalam proses akreditasi, diantaranya adalah dengan pembinaan kepada lembaga TK secara terus-menerus yang bertujuan untuk 1). Memberikan pemahaman tentang kebijakan pemerintah dan implementasi model pembelajaran TK yang berkarakter; 2). Memberikan pemahaman tentang peranan penilik sebagai penjamin mutu dan evaluasi dampak terhadap pelaksanaan program TK; 3). Memberikan pemahaman tentang Gerakan TK Berkualitas; 4). Memberikan pemahaman tentang Gugus TK sebagai wahana peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan TK. Selain itu, peningkatan jumlah lembaga TK terakreditasi juga didukung regulasi dari pusat dimana Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penambahan kuota jumlah lembaga sasaran akreditasi lebih besar dari tahun sebelumnya.

Manfaat akreditasi itu sendiri secara umum merupakan bagian dari penjaminan dan usaha peningkatan mutu pendidikan. Secara langsung akreditasi TK menunjang peningkatan mutu program TK serta meningkatkan kinerja satuan TK.

3) Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun

Tingkat pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun, jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022 sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 88,55% terealisasi sebesar 95,63% dengan persentase capaian sebesar 108,05%. Atau dari penduduk usia 7-12 tahun sejumlah 102.873 orang, yang terlayani pendidikannya sejumlah 98.373 orang. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 90,84%, capaian kinerja APS 7-12 tahun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,79%.

Peningkatan tersebut diakibatkan oleh pemulihan akibat pandemi covid-19 yang secara bertahap sudah dilaksanakan, untuk layanan pendidikan terutama proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, sehingga animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya kembali meningkat. Serta proses vaksinasi di masing-masing seluruh elemen masyarakat dan

peserta didik sebagai hal yang turut serta mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah tersebut.

Walaupun target APS telah terlampaui, untuk meminimalisir adanya potensi anak sekolah yang terancam tidak melanjutkan sekolah / putus sekolah, pemerintah tetap mengupayakan layanan pendidikan dasar dapat terlaksana secara optimal dengan menjamin penduduk usia pendidikan dasar terlayani pada jenjang SD dan SMP. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Menjamin pelayanan pendidikan penduduk usia sekolah SD dan SMP dalam bentuk pemenuhan operasional siswa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- 2) Peningkatan aksesibilitas pendidikan di wilayah yang sulit dijangkau, mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara, yang cukup luas dan topografi yang berbeda-beda di masing-masing wilayah kecamatan.
- 3) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
- 4) Optimalisasi peran pendidikan non formal melalui layanan pendidikan kesetaraan.
- 5) Sosialisasi ke sekolah yang belum memiliki ijin operasional, agar mengajukan ijin operasional.
- 6) Peningkatan daya tampung siswa dan penataan guru yang merata di seluruh layanan pendidikan.
- 7) Sosialisasi wajar dikdas 9 tahun ke masyarakat melalui pemerintahan desa / kecamatan.
- 8) Koordinasi dengan kepala Sekolah Dasar untuk dapat menginventarisir peserta didik yang lulus Sekolah Dasar dan tidak dapat melanjutkan.
- 9) Pengoptimalan pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemberian Bantuan Siswa Miskin, terutama untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- 10) Proses Pendataan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lakukan sedini mungkin dengan mengidentifikasi lulusan SD/Madrasah.
- 11) Memberikan treatment atau pendampingan terhadap siswa yang keluar/drop out, untuk dapat meneruskan sekolahnya kembali.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan di Tahun 2022 sebagai upaya dalam mendukung ketercapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) antara lain adalah :

- 1) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) maupun perbaikan / rehabilitasi sarana prasarana yang sudah rusak untuk menjamin keterpenuhan daya tampung siswa dan pengoptimalan proses kegiatan belajar mengajar.
- 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menunjang operasional sekolah.
- 3) Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sebagai upaya untuk menjaga siswa rentan putus sekolah agar tetap bersekolah.
- 4) Prosentase Akreditasi Sekolah

Pada Tahun 2022 indikator persentase SD terakreditasi A terealisasi sebesar 42,30% dari target yang ditetapkan sebesar 18% dengan persentase capaian sebesar 235,01%. Atau dari keseluruhan SD sejumlah 617 satuan pendidikan, yang telah terakreditasi A sejumlah 261 satuan pendidikan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi 36,35%, indikator persentase SD terakreditasi A mengalami kenaikan sebesar 5,95%.

Sedangkan indikator persentase SMP terakreditasi A terealisasi sebesar 56,57% dari target yang ditetapkan sebesar 35,00% dengan persentase capaian sebesar 161,62%. Atau dari keseluruhan SMP sejumlah 99 lembaga, yang telah terakreditasi A sejumlah 56 lembaga. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 53,06%, indikator persentase SMP terakreditasi A mengalami peningkatan sebesar 3,50%.

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang yang dalam hal ini adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

Menentukan kelayakan program satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dengan demikian, sekolah yang telah terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Adapun terobosan yang dapat dilakukan ke depan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai akreditasi yang telah diperoleh antara lain :

- 1) Melakukan pemetaan sekolah berdasarkan nilai dari delapan Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 (delapan) standar, yaitu: (i) standar kompetensi lulusan; (ii) standar isi; (iii) standar proses; (iv) standar penilaian pendidikan; (v) standar tenaga kependidikan; (vi) standar sarana dan prasarana; (vii) standar pengelolaan; dan (viii) standar pembiayaan serta merencanakan pembiayaan yang dibutuhkan sebagai upaya ketercapaian delapan standar tersebut.
- 2) Pembinaan secara rutin terhadap kepala sekolah dan guru melalui pengawas sekolah berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- 3) Pengoptimalan seluruh elemen terkait yang terlibat dalam proses akreditasi di masing-masing satuan pendidikan.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan di Tahun 2022 sebagai upaya dalam mendukung ketercapaian akreditasi SD dan SMP antara lain adalah :

- 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
- 2) Peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
- 5) Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan non formal

Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan non formal merupakan ukuran daya serap penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah (usia 7-18 tahun) pada lembaga pendidikan non formal. Indikator ini digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan non formal khususnya bagi penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Semakin tinggi nilainya, semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tingkat pencapaian Prosentase Anak Tidak Sekolah yang terfasilitasi di pendidikan non formal, jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022 sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 18,00% dapat terealisasi sebesar 85,81% dengan persentase capaian sebesar 476,70%. Atau dari ATS sejumlah 5.009 orang, yang terlayani di pendidikan non formal sejumlah 4.298 orang.

Walaupun realisasi capaian kinerja Tahun 2022 sudah melampaui target yang ditetapkan, tetapi angka tersebut masih cukup tinggi, hal ini diakibatkan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada penyesuaian proses pembelajaran secara daring/online, sehingga peserta didik dan orang tua wali murid cenderung apatis dalam mengikuti proses pembelajaran, berdampak pada potensi penambahan angka putus sekolah bagi anak usia sekolah.

Selain hal tersebut, beberapa kendala dalam penyelenggaraan pendidikan non formal antara lain adalah :

- 1) Kurangnya kesadaran dari warga masyarakat yang melekat pendidikan terhadap keberadaan pendidikan non formal dan kondisi masyarakat sekitar.
- 2) Kurangnya sosialisasi dan publikasi, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan non formal di tengah-tengah mereka. Banyak masyarakat yang belum paham tentang apa itu PLS (Pendidikan Luar Sekolah), apa itu PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
- 3) Belum meratanya akses pendidikan non formal pada setiap kecamatan dan desa.
- 4) Lokasi ATS yang tersebar di masing-masing wilayah desa dan kecamatan dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga tidak memungkinkan untuk ditangani secara keseluruhan oleh lembaga pendidikan non formal.
- 6) Prosentase PKBM Terakreditasi

Tingkat pencapaian % PKBM Terakreditasi, jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022 sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 55,00% terealisasi sebesar 100,00% dengan persentase capaian sebesar

181,82%. Atau dari PKBM sejumlah 21 lembaga, yang telah terakreditasi sejumlah 21 lembaga.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan di Tahun 2022 sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan pendidikan non formal antara lain adalah :

- 1) Penyelenggaraan Program kesetaraan (paket A, B dan C) dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
 - 2) Program keaksaraan sebagai komitmen pemerintah terhadap pemberantasan buta aksara.
 - 3) Fasilitasi terhadap lembaga non formal (PKBM, TBM, LKP) guna meningkatkan layanan pendidikan non formal.
- 7) % Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi

Pada Tahun 2022, indikator % Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi terealisasi sebesar 97,78%, dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%. Dari 45 cabang kejuaraan yang diikuti, perolehan medali sebanyak 44.

Hal tersebut dapat tercapai berkat partisipasi dari masing-masing peserta lomba, sehingga dapat mengikuti kejuaraan di level provinsi.

Terobosan yang telah dilakukan dalam meningkatkan prestasi pelajar di Kabupaten Banjarnegara antara lain melalui seleksi cabang perlombaan POPDA, KSN, FL2SN, GSI, KOSN, maupun event prestasi lainnya. Langkah-langkah yang akan dilakukan guna meningkatkan prestasi pelajar di Kabupaten Banjarnegara antara lain :

- 1) Penyelenggaraan lomba atau kompetisi olahraga secara rutin tiap tahunnya sebagai media untuk proses penjaringan pelajar berprestasi.
- 2) Peningkatan kualitas pelatih atau tutor secara teknis maupun manajerial.
- 3) Pemberian penghargaan terhadap pelajar, atlet, pelatih dan tutor berprestasi.

Adapun kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung keberhasilan pada indikator tersebut antara lain :

- 1) Penyelenggaraan kompetisi kejuaraan pelajar dengan berbagai cabang lomba.
- 2) Peningkatan kompetensi tutor dan pelatih.
- 3) Penghargaan untuk atlet, pelajar, tutor dan pelatih berprestasi.

- 8) % pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya

Pada Tahun 2022, indikator % pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya terealisasi sebesar 100%, melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 40%. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pada indikator sasaran tujuh yaitu dengan mengadakan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda yang diikuti oleh 355 orang. Selain itu dilaksanakan pula Pelatihan Kader Pengembangan, Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda yang diikuti oleh 15 orang peserta di masing-masing wilayah se Kabupaten Banjarnegara dengan rincian terbagi untuk pelatihan di Kelompok Bidang Start Up Digital Marketing, Kelompok Bidang Salon Kecantikan, Kelompok Bidang Kuliner Pengolahan Ikan.

Adapun inovasi yang telah dilakukan yaitu pada bidang pengembangan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata, bidang pendidikan, bidang agama sosial budaya, bidang pangan dan teknologi.

Terobosan yang telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemuda Kabupaten Banjarnegara dalam program kepeloporan antara lain :

- 1) Mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan.
- 2) Penanaman jiwa nasionalisme pemuda sejak dini pada lingkup sekolah sebagai upaya meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara guna meningkatkan potensi yang ada pada dirinya sehingga menumbuhkan inovasi yang bisa membangun bangsa.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka *(jelaskan implikasi dari poin di atas)*. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait melalui berbagai media dengan melibatkan mitra kerja tokoh masyarakat/tokoh agama, untuk meningkatkan peran

serta masyarakat dalam peningkatan Angka Partisipasi Sekolah di seluruh jenjang;

2. Berusaha untuk terus melakukan inovasi dengan berupaya dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan;
3. Meningkatkan kinerja parameter-parameter yang telah memiliki indeks kepuasan tinggi, namun masih di bawah rata-rata indeks.
4. Memperbaiki kinerja parameter-parameter yang belum memiliki indeks kepuasan tinggi.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2....
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	73%		73%	102,46%	140,36%		102,46%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD 4-6 tahun	73%		73%	102,46%	140,36%		102,46%	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	17 lembaga	17 lembaga	17 lembaga	17 lembaga	100,00%	17 lembaga	51 lembaga	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 lembaga	19 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100,00%	8 lembaga	35 lembaga	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 lembaga	3 lembaga	7 lembaga	17 lembaga	100,00%	7 lembaga	27 lembaga	
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	3 paket	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Raport Peserta Didik PAUD yang tersedia	13.320 raport	4.000 raport	13.320 raport	6.660 raport	50,00%	13.320 raport	23.980 raport	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 lembaga	5 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	100,00%	10 lembaga	25 lembaga	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	13.320 peserta didik	13.320 peserta didik	13.320 peserta didik	13.320 peserta didik	100,00%	13.320 peserta didik	39.960 peserta didik	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1186 guru PAUD	125 orang	1186 guru PAUD	1.222 guru PAUD	103,04%	1186 guru PAUD	51 lembaga	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	724 Lembaga PAUD	712 lembaga	724 Lembaga PAUD	724 Lembaga PAUD	100,00%	724 Lembaga PAUD	51 lembaga	
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	100%		100%	92,61%	100,00%	100%		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/Paket A	100%		100%	92,61%	100,00%	100%		
		% SD yang memiliki perpustakaan	71%		71%	86,75%	100,00%	71%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	0,10%		0,10%	0,40%	100,00%	0,10%		
		Rata-rata Nilai Ujian SD	7,45		7,45	NA	100,00%	7,45		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 sekolah	4 sekolah	21 sekolah	2 sekolah	100,00%	18 sekolah	24 sekolah	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37 sekolah	18 sekolah	37 sekolah	38 sekolah	100,00%	37 sekolah	93 sekolah	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	122 sekolah	155 ruang	122 sekolah	71 sekolah	100,00%	32 sekolah	258 sekolah	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	38 sekolah	38 sekolah	38 sekolah	9 sekolah	100,00%	8 sekolah	55 sekolah	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi Sedang/berat	6 sekolah	1 sekolah	6 sekolah	6 sekolah	100,00%	6 sekolah	13 sekolah	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 paket	65 sekolah	10 paket	9 paket	90,00%	12 paket	86 paket	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima BSM	1.000 siswa	1.000 siswa	1.000 siswa	1.000 siswa	100,00%	300 siswa	2.300 siswa	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan TIK	31 paket	7 paket	31 paket	31 paket	100,00%	20 paket	58 paket	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	617 sekolah	99,68%	617 sekolah	1.853 sekolah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan	150 orang	370 orang	150 orang	160 orang	106,67%	416 orang	946 orang	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	6 cabang lomba	120,00%	1.239 siswa / 5 cabang lomba	16 cabang lomba	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	100,00%	617 sekolah	1.855 sekolah	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang dievaluasi	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	619 sekolah	100,00%	617 sekolah	1.855 sekolah	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/Paket B	94,50%		94,50%	87,03%	92,10%	87,03%	87,03%	
		% SMP yang memiliki perpustakaan	92,00%		92,00%	83,67%	90,95%	83,67%	83,67%	
		% ruang kelas SMP kondisi baik	90,00%		90,00%	94,73%	105,26%	94,73%	94,73%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0,25%		0,25%	0,25%	100,00%	0,25%	0,25%	
		Rata-rata nilai ujian SMP	7,00		7,00	NA	NA	NA	NA	
		Angka melanjutkan SD ke SMP	92,50%		92,50%	85,50%	92,43%	85,50%	85,50%	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	7 sekolah	4 sekolah	7 sekolah	5 sekolah	71,43%	1 Sekolah	10 Sekolah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 sekolah	5 sekolah	3 sekolah	2 sekolah	66,67%	1 sekolah	8 Sekolah	
	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah penerima bantuan	20 sekolah	18 sekolah	20 sekolah	19 sekolah	95,00%	4 unit	41 sekolah	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	25 unit	7 unit	25 unit	25 unit	100,00%	6 ruang	38 unit	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48 sekolah	37 sekolah	48 sekolah	48 sekolah	100,00%	6 ruang	91 ruang	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 sekolah	4 sekolah	19 sekolah	19 sekolah	100,00%	1 ruang	24 ruang	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 sekolah	3 sekolah	21 sekolah	21 sekolah	100,00%	1 ruang	25 ruang	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24 sekolah	11 sekolah	24 sekolah	24 sekolah	100,00%	2 sekolah	37 sekolah	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang melaksanakan kegiatan PPDB	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	100,00%	98 sekolah	294 sekolah	
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah sampul raport K-13	4.400 orang	4.400 orang	4.400 orang	4.400 orang	100,00%		13.200 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima bantuan	18 sekolah	12 sekolah	18 sekolah	14 sekolah	77,78%	5 sekolah	33 sekolah	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	100,00%	98 sekolah	294 sekolah	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menerima Akreditasi A	45 sekolah	45 sekolah	45 sekolah	29 sekolah	100,00%	45 sekolah	119 sekolah	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	5 cabang lomba	100,00%	5 cabang lomba / 3.027 peserta didik	15 cabang lomba	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	100,00%	98 sekolah	294 sekolah	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	100,00%	98 sekolah	294 sekolah	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dievaluasi	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	98 sekolah	100,00%	98 sekolah	294 sekolah	
	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal	92,50%	92,50%	92,50%	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Kependidikanbagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetraaan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal	92,50%	92,50%	92,50%	100%				
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	4 dokumen	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	8 dokumen	66,67%	-	20 dokumen	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	80 orang	80 orang	80 orang	82 orang	102,50%	-	162 orang	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru Tersertifikasi	95%		95%	86,85%				
		% Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG)	96%		96%	100%				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Guru Tersertifikasi	95%		95%	86,85%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah aplikasi untuk penyusunan dokumen PAK Guru dan SPTKG	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	100%	2 aplikasi	6 aplikasi	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah peserta Bintek	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	100%	PKG PKB : 60 orang, FGD PAK : 24 orang	180 orang	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 orang	65 orang	65 orang	65 orang	100%	65 orang	195 orang	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.327 orang	4.327 orang	4.327 orang	4.327 orang	100%	4.327 orang	12.981 orang	
	% Guru Lulus Pengembangan Profesi Guru (PPG)	96%	100%							
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima Dana Kesra Wiyata Bhakti Kategori 2	960 Orang	960 Orang	960 Orang	Tw 1:951 Tw 2:952 Tw 3:534 Tw4 :532	100%	960 Orang	2.800 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	Jumlah penerima dana Kesra Wiyata Bhakti Non Kategori	2.043 Orang	2.043 Orang	2.043 Orang	TW 1 : 1995; TW 2 : 1994; TW 3 : 1614; TW 4 : 1608	100%	2.043 Orang		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) jenjang Sekolah Dasar dan Peningkatan Kapasitas	18 Orang dan 90 Orang	18 Orang dan 90 Orang	18 Orang dan 90 Orang	PPG PAI 3 orang; Peningkatan Kapasitas 90 orang	100%	TPG : 2.342 orang, PPG : 27 orang, Bintek : 90 orang		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta PPG (Penilaian Profesi Guru) dan Peningkatan Kapasitas	5 Orang dan 40 Orang	5 Orang dan 40 Orang	5 Orang dan 40 Orang	PPG PAI 0 orang; Peningkatan Kapasitas 40 orang	100%	TPG : 1.060 orang, PPG : 6 orang, Bintek : 40 Orang		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf > 15 Tahun	99%		99%	NA	NA			
		Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100%		100%	98%	98%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penyelenggara proses belajar nonformal/kesetaraan	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	19 PKBM, 8 LKP dan 1 SKB	100%	19 PKBM dan 1 SKB	60 lembaga	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 PKBM dan 1 SKB	19 PKBM dan 1 SKB	19 PKBM dan 1 SKB	19 PKBM dan 1 SKB	100%	19 PKBM dan 1 SKB	60 lembaga	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	35 orang	105 Orang	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	35 orang	105 Orang	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olah raga yang dilombakan dalam kejuaraan	12 cabang olahraga	12 cabang olahraga	12 cabang olahraga	12 cabang olahraga	100%	12 cabang olahraga	36 cabang olahraga	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	35 Orang	22 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	35 Orang	92 orang	
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah lembaga penerima hibah dan guru olahraga yang mendapatkan pelatihan pelatih	2 lembaga dan 50 orang	2 Lembaga	2 lembaga dan 50 orang	2 lembaga dan 50 orang	100%	2 lembaga dan 50 orang	2 lembaga dan 50 orang	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor	6 orang	6 orang	6 orang	10 orang	167%	10 orang	26 orang	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah lembaga penerima hibah Kepramukaan	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	3 lembaga	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	3 lembaga	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor	6 orang	6 orang	6 orang	10 orang	167%	10 orang	26 orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	8 Orang	40 Orang	8 Orang	8 orang	100%	8 orang	56 orang	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	25 Orang	26 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	76 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Intr	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	35 orang	105 orang	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah kepemudaan	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	3 lembaga	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	80,00	80,00	78,46%	98%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	80,00	80,00	80,00	78,46%	98%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dan Jumlah pegawai penerima tambahan penghasilan	4.408 Orang dan 3.000 Orang	5.000 Orang	4.408 Orang dan 3.000 Orang	4.408 orang dan 3.000 orang	100%	4.408 orang dan 3.000 orang	15.000 orang	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	4 layanan	12 layanan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	150 orang	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	101 kendaraan	101 kendaraan	101 kendaraan	101 kendaraan	100%	101 kendaraan	303 kendaraan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Layanan Sesuai Standar Operasional Prosedur	100%		100%	100%		100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	24 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 13 Indikator. Dari 13 indikator tersebut, 11 berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Akses pelayanan pendidikan yang semakin merata, tersebar di masing-masing wilayah dengan indikasi meningkatnya lembaga layanan pendidikan / satuan pendidikan baik formal ataupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah / lembaga swasta;
2. Upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana baik secara fisik maupun non fisik di masing-masing satuan pendidikan.
3. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
4. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan, sehingga mengakibatkan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan optimal.
2. Masih tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Banjarnegara yang tersebar di masing-masing wilayah kecamatan. Sehingga perlu sinergitas antara pemangku kepentingan, perlu aksi nyata bagaimana mencari formulasi / strategi penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebut.
3. Kurangnya sarana prasarana yang memadai di masing-masing satuan pendidikan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan pelaksanaan ANBK belum berjalan optimal.
4. Masih ada sekolah yang belum mendapatkan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikarenakan tidak sinkron data di DAPODIK menjelang waktu penetapan Cut Off BOS.
5. Ada anak yang sekolah tapi belum terdaftar di DAPODIK, dikarenakan sekolah tersebut belum ada ijin operasionalnya.
6. Tren di masyarakat yang lebih memilih sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri, terutama di jenjang pendidikan Sekolah Dasar,

sehingga perlu peningkatan kualitas pendidik melalui berbagai macam treatment untuk peningkatan kualitas dan pelayanan di masing-masing satuan pendidikan.

7. Keterbatasan jumlah guru terutama untuk jenjang Sekolah Dasar, sehingga banyak wiyata bakti yang menjadi guru dengan kualifikasi ijazah tidak linier, dan tanggung jawab dengan peserta didik tidak maksimal.
8. Orang tua siswa lebih cenderung menyekolahkan ke MI / SD IT / lembaga pendidikan swasta yang lebih banyak pembelajaran materi agama, karena di sekolah negeri kekurangan Guru Pendidikan Agama Islam.
9. Ketercukupan sarana prasarana masih belum merata, terutama gedung sekolah yang kurang memadai.
10. Keterbatasan personil terutama di jenjang Sekolah Dasar, belum ada tenaga administrasi di masing-masing Sekolah Dasar, dampaknya tugas guru kurang optimal dalam penyampaian materi kepada peserta didik karena merangkap tugas sebagai tenaga administrasi di sekolah.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi :

1. Memastikan tersedianya dan terdistribusikannya sumber-sumber belajar bagi semua siswa dan guru.
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan / seminar yang dibutuhkan oleh para Pendidik, agar mereka lebih siap dalam merencanakan, mendesain, serta mengimplementasikan kegiatan pembelajaran secara daring / online yang berkualitas.
3. Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung kelancaran proses kegiatan belajar mengajar.
4. Koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan berbagai unsur seperti stake holder pendidikan, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan untuk berupaya mencari formulasi untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
5. Pembukaan kelompok belajar (pokjar) di setiap desa untuk mendekatkan akses layanan pendidikan non formal.
6. Menjamin pelayanan pendidikan penduduk usia sekolah SD dan SMP dalam bentuk pemenuhan operasional siswa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
7. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

8. Optimalisasi peran pendidikan non formal melalui layanan pendidikan kesetaraan
9. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk menjamin keterpenuhan daya tampung siswa.
10. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menunjang operasional sekolah.
11. Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sebagai upaya untuk menjaga siswa rentan putus sekolah agar tetap bersekolah
12. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
13. Peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
14. peningkatan kompetensi guru melalui Program Induksi Guru Pemula (PIGP) dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
15. memperkuat forum KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sebagai wadah kerja sama guru – guru dan sebagai tempat mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kemampuan profesional, yaitu dalam hal merencanakan, melaksanakan dan menilai kemajuan peserta didik.
16. Pemenuhan sarana prasarana lembaga non formal sesuai dengan SNP untuk mendukung penilaian dalam standar sarpras. 2) Peningkatan kompetensi tutor dan penilik sekolah.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.....
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan											
1	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	V	V	70%	75%	80%	85%	57,09	85,27	70%	75%	
2	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	V	V	86%	88%	89%	90%	73,03	92,21	86%	88%	
3	PKBM terakreditasi	V	V	80%	85%	90%	100%	80,00	100	80%	85%	
4	Prosentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	V	V	20%	30%	40%	50%	NA	NA	20%	30%	
5	Guru tersertifikasi	V	V	62%	64%	67%	70%	78,77	86,85	62%	64%	
6	Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	V	V	6%	8%	9%	10%	NA	79,90	6%	8%	
7	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	V	V	100	100	100	100	87,25	93,25	100	100	
8	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	V	V	100	100	100	100	90,84	95,63	100	100	
9	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	V	V	2,07	2,08	2,09	3,01	NA	NA	2,07	2,08	
10	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	V	V	1,87	1,97	2,07	2,17	NA	NA	1,87	1,97	
11	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	V	V	1,91	2,01	2,05	2,11	NA	NA	1,91	2,01	
12	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	V	V	1,91	2,01	2,05	2,11	NA	NA	1,91	2,01	
13	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	V	V	73,83	73,85	73,90	73,92	NA	NA	73,83	73,85	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV	V	V	81,99	82,01	82,03	82,05	NA	NA	81,99	82,01	
15	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	V	V	3,20	3,23	3,25	3,27	NA	NA	3,20	3,23	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
1	Persentase wirausaha muda	V	V	35%	38%	40%	42%	NA	NA	35%	38%	
2	Cakupan pembinaan olahraga	V	V	30%	32%	34%	36%	NA	NA	30%	32%	
3	Cakupan pembinaan atlet muda	V	V	30%	32%	34%	36%	NA	NA	30%	32%	
4	Jumlah atlet berprestasi			20 Angka	23 Angka	25 Angka	28 Angka	22 Angka	22 Angka	20 Angka	23 Angka	
5	Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah	V	V	30%	40%	50%	60%	NA	NA	30%	40%	
6	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	V	V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Iklim Keamanan SD	V	V	87,44	92,31	-	-	70,92	85,23	87,44	92,31	
8	Iklim Kebhinekaan SD	V	V	86,12	96,26	-	-	63,76	91,28	86,12	96,26	
9	Iklim Inklusivitas SD	V	V	79,26	84,04	-	-	65,73	77,84	79,26	84,04	
10	Iklim Keamanan SMP	V	V	84,64	88,54	-	-	82,67	81,86	84,64	88,54	
11	Iklim Kebhinekaan SMP	V	V	85,66	91,06	-	-	65,77	86,64	85,66	91,06	
12	Iklim Inklusivitas SMP	V	V	78,89	82,88	-	-	69,46	76,68	78,89	82,88	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Kualitas pendidikan saat ini memiliki peranan dalam mewujudkan Kabupaten Banjarnegara. Bertumpu pada keyakinan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan pada 2 (dua) urusan, yaitu urusan Pendidikan serta urusan Kepemudaan dan Olahraga. Oleh karenanya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut, beberapa permasalahan bidang pendidikan tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan & Olahraga. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas belum optimal.
2. Belum semua warga memahami pentingnya pendidikan.

3. Pemenuhan kapasitas/ daya tampung seberapa besar SD Negeri tidak terpenuhi, mengindikasikan berkurangnya peserta didik di SD Negeri, sehingga berpotensi adanya Regrouping dari sekolah yang terdampak tersebut.
4. Adanya Anak Tidak Sekolah (ATS). Pencegahan Anak Putus Sekolah perlu ditingkat untuk menjaga seluruh peserta didik SD lulus dan melanjutkan ke jenjang SMP/ sederajat.
5. Sarana prasarana SD Negeri dengan kondisi baik menurun karena faktor usia peralatan dan gedung SD yang dimiliki.
6. Media pembelajaran yang digunakan para guru kurang variatif, sehingga cenderung membuat siswa merasa jenuh, sehingga berakibat tidak optimalnya penyerapan materi pembelajaran oleh peserta didik.
7. Sarana prasarana pendidikan di masing-masing satuan pendidikan yang belum terpenuhi secara optimal dan belum sesuai standar yang ada;
8. Upaya pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) ke jalur pendidikan nonformal/ kesetaraan perlu melibatkan instansi/pihak lintas sektoral.
9. Momentum pendataan harus segera ditindaklanjuti dengan kegiatan bagi ATS tersebut.
10. Motivasi ATS untuk kembali ke jalur pendidikan masih rendah, sehingga perlu adanya pendampingan yang lebih intensif.
11. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum seimbang dan perlu pemerataan antara realita kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada;
12. Rendahnya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih layak, diakibatkan oleh berbagai aspek, baik aspek sosial, budaya ataupun lingkungan sekitar yang kurang mendukung untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemerataan akses pendidikan.
13. Belum meratanya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya;
14. Belum optimalnya peran pendidikan non formal;
15. Belum optimalnya sarana prasarana dan pengembangan pembibitan atlet olahraga;
16. Semakin mudarnya nilai-nilai sosial dan rasa nasionalisme pemuda.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, sehingga berimplikasi terhadap capaian angka Indeks Pembangunan Manusia juga rendah.
2. Sarana prasarana pendidikan yang belum terpenuhi dan belum sesuai standar, mengakibatkan proses pembelajaran bagi peserta didik tidak nyaman.
3. Rasio pembelajaran yang tidak layak diakibatkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak seimbang, sehingga berdampak pada.
4. Rendahnya mutu lulusan, berdampak pada angka pengangguran yang cukup tinggi, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan / lowongan pekerjaan yang sesuai kualifikasi pendidikan.
5. Belum meratanya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya, berakibat pada kualitas peserta didik yang rendah.
6. Belum optimalnya peran pendidikan non formal, sehingga berdampak rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang mengenyam pendidikan non formal, padahal keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menopang proses pembelajaran terutama bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tidak dapat menempuh pembelajaran melalui jalur pendidikan formal.
7. Belum optimalnya sarana prasarana dan pengembangan pembibitan atlet olahraga, mengakibatkan pada rendahnya jumlah capaian atlet yang berprestasi mengharumkan nama Banjarnegara, baik di level Kabupaten, Provinsi bahkan sampai level nasional.
8. Lunturnya nilai-nilai sosial dan rasa nasionalisme pemuda, sikap individualis dan cenderung apatis terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya semangat juang generasi penerus, mudah diintervensi oleh bangsa lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu,

diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

Tantangan :

1. Laju pertumbuhan ASN guru yang tidak seimbang, antara jumlah yang pensiun dengan perekrutan ASN yang baru, sehingga pemenuhan kebutuhan guru tidak merata penyebarannya.
2. Rendahnya minat masyarakat usia sekolah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, terutama di jenjang SMP ke SMA, sehingga berpotensi menambah jumlah angka Anak Tidak Sekolah (Anak Tidak Sekolah).
3. Kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan negeri, yang kurang bervariasi, inovatif, sehingga masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan swasta.
4. Angka kemiskinan yang relatif tinggi, sehingga berdampak pada capaian peningkatan kualitas layanan pendidikan, terutama berakibat terhadap tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) khususnya di Kabupaten Banjarnegara;
5. Masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan karyawan / karyawatnya pada penduduk yang masih usia sekolah, karena keterbatasan ekonomi sehingga penduduk usia sekolah tersebut tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak;
6. Karakter dan nilai sosial pemuda yang semakin luntur, mengakibatkan sikap individualis dan apatis, kurang peka terhadap dinamika dan arah kebijakan pembangunan.

Peluang :

1. Komitmen pemerintah pusat maupun pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar;
2. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
3. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

4. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
5. Kepedulian masyarakat dalam DUDI terhadap pembangunan sector pendidikan melalui program CSR (corporate social responsibility)-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
6. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
7. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tingkat pendidikan dasar.

Teknologi informasi berperan penting dalam mengefektifkan proses internalisasi nilai-nilai tersebut. Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan, berkaitan dengan kemampuan sekolah dalam melakukan pengembangan literasi digital. Selain berdampak pada daya saing siswa di masa yang akan datang, mempersiapkan siswa untuk memahami teknologi dan memilih serta memilah informasi berbasis digital akan membantu siswa untuk selalu berfikir kritis terhadap konten yang ditemui di media digital.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kualitas layanan dan akses pendidikan masih perlu ditingkatkan di seluruh jenjang, dengan berupaya untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan, serta pemerataan personil pendidik maupun tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan.
2. Masih rendahnya angka capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Banjarnegara, perlu upaya bersama untuk peningkatan capaian tersebut, bagaimana upaya bersama untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, melalui strategi :
 - a) Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan;
 - b) Penguatan lembaga pendidikan nonformal;Hal tersebut dapat ditempuh, melalui program sebagai berikut :
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan;
 - b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c) Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - d) Program pembinaan perpustakaan;
2. Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian yang Berkelanjutan, melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
3. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.

Tabel 2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga				620.298.613.400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga				618.761.542.746	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				611.321.563.400	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				609.644.492.746	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				611.321.563.400	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				609.644.492.746	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				194.002.070.654	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				192.375.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				99.374.070.654	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				99.470.000.000	
02	Penambahan Ruang Kelas Baru					Penambahan Ruang Kelas Baru					
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Kab. Banjarnegara	4 Ruang	4.500.000.000		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Kab. Banjarnegara	4 Ruang	3.000.000.000	SD
04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang	0		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang	0	
05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					Pembangunan Perpustakaan Sekolah					
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang	0		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang	0	
06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	76 Unit	4.523.475.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	76 Unit	4.500.000.000	
08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas					
		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	20 Ruang	6.228.000.000		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	20 Ruang	7.500.000.000	termasuk untuk BOP ATK sarpras dan PPTK
09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	6 Ruang	1.000.000.000		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	6 Ruang	600.000.000	
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	25 Ruang	1.500.000.000		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	25 Ruang	1.500.000.000	
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	- Kab. Banjarnegara	66 Unit	4.257.350.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	- Kab. Banjarnegara	66 Unit	5.500.000.000	rehab rumah dinas kompleks SD Batur 4-7-9, pagar, paving dsb
16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	10 Paket	2.000.000.000		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	10 Paket	2.000.000.000	pengadaan mebel
17	Pengadaan Perlengkapan Siswa					Pengadaan Perlengkapan Siswa					
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	12500 Unit	620.000.000		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	12500 Unit	620.000.000	pengadaan sampul raport
18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan					Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan					
		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	350.000.000		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	200.000.000	
19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	450.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	200.000.000	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Kab. Banjarnegara	0 Peserta Didik	1.000.000.000		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Kab. Banjarnegara	0 Peserta Didik	1.000.000.000	bantuan siswa miskin
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	100 Paket	2.750.000.000		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	100 Paket	1.000.000.000	pengadaan tik, media pendidikan
23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	300.000.000		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	300.000.000	PAS, ujian, PTS, UKLIN
24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar					
		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	150.000.000		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	150.000.000	pelatihan e raport, akreditasi sekolah, Proktor ANBK
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	- Kab. Banjarnegara	0 Peserta Didik	1.100.000.000		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	- Kab. Banjarnegara	0 Peserta Didik	1.500.000.000	fasilitasi korwil dan dinas untuk lomba korwil, pesta siaga dsb @50juta; dinas 500 juta

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	1.400.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	2.400.000.000	fasilitasi komunitas pendidik per gugus (80 gugus X 5 juta), K3S, KKG, guru penggerak, PPG (1M) dan untuk diklat kepala sekolah (170jt)
28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	150.000.000		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	150.000.000	kegiatan yang mendukung indikator kebinekaan, perundungan, intoleransi
29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	66.000.000.000		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	66.000.000.000	DANA TRANSFER
35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	200.000.000		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	100.000.000	untuk pembinaan penggunaan Chrome book SD
38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	450.245.654		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	650.000.000	Koordinasi PBD SD (50jt), Supervisi PMM K3S 20 Korwil (100jt) ; KKG ; Dapodik SD (150jt)
39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	295.000.000		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	300.000.000	kurikulum merdeka, pmm, pmo
40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	150.000.000		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	300.000.000	bimtek kapasitas BOS (fasilitasi monev untuk bendhara sekolah) , bimtek perundungan, inklusivitas ,

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											kemanan sekolah
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				61.735.000.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				61.005.000.000	
02	Penambahan Ruang Kelas Baru					Penambahan Ruang Kelas Baru					
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Kab. Banjarnegara	5 Ruang	1.900.000.000		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Kab. Banjarnegara	5 Ruang	2.000.000.000	
05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					Pembangunan Perpustakaan Sekolah					
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	6 Ruang	2.600.000.000		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	6 Ruang	2.000.000.000	
06	Pembangunan Laboratorium					Pembangunan Laboratorium					
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	5 Ruang	1.950.000.000		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	5 Ruang	1.500.000.000	
12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	0		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	500.000.000	pembangun an ruang aula lantai atas tingkat dak SMP 1 Banjarnegar a
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah					
		Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	15 Unit	1.950.000.000		Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	15 Unit	2.000.000.000	
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	20 Ruang	2.600.000.000		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	20 Ruang	2.000.000.000	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah					
		Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	4 Ruang	650.000.000		Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	4 Ruang	600.000.000	
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang	0		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang		
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	6 Ruang	1.100.000.000		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	6 Ruang	1.000.000.000	
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium					
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang	1.210.000.000		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang	1.200.000.000	
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula					
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang	500.000.000		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang	800.000.000	Indoor SMP 3 Klampok
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	20 Unit	3.250.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	20 Unit	3.250.000.000	
27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	210.000.000		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	500.000.000	pengadaan mebel
29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan					Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	300.000.000		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	150.000.000	
30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	300.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	150.000.000	
32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Kab. Banjarnegara	0 Peserta Didik	1.000.000.000		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Kab. Banjarnegara	0 Peserta Didik	1.000.000.000	bantuan siswa miskin
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	20 Paket	3.275.000.000		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	20 Paket	3.275.000.000	pengadaan alat TIK, alat/baju Tari Massal
37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	350.000.000		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	350.000.000	pelatihan e raport, ANBK, proktor
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	- Kab. Banjarnegara	0 Peserta Didik	1.200.000.000		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	- Kab. Banjarnegara	0 Peserta Didik	1.200.000.000	fasilitasi lomba kesiswaan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	1.000.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	830.000.000	fasilitasi komunitas belajar (50jt) , MKKS (50jt), MGMP (130jt), Pengawas, Penilik (100jt) Lomba lomba PTK (250jt); PPG (250jt)
41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	200.000.000		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	150.000.000	kegiatan yang mendukung indikator kebinekaan, perundungan, intoleransi
42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	34.000.000.000		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	34.000.000.000	DANA PUSAT
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU					
		Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	0 Ruang		
45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	2 Ruang	500.000.000		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	2 Ruang	500.000.000	SMP 5 (lanjutan)
48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	100.000.000		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	100.000.000	sipedas, simpak
51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	250.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	600.000.000	Evaluasi POK, Evaluasi PBD, Rakortek SMP, SPM, Renja, FPD (50jt), Input Sirup (50 jt), Supervisi Penganggar an (100jt); Verval ATS SMP (50jt); Koordinasi Hardiknas (200jt); Dapodik SMP 50 jt

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	440.000.000		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	350.000.000	kurikulum merdeka, pmm , pmo
53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	200.000.000		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	300.000.000	bimtek kapasitas BOS SMP; fasilitasi monev sekolah; fasilitasi bendahara BOS SMP
53	Pemeliharaan Mebel Sekolah				100.000.000	Pemeliharaan Mebel Sekolah				100.000.000	
53	Penyelenggaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				200.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				200.000.000	UKLIN
53	Perlengkapan Belajar Peserta Didik				400.000.000	Perlengkapan Belajar Peserta Didik				400.000.000	pengadaan rapot
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				21.393.000.000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				20.050.000.000	
01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD					Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD					
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	0 Unit			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	0 Unit		
02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	500.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	500.000.000	pavingisasi TK Pembina Bawang, jembatan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											TK Pembina Mandiraja
03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD					
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	756.000.000		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	750.000.000	
04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	987.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	600.000.000	rehab aula TK Pembina Bawang, Madukara, Wanadadi
09	Pengadaan Perlengkapan PAUD					Pengadaan Perlengkapan PAUD					
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	500.000.000		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	500.000.000	
10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD					Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD					
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	100.000.000		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	100.000.000	
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD					
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	100.000.000		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	100.000.000	
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	3.950.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	3.000.000.000	honor guru PAUD
18	Pengelolaan Dana BOP PAUD					Pengelolaan Dana BOP PAUD					
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	13.300.000.000		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	- Kab. Banjarnegara	0 Satuan Pendidikan	13.300.000.000	DANA PUSAT
26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	1.000.000.000		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	1.000.000.000	paud HI
27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					
		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	200.000.000		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	200.000.000	bimtek aplikasi, pmm untuk paud
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.500.000.000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.850.000.000	
02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	5 Unit	1.350.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	- Kab. Banjarnegara	5 Unit	1.000.000.000	
04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	1 Unit	500.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Banjarnegara	1 Unit	500.000.000	Rehab Aula SKB , Ruang Makan
06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit		
11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan					
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	10 Paket	1.000.000.000		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	- Kab. Banjarnegara	10 Paket	1.000.000.000	alat racik kopi, PC untuk PKBM, dsb
12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan					
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	- Kab. Banjarnegara	600 Peserta Didik	600.000.000		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	- Kab. Banjarnegara	600 Peserta Didik	600.000.000	
13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
		Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	- Kab. Banjarnegara	21 Satuan Pendidikan	3.000.000.000		Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	- Kab. Banjarnegara	21 Satuan Pendidikan	3.000.000.000	BOSDA
15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Banjarnegara	0 Orang	0		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Banjarnegara	0 Orang		
16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	- Kab. Banjarnegara	21 Satuan Pendidikan	800.000.000		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	- Kab. Banjarnegara	21 Satuan Pendidikan	1.500.000.000	kegiatan yang mendukung indikator kebinekaan, perundungan, intoleransi dan hibah pgr, dipayuda, dian kartika, taman siswa
17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	- Kab. Banjarnegara	21 Satuan Pendidikan	4.250.000.000		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	- Kab. Banjarnegara	21 Satuan Pendidikan	4.250.000.000	BOP PUSAT
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				0,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					
01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	0,00		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen		
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				19.620.319.460	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				19.620.319.460	
	<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				<i>19.620.319.460</i>	<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				<i>19.620.319.460</i>	
01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	7.166.201.080		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	7.166.201.080	kesra wb kategori 1-2
02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Banjarnegara	0 Laporan	12.454.118.380		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Banjarnegara	0 Laporan	12.454.118.380	kesra wb non kategori dan honor tutor non formal
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				200.000.000	
	<i>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				<i>200.000.000</i>	<i>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				<i>200.000.000</i>	
06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota					Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Banjarnegara	300 Peserta Didik	200.000.000		Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Banjarnegara	300 Peserta Didik	200.000.000	lomba FTBI SD dan SMP
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				397.499.173.286	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				397.449.173.286	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				<i>200.000.000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				<i>200.000.000</i>	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	200.000.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	200.000.000	penyusunan renja; rka, renak, pk;
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Banjarnegara	0 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Banjarnegara	0 Laporan		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				<i>392.159.949.295</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				<i>392.159.949.295</i>	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Banjarnegara	2 Laporan	250.000.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Banjarnegara	2 Laporan	250.000.000	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Banjarnegara	0 Orang/bulan	390.609.949.295		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Banjarnegara	0 Orang/bu lan	390.609.949.295	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Banjarnegara	1 Dokumen	1.300.000.000		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Banjarnegara	1 Dokumen	1.300.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				933.709.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				933.709.000	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	20.500.000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	20.500.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	65.391.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	65.391.000	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	50.000.000		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Paket	50.000.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	1 Paket	797.818.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	1 Paket	797.818.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.050.000.000	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	200.000.000		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	200.000.000	
07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Pengadaan Aset Tetap Lainnya					
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	600.000.000		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	600.000.000	pengadaan aset tanah SMP Kalibening
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	300.000.000		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	250.000.000	pembelian UPS, AC, audio, meja kursi aula, tablet mini
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.904.059.991	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.904.059.991	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Laporan	786.060.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Laporan	786.060.000	listrik dinas, internet sekolah dan internet kantor
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Laporan	100.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Laporan	100.000.000	sewa kompter, printer, laptop
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Laporan	1.017.999.991		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Banjarnegara	0 Laporan	1.017.999.991	gaji ptt , outsourcing

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.201.455.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.201.455.000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	125.000.000		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	125.000.000	pajak motor, service dll
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	500.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	500.000.000	rehab korwil purwanegara. Korwil Wanayasa, Pejawaran dan kantor dinas
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	576.455.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	576.455.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.977.050.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.117.050.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8.627.050.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8.767.050.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1.772.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1.772.500.000	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1.522.500.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1.522.500.000	
01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor					

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	- Kab. Banjarnegara	120 Orang	535.000.000		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	- Kab. Banjarnegara	120 Orang	535.000.000	
06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota					Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	- Kab. Banjarnegara	0 Unit		
08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda					Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda					
		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	- Kab. Banjarnegara	140 Orang	987.500.000		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	- Kab. Banjarnegara	140 Orang	987.500.000	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000	
02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	- Kab. Banjarnegara	1 Dokumen	250.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	- Kab. Banjarnegara	1 Dokumen	250.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.854.550.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.994.550.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				864.550.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				864.550.000	
03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan					Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan					
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	- Kab. Banjarnegara	2000 Orang	864.550.000		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	- Kab. Banjarnegara	2000 Orang	864.550.000	partisipasi POPDA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				110.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				250.000.000	
04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota					Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota					
		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	- Kab. Banjarnegara	40 Orang	110.000.000		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	- Kab. Banjarnegara	40 Orang	250.000.000	hadiah untuk POPDA Kab, Karesidenan , Propinsi
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				5.680.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				5.680.000.000	
01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan					Standardisasi Organisasi Keolahragaan					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	- Kab. Banjarnegara	2 Dokumen	5.480.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	- Kab. Banjarnegara	2 Dokumen	5.480.000.000	hibah KONI, NPCI, dll
02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan					Pengembangan Organisasi Keolahragaan					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	- Kab. Banjarnegara	1 Organisasi	200.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	- Kab. Banjarnegara	1 Organisasi	200.000.000	pelatihan atlet
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				200.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				200.000.000	
01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi					Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi					
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	200.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	- Kab. Banjarnegara	0 Dokumen	200.000.000	BJC jennjang SD dan SMP
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				350.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				350.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				350.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				350.000.000	
02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah					Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah					
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	- Kab. Banjarnegara	1 Organisasi	250.000.000		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	- Kab. Banjarnegara	1 Organisasi	250.000.000	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	- Kab. Banjarnegara	1 Laporan	100.000.000		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	- Kab. Banjarnegara	1 Laporan	100.000.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Arah kebijakan bidang pendidikan di tahun 2024 adalah berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan, dengan tolak ukur melalui berbagai aspek, yaitu :
 - a) Tingginya angka partisipasi siswa, melalui kesadaran/persepsi, akses, keterjangkauan dan tekanan eksternal;
 - b) Hasil pembelajaran yang berkualitas;
 - c) Distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif;
2. Salah satu cara transformasi adalah melalui program Perencanaan Berbasis Data dengan perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel
3. Melalui implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, berupaya untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas khususnya bagi seluruh masyarakat Banjarnegara, dimulai dari keluarga, melalui peningkatan kualitas guru, institusi pendidikan, dunia usaha/industri dan masyarakat.
4. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya, dengan melalui :
 - c) Upaya pemenuhan infrastruktur dan teknologi melalui platform pendidikan nasional berbasis teknologi;
 - d) Pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel;
 - e) Kompetensi guru, kepala sekolah dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan;
 - f) Kolaborasi dan pembinaan antara guru, satuan pendidikan dan pihak industri;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Desa Sigeblog, Kab. Banjarnegara	gedung sekolah sudah mulai rusak	1 paket	-
2	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Sijeruk RT 01 RW 02, Kab. Banjarnegara	Masih Kurangnya Ruang Kegiatan Belajar Mengajar	1 paket	-
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Sijeruk RT 01 RW 02, Kab. Banjarnegara	Terdapat Ruang Kelas yang kurang layak	1 paket	-
4	Pengadaan mebeluer sekolah SD	SDN 2 Paseh, Kab. Banjarnegara	Pengadaan Mebeler SDN 2 Paseh	1 paket	-
5	Pengadaan mebeluer sekolah SD	SDN 1 Paseh, Kab. Banjarnegara	Pengadaan Mebeler SDN 1 Paseh	1 paket	-
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Desa Beji RT 02 RW 01, Kab. Banjarnegara	Beberapa Ruang Kelas sudah tidak memadai untuk belajar mengajar	1 paket	-
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Desa SIjenggung Rt 001 Rw 001, Kab. Banjarnegara	tembok pembatas sekolah belum semua. jadi masih ada kemungkinan anak sekolah keluar di saat jam nelajar di karenakan bisa lewat belakang sekolah yang belum ada tembok pembatasnya	1 paket	-
8	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Desa Banjarmangu, Kab. Banjarnegara	setelah ada regrouping SD N 2 Banjarmangu maka di SD N 1 Banjarmangu kekurangan lokal ruang kelas sejumlah 3 Lokal.	1 paket	-
9	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	SD NEGERI 2 KALILUNJAR, Kab. Banjarnegara	belum tersedia	1 paket	-
10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDN 1 dan SDN 3 Cendana, Kab. Banjarnegara	Kurangnya sarana Gedung serba guna dan WC SDn 1 dan SDN 3 Cendana	1 paket	-
11	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Sokanandi, Kab. Banjarnegara	Pembinaan dan pembentukan atlet berprestasi	1 paket	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
12	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Plorengan RT 001 RW 001, Kab. Banjarnegara	Luas Wilayah Sekolah masih kurang untuk membangun fasilitas ruang kelas baru bagi seluruh siswa karena jumlah siswa yang banyak dan luas lahan yang terbatas sehingga diperlukan pembangunan gedung tingkat 2 atau tiga	1 paket	-
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Plorengan RT 002 RW 006, Kab. Banjarnegara	Fasilitas Olah raga yang tidak tersedia membatasi aktifitas fisik Siswa/siswi SMPN 6 Kalibening. sehingga perlu dibangun Lapangan Sekolah untuk memfasilitasi semua kegiatan sekolah	1 paket	-
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Dusun Susukan RT 002 RW 006, Kab. Banjarnegara	Keadaan Gedung SDN 2 Plorengan Rusak Berat yang mengganggu Kenyamanan dan Keamanan Siswa dalam belajar sehingga perlu dilakukan rehabilitasi Gedung SD tersebut	1 paket	-
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Dusun Susukan RT 002 RW 006, Kab. Banjarnegara	Jumlah Komputer untuk proses pembelajaran Siswa/Siswi sangat Terbatas sehingga diperlukan Pengadaan Komputer untuk mendukung proses Belajar mengajar siswa	1 paket	-
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Dusun Krungrungan Rt 01 Rw 04, Kab. Banjarnegara	terdapat satu ruang kelas yang rusak.	1 paket	-
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Dusun Krungrungan Rt 01 Rw 04 Desa Asinan, Kab. Banjarnegara	terdapat tiga ruang kelas yang rusak	1 paket	-
18	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDN Paweden, Kab. Banjarnegara	halaman sekolah tidak rata dan tidak nyaman untuk kegiatan anak-anak perlu di Paving	1 paket	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	SD Negeri 3 Ambal, Kab. Banjarnegara	Ruang Kelas SD sudah Rusak membahayakan Siswa	1 paket	-
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	SD Negeri 2 Ambal, Kab. Banjarnegara	Gedung Ruang Kelas SD yang sudah Rusak membahayakan Siswa	1 paket	-
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	SDN 1 Slatri Kec. Karangkobor, Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Gedung sekolah yang rusak karena atapnya ambruk	1 paket	-
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	dusun Krandegan SDN 2 Pagerpelah, Kab. Banjarnegara , Kab. Banjarnegara	banyak ruang sekolah yang sudah rusak dan keterbatasan pembiayaan dana	1 paket	-
23	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SD 2 Karangkobor, Kab. Banjarnegara	SD Karangkobor 2 Belum ada mushola	1 paket	-
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Desa Pagelak RT 02 RW 02 Kecamatan Madukara, Kab. Banjarnegara	2 unit ruang kelas yang sudah rusak beratdan tidak bisa difungsikan	1 paket	-
25	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	SDN Karanganyar RT 01RW 02, Madukara, Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Belum ada perpustakaan SD	1 paket	-
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Desa Penawangan, Kab. Banjarnegara	Sarana dan Prasarana SD sudah mulai rusak	1 paket	-
27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Dusun Bogaraji, Rt. 03 Rw. 05, Kab. Banjarnegara	Kondisi pagar SD yang sudah rusak dan kurang memadai	1 paket	-
28	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDN 1 Bantarwaru, Kab. Banjarnegara	Terdapatnya (sarana utilitas) Pagar sari sekolah yang kurang memadai menyebabkan lingkungan sekolah kurang aman dan nyaman	1 paket	-
29	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDN 2 Bantarwaru, Kab. Banjarnegara	Terdapatnya (sarana utilitas) Pagar sari sekolah yang kurang memadai mengakibatkan lingkungan sekolah kurang aman dan nyaman	1 paket	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
30	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Puntuk Gondang Lor RT 2 RW 2, Kab. Banjarnegara	kurangnya ruang kelas untuk pembelajaran siswa	1 paket	-
31	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	SDN 1 Gununggiana, Kab. Banjarnegara	kurangnya ruang kelas untuk pembelajaran siswa	1 paket	-
32	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Mandiraja wetan, Kab. Banjarnegara	Kondisi ruang kelas kurang	1 paket	-
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Desa Larangan/ SDN Larangan, Kab. Banjarnegara	Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan	1 paket	-
34	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP	SMPN 2 Satap Pandanarum, Kab. Banjarnegara	Adanya ruangan kelas yang sudah tidak layak ditempati para Siswa dikarenakan labilnya tanah sehingga harus dipindahkannya kelas tersebut sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar para siswa dan guru.	1 paket	-
35	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	SDN 1 Pingit Lor, Kab. Banjarnegara	Dikarenakan kurangnya ruangan kelas maka dalam satu kelas disekat menjadi 2 kelas, terkadang kelas tersebut bergantian dalam proses pembelajaran.	1 paket	-
36	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	SDN 1, 2, 3 Beji , Kab. Banjarnegara	kurangnya minat baca anak karena tidak adanya sarana pendukung	1 paket	-
37	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDN 1,2, 3 Beji, Kab. Banjarnegara	kurangnya sarana dan prasarana pendukung pada sekolah	1 paket	-
38	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDN 1,2,3 Beji, Kab. Banjarnegara	Kondisi bangunan Sekolah yang sudah rapuh dan rusak serta membahayakan siswa	1 paket	-
39	Pengadaan mebeluer sekolah SD	Sekolah Dasar di Desa Beji, Kab. Banjarnegara	Kondisi meubelair sekolah yang sudah rapuh dan rusak	1 paket	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
40	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Desa Sirongge, Kab. Banjarnegara	Bahwa di Desa Sirongge jumlah Sekolah Dasar berjumlah 3 (tiga) tempat. Kondisi Kamar Mandi di 3 (tiga) tempat tersebut belum memenuhi standar secara kalkulasi jumlah Peserta Didik dan Tenaga Pendidikan. Rata-Rata hanya memiliki 1 (satu) kamar mandi.	1 paket	-
41	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDN 2 Lawen, Kab. Banjarnegara	atap sekolah rusak	1 paket	-
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Desa Semangkung, Kab. Banjarnegara	Ruang kelas di sekolah dasar yang ada di Desa Semangkung masih kurang sehingga masih membutuhkan penambahan lokal ruang untuk kegiatan Belajar - Mengajar	1 paket	-
43	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Desa Sidarata rt 01 rw 01, Kab. Banjarnegara	gedung rusak 2 lokal	1 paket	-
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Dusun Kandangserang Desa Danakerta RT 02 RW 04 , Kab. Banjarnegara	2 gedung belajar siswa dan meubeler di MI Muhammadiyah 2 Danakerta kondisinya rusak sehingga mengganggu proses belajar mengajar	1 paket	-
45	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Desa Karang Sari Rt 04 Rw 1 SD N Karang Sari I, Kab. Banjarnegara	belum adanya pagar pengaman gedung sekolah	1 paket	-
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SD N Karang Sari I Rt 04 Rw I Dusun Kerajan , Kab. Banjarnegara	belum tersedianya pagar keliling sekolahan	1 paket	-
47	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	SDN 2 SAMBONG, Kab. Banjarnegara	Kurangnya Ruang Kelas untuk Siswa	1 paket	-
48	Pengadaan mebeluer sekolah SD	SDN 2 SAMBONG, Kab. Banjarnegara	Kurangnya sarana dan Prasarana Mebeulair SDN 2 Sambong untuk siswa	1 paket	-
49	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Karanganyar RT 03 RW 05, Kab. Banjarnegara	Tidak adanya dinding pagar	1 paket	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
			pengaman SDN 4 Karanganyar		
50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rt 03 / Rw 2, Kab. Banjarnegara	Ruang kelas SD N 1 Luwung mulai ada kerusakan sedang	1 paket	-
51	Pengadaan mebeluer sekolah SD	Rt 03 / Rw 2, Kab. Banjarnegara	Mebeluer Guru dan Siswa SD N Luwung 1 banyak yang rusak	1 paket	-
52	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Dusun 4 Desa Adipasir / SD Negeri 4 Adipasir, Kab. Banjarnegara	Ruang Kelas SD Negeri 4 Adipasir rusak	1 paket	-
53	Pengadaan mebeluer sekolah SD	Tanjunganom RT 003 RW 03, Kab. Banjarnegara	Kondisi Belum ada dan Mebelair sudah Rusak	1 paket	-
54	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Desa Situwangi, Kab. Banjarnegara	Pembuatan WC SDN 01 dan 02 Desa Situwangi	1 paket	-
55	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	SDN TUNGGORO, RT 02 RW 2, Kab. Banjarnegara	kurang memadainya sarana kelas yang ada	1 paket	-
56	Pengadaan mebeluer sekolah SD	Wanacipta RT 02/01, Kab. Banjarnegara	Mebeluer yang sudah rusak	1 paket	-
57	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Wanacipta RT 02/01, Kab. Banjarnegara	Sarpras yang sudah rusak	1 paket	-
58	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDN 2 Pringamba, Kab. Banjarnegara	SDN 2 Pringamba berada di lokasi yang rawan longsor. Adapun tebing yang sebelah barat di tahun 2022 pernah mengalami longsor sehingga sangat membahayakan guru, siswa dan pemukiman sekitar sekolah. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan pembangunan Talud Pengaman Tebing di lokasi Longsor tersebut karena belum ada penanganan dari Pemerintah.	1 paket	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
59	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	RT 05 RW 01, Kab. Banjarnegara	3 lokal ruang kelas SDN II Pesantren rusak sedang, pada musim hujan air masuk keruangan dan gawang pintu dan jendela rusak berat	1 paket	-
60	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	RT 01 RW 05 Pesantren, Kab. Banjarnegara	Pager Sari SDN I Pesantren Rusak Berat	1 paket	-
61	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Desa Pandansari, Kab. Banjarnegara	Banyaknya Peserta Didik	1 paket	-
62	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Desa Pandansari, Kab. Banjarnegara	Pagar Sari Sudah Rusak	1 paket	-
63	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Desa Pandansari, Kab. Banjarnegara	Halaman Sekolah SD sudah rusak	1 paket	-
64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Dusun Salam RT 03 RW 03, Kab. Banjarnegara	Ruang Kelas SDN 1 Pagergunung sangat memprihatinkan	1 paket	-

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Talud pengaman gedung SD Negeri 1 Plorengan Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Kalibening , Kab. Banjarnegara	1	Paket	150.000.000
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah pembangunan MCK dan dapur TK Pertiwi Giri Putra Salamerta Kecamatan Mandiraja, Kab. Banjarnegara	1	Paket	25.000.000
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 01 dan SDN 02 Pagergunung Kec Wanayasa , Kab. Banjarnegara	2	paket	100.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	PEMBANGUNAN PAGAR KELILING SDN 3 WANAYASA , Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS MI MUHAMMADIYAH WANAYASA WANAYASA , Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	BANTUAN HIBAH KEPADA MI AL MA'ARIF 01 KERTAYASA MANDIRAJA , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	BANTUAN HIBAH KEPADA MI MA'ARIF KEBANARAN MANDIRAJA , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	BANTUAN HIBAH KEPADA MI WATHONIYAH GLEMPANG MANDIRAJA , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	PEMBANGUNAN GEDUNG MI AL HIDAYAH PURWAREJA, PURWAREJA KLAMPOK , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	BANTUAN HIBAH UNTUK MI AL ISLAM KARANGJATI SUSUKAN TAHAP II , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Talud SD Negeri 2 Sembawa Kecamatan Kalibening, Kab. Banjarnegara	1	Paket	150.000.000
12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	BANTUAN HIBAH KEPADA MDT MIFTAHUL HUDA DESA PANDANARUM KEC. PANDANARUM , Kab. Banjarnegara	1	paket	30.000.000
13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	SD Muhammadiyah Batur Kecamatan Batur, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah kepada MI GUPPI 02 Jembatan kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
15	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	SD Negeri 2 Kalilandak, Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000
16	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Jln. Let. Suprpto 1014, Banjarnegara., Kab. Banjarnegara	1	Paket	70.000.000
17	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Desa Kalitengah, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara	1	Paket	100.000.000
18	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Bantuan Kepada MI Muhammadiyah 2 Blambangan Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
19	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Pembangunan Gedung Baru TK PGRI Ardisiwi Desa Pesantren Kecamatan Wanayasa, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	PEMBANGUNAN GEDUNG MTs MA'ARIF NU 01 SUSUKAN , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
21	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	BANTUAN HIBAH KEPADA MTs AL MA'ARIF RAKIT , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
22	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	Hibah Kepada SMP Cokroaminoto Punggelan Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
23	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	Hibah Kepada MTs Cokroaminoto Wanadadi Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	BANTUAN HIBAH UNTUK REHAB RUANG KELAS DAN PENGADAAN APE TK PGRI AL IKHLAS SUWIDAK DESA	-	paket	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		SUWIDAK WANAYASA , Kab. Banjarnegara			
25	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS PAUD NUSA BHAKTI 1 DUKUH KRANGEAN DESA PANDANSARI WANAYASA , Kab. Banjarnegara	1	paket	60.000.000
26	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	BANTUAN HIBAH UNTUK KB AL HUSNA KLAMPOK PURWAREJA KLAMPOK , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
27	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	BANTUAN HIBAH UNTUK RA ISLAMIYAH KECITRAN PURWAREJA KLAMPOK , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
28	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	PEMBANGUNAN GEDUNG RA AL HUDA DERMASARI SUSUKAN TAHAP II , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
29	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah Kepada TK PGRI Semarang Kec.Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah Kepada PAUD (kelompok Bermain Al Huda) Desa Petuguran Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	30.000.000
31	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Bantuan pembangunan RKB SD Muhammadiyah Wanadadi Kec Wanadadi , Kab. Banjarnegara , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
32	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	PEMBANGUNAN GEDUNG SD NEGERI 1 PANDANSARI WANAYASA, Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000
33	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MI MA'ARIF JOMBLANG DESA KUBANG WANAYASA, Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
34	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MI AL HUDA DERMASARI SUSUKAN , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
35	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada MI Cokroaminoto 02 Badamita Kecamatan Rakit , Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
36	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada MI Cokroaminoto Kesenit Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
37	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah kepada MI GUPPI 01 Jembatan Kec. Punggelan untuk Pembangunan Gedung Serba Guna, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
38	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah kepada Madrasah Diniyah Takmiliah Miftahul Huda Desa Jembatan Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
39	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Jl. Wijayakusuma, Desa Kalimandi RT 03 RW 01, Kec. Purworeja Klampok., Kab. Banjarnegara	1	Paket	50.000.000
40	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Ruang Kelas Baru SDIT Al Ihsan Desa Tapen Kecamatan Wanadadi, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
41	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Ruang Kelas Baru SDIT Insan Mandiri Desa Karang Sari Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
42	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	SDIT Bina Insan Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
43	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU KEPADA MTs MA'ARIF NU JATILAWANG WANAYASA , Kab. Banjarnegara	-	paket	-
44	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	Hibah kepada MTs Ma'arif NU 01 Susukan Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
45	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	SMP IT Mutiara Hati Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
46	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada MI Cokroaminoto 03 Bondolharjo Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	30.000.000
47	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah kepada DA Cokroaminoto 03 Badamita Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	1	paket	30.000.000
48	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hiabah Kepada DA Cokroaminoto Karangtengah Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
49	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah kepada PAUD Budi Asih Desa Badamita Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
50	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten (Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten)	Hibah kepada KONI FOBM Kabupaten Banjarnegara , Kab. Banjarnegara	1	Paket	350.000.000
51	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten (Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten)	Hibah kepada KONI Kabupaten Banjarnegara , Kab. Banjarnegara	1	Paket	25.000.000
52	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten (Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten)	Hibah kepada KONI Kabupaten Banjarnegara , Kab. Banjarnegara	1	Paket	25.000.000
53	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten (Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Hibah kepada KONI (IPSI) Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	1	Paket	30.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
	Tingkat Daerah Kabupaten)				
54	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Rehab gedung Kelompok Bermain Putra Mandiri desa Kemiri Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000
55	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG TK PGRI BHAKTI BANGSA KARANG TENGAH DESA KARANG TENGAH WANAYASA , Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000
56	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Pembangunan ruang kelas baru PAUD KB Roudlotul Jannah Desa Batur Rt. 06 Rw. 04 Desa Batur Kecamatan Batur , Kab. Banjarnegara	1	Paket	50.000.000
57	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah kepada TK Pertiwi Gelang Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
58	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah kepada TK Pertiwi Situwangi Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
59	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah Kepada DA Cokroaminoto 02 Badamita Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
60	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah kepada TK Pertiwi 01 Punggelan Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
61	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah kepada RA Al Hidayah Desa Petuguran Kwec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
62	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah Kepada DA Cokroaminoto Kruncang Desa Badakarya Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
63	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Jl. Raya Purwanegara-Pucungbedug Km. 4, Desa Parakan., Kab. Banjarnegara	1	Paket	50.000.000
64	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Pembangunan RKB untuk TKIT Mutiara Hati Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
65	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah kepada DA Cokroaminoto 02 Gumiwang Kec. Purawanegara, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
66	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	Hibah kepada DA Cokroaminoto Karangtengah Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
67	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Rehab Gedung TK Pertiwi Tunas Harapan Desa Sigaluh, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara , Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000
68	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Pembangunan Gedung TK Desa Dawuhan, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara , Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
69	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	BANTUAN HIBAH UNTUK REHAB RUANG KELAS KEPADA MI GUPPI 02 DIWEK DESA KARANGKOBAR KARANGKOBAR, Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000
70	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada MI Cokroaminoto Luwung Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
71	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Haibah Kepada MI Cokroaminoto 02 Badakarya Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
72	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada MI Cokroaminoto 01 Badakarya Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
73	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah kepada MI Cokroaminoto 01 Badakarya Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	Paket	50.000.000
74	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada Madrasah Diniyah Tarbiyatul Qulub Desa Purwasana Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
75	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada MI GUPPI Salam Desa Pandanarum Kec. Pandanarum, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
76	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada MI Al Hidayah Kalisat Petuguran Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
77	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada MI GUPPI Depok Kalibening Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
78	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada MI Cokroaminoto Bandingan Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
79	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	Hibah Kepada SMP Cokroaminoto Wanadadi, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)				
80	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	Hibah kepada MTS Cokroaminoto Tribuana Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
81	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	Hibah kepada MTs Cokroaminoto Madukara Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
82	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	Hibah Kepada MTs Cokroaminoto Madukara Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	1	paket	50.000.000
83	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	Jl. Tentara Pelajar No. 31 Sokaandi., Kab. Banjarnegara	1	Paket	100.000.000
84	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar)	PEMBANGUNAN TALUD SD NEGERI 1 PRINGAMBA PANDANARUM, Kab. Banjarnegara	1	paket	100.000.000

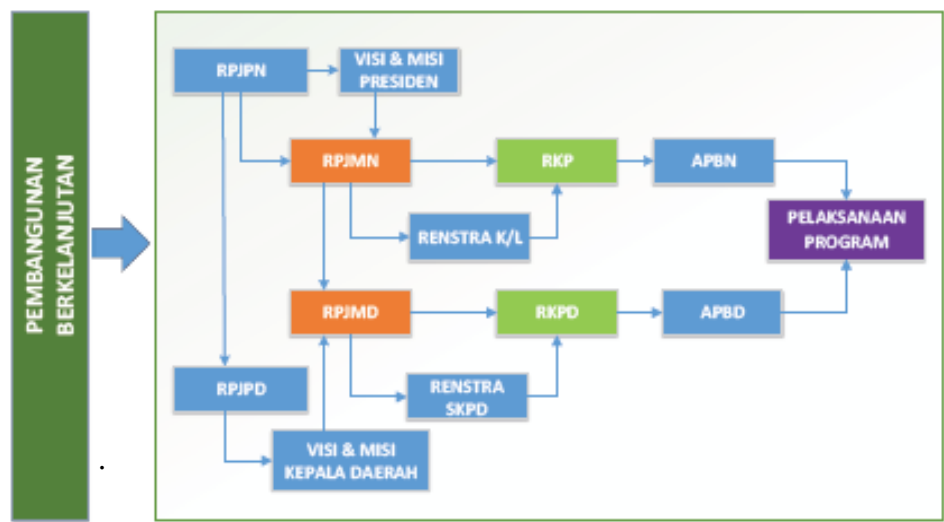
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada gambar berikut :



Adapun telaahan terkait kebijakan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan TPB/SDGs yang menysasar ke dalam sektor pendidikan, yaitu sesuai Tujuan 4 (Keempat) yaitu Pendidikan Berkualitas.

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (2) Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; (4) Memperkuat penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah; (5) Meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan (6) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, adalah sebagaimana berikut :

- 1) Tujuan : Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas.
- 2) Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan, dengan tolak ukur kinerja berupa meningkatnya pelayanan pendidikan secara agregat, dan indikator kinerjanya yaitu Indeks Pembangunan Manusia melalui capaian angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Usulan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - 1) Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
7. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

BAB IV
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						617.091.363.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						608.438.863.400,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						608.438.863.400,00	
1,	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	397.796.248.256,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				0 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	392.159.949.265,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/bulan	390.609.949.265,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.131.691.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	65.391.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				0 Paket	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	995.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.099.093.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	249.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				7 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	249.193.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	249.193.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.004.059.991,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				40 Laporan	886.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				20 Laporan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				31 Laporan	1.017.999.991,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.201.455.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				121 Unit	125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	576.455.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2,	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasionalRata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasionalRata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasionalJumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)Sekolah SD/MI kondisi bangunan baikSekolah SMP/MTs kondisi bangunan baikJumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan</i>	-			1.97 %2.01 %2.01 % 100 % 75 % 88 % 100 %73.85 %82.01 % 85 %3.23 %2.08 %	190.822.295.684,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi BPertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIVPKBM terakreditasi Rasio Pengawas dan Penilik PAUD Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional</i>						
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-				100.370.719.084,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				0 Unit	4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				6 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				25 Ruang	1.499.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>				10 Paket	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				0 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				0 Peserta Didik	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia</i>				0 Paket	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				1500 Peserta Didik	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				2400 Orang	2.143.348.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>				0 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				0 Satuan Pendidikan	66.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				0 Satuan Pendidikan	66.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				0 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				7 Dokumen	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				0 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				12500 Paket	620.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				9 Ruang	4.550.752.184,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				66 Unit	5.496.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				0 Orang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				0 Satuan Pendidikan	310.542.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				20 Ruang	7.499.975.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	58.645.059.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium							
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium							
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula							
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Unit	3.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				15 Paket	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik							
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				20 Paket	3.275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	820.059.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>				0 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				0 Satuan Pendidikan	34.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU							
			<i>Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah							
			<i>Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Ruang	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah							
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				0 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				100 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				12 Dokumen	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				0 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar</i>				3000 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				200 Orang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	20.056.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				12 Unit	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	756.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD							
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				30 Paket	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD							
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				10 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1186 Orang	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				719 Satuan Pendidikan	13.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	11.750.517.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun</i>				5 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				21 Peserta Didik	2.996.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan							
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia</i>				10 Paket	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				21 Satuan Pendidikan	1.418.034.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>				21 Satuan Pendidikan	4.186.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Unit	499.986.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				600 Peserta Didik	599.998.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				1 Unit	49.998.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3,	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	<i>Prosentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal</i>	-			0,30 %	0,00	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-			-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun</i>				0 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4,	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<i>Guru TersertifikasiRatio Guru/murid sekolah pendidikan dasar</i>	-			64 %8 %	19.620.319.460,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	19.620.319.460,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				0 Dokumen	7.166.201.080,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				0 Laporan	12.454.118.380,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
5,	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-			-	200.000.000,00	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				300 Peserta Didik	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.652.500.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						8.652.500.000,00	
1,	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<i>Prosentase Wirausaha Muda</i>	-			38 %	1.772.500.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	1.522.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</i>				120 Orang	535.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan</i>				0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda							
			<i>Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan</i>				140 Orang	987.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2,	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	-			32 %	6.530.000.000,00	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan							
			<i>Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan</i>				2000 Orang	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan</i>				40 Orang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	4.630.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan</i>				2 Dokumen	4.480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>				1 Organisasi	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</i>				0 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3,	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	<i>Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah</i>	-			40 %	350.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah							
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah							
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
J U M L A H								617.091.363.400,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN

**KABUPATEN
BANJARNEGARA
TAHUN 2024**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dapat tersusun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, dan Rencana Kerja dan pendanaan serta penutup.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja dimaksud.

Banjarnegara, Juli 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA



dr. LATIFA HESTI PURWANINGTYAS, M. Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19720128 200212 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	57
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	59
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD	62
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..	99
2.6. PENELAAHAN USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	101
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	102
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	102
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	102
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	103
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	125
BAB V	
PENUTUP	145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan akhir RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara juga wajib menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan diKabupaten/Kota;
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kab/Kota
 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Bidang Kesehatan

Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Bangunan, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang belum sesuai standar
2. Pemenuhan standar mutu pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum optimal sesuai standar kebutuhan sasaran
3. Kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga serta akses ke lokasi fasyankes untuk melakukan pemeriksaan persalinan sesuai standar
4. Kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait kebutuhan balita terhadap pelayanan kesehatan standar
5. Kurangnya optimalnya deteksi dini pada anak kelompok sasaran
6. Kurang maksimalnya penyuluhan dan screening kesehatan pada anak remaja usia sekolah maupun usia produktif kerja
7. Banyak masyarakat yang tidak menyadari sudah terkena Hipertensi sehingga tidak melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan maupun nakes
8. Persepsi / Stigma negatif pada penderita HIV dan keluarga sehingga menyebabkan masyarakat malu untuk melakukan pengobatan HIV dan sering berpindah tempat tinggal /lokasi
9. Persepsi / stigma negatif kepada penderita TB sehingga masyarakat cenderung malu untuk memeriksakan penyakit TB maupun pengobatannya serta masih kurangnya kegiatan

perkesmas dari puskesmas dan pengobatan TB yang relatif lama dan panjang

10. Persepsi / stigma negatif masyarakat terhadap keluarga yang memiliki ODGJ

11. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi stakeholder

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya kebijakan persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan minimal ditangani oleh dua orang tenaga kesehatan
2. Adanya kebijakan pelaksanaan Program Posyandu Lansia di masing-masing wilayah desa / kelurahan
3. Adanya peningkatan pelaksanaan Program Prolanis di FKTP maupun dokter keluarga dan Program Posbindu baik di desa, kelurahan, instansi swasta maupun instansi negeri
4. Dukungan stakeholder dalam penyusunan dan menetapkan kebijakan di tingkat Kabupaten
5. Penanganan kasus gizi buruk sesuai dengan tata laksana penanganan kasus, antara lain pemberian PMT, Pemberian PMT, pemberian suplemen gizi, juga dilaksanakan Kelas Balita Gizi Buruk, Kelas Ibu Menyusui, dan Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) bagi tenaga kesehatan dan Kader Posyandu
6. Karena Akreditasi merupakan kewajiban RS dan FKTP untuk dapat bekerjasama dengan BPJS

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka apabila faktor-faktor penghambat tercapainya kinerja tidak segera diselesaikan dapat mengakibatkan permasalahan kesehatan yang lebih besar lagi. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Pembangunan Rumah Sakit baru di wilayah Kabupaten Banjarnegara

2. Peningkatan dukungan stakeholder dan lintas program dalam pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan yang terpadu dan terintegritas dengan BPJS sehingga pencatatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lebih tertata rapi
4. Penambahan pada kegiatan screening kesehatan pada anak sekolah, remaja, usia produktif baik melalui deteksi dini
5. Peningkatan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat terkait dengan permasalahan kesehatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2023* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)	(11)=10/9
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja instansi kategori baik (Nilai 75-100%)	80%	-	-	-	-	75%	35%	46,6%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah rancangan dokumen perencanaan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	8 dok	66,6%
		jumlah rancangan dokumen pelaporan	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	100%	14 dok	9 dok	64,2%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	100%	14 dok	9 dok	64,2%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	65%
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	65%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40 Laporan	-	-	-	-	39 lap	39 lap	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	15 SDM	7 SDM	7 SDM	8 SDM	100%	30 SDM	101 SDM	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD Disediakan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	110 paket	-	-	-	-	80 paket	30 paket	37,5%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya pembayaran telpon, listrik dan air minum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji dan tunjangan PTT dan THL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung	terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kantor dan Bangunan Lainnya									
	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria sarana, prasarana, Alat Kesehatan sesuai standar peraturan perundang undangan yang berlaku	85%	-	-	-	-	80%	25,7%	32,1%
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	86,9%	87%	87%	100%	100%	46%	46%
		Persentase Ibu bersalin yang	100%	97,9%	96%	97,7%	101%	100%	49.3%	49.3%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)								
		Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	99,1%	99%	98,8%	99,7%	100%	49.9%	49.9%
		Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	79,1%	79%	79,3%	100,4%	100%	53.5%	53.5%
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	56,2%	65%	86,7%	133%	100%	40.4%	40.4%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	50,57%	60 %	65,79 %	110%	100%	42.2%	42.2%
		Persentase Balita Gizi buruk tertangani (RPJMD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM (RPJMD)	8%	6,8%	7%	14,03%	200%	7%	14,03%	100%
		Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat Kesehatan	60%	100%	40%	87,59%	219%	55%	46%	83.6%
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang	100%	56,3%	65%	86,7%	133%	100%	40.4%	40.4%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)								
		Persentase kesehatan kerja baik sektor formal maupun informal yang dibina	96%	94%	95%	95%	100%	93.5%	92%	98.4%
		Persentase kelompok olahraga masyarakat yang dibina	95%	94%	95%	95%	100%	92.5%	92%	99.5%
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	35,17%	100%	76%	76%	100%	46.6%	46.6%
		Persentase Orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	31%	100%	70%	70%	100%	42.9%	42.9%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71.3%	71.35
		Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	65,2%	100%	90%	90%	100%	66%	66%
		Persentase Terduga TB Paru yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	51,9%	100%	100%	100%	100%	78.4%	78.4%
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	96,2%	100%	100%	100%	100%	58.7%	58.7%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	73%	98%	100%	102%	100%	0%	0%
		Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun (RPJMD)	4 kasus	4 kasus	4 kasus	5 kasus	125 %	4 kasus	5 kasus	100%
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	75%	-	-	-	-	73%	-	-
		Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna	14%	-	-	-	-	6%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase ketersediaan obat esensial	100%	100%	100%	96%	96%	100%	100%	100%
		Persentase Puskesmas yang mengalami peningkatan IKS	14%	-	-	-	-	11%	5,7%	51,8%
	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase puskesmas dengan bangunan memenuhi standar</i>	37,5%	35%	45%	28,6%	63,5%	35%	28,6%	81,7%
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pembangunan puskesmas	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0	%
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 unit	-	2 unit	2 unit	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 unit	0%	9 unit	8 unit	89%	0%	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 unit	0%	0	0	0%	10 unit	0 unit	0%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	0%	4	4	100%	3 unit	0 unit	0%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 unit	0%	0	0	0%	5 unit	0 unit	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standard	85%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terpenuhinya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100%	-	100%	33%	33%	100%	0%	0%
	Pengadaan Obat, Vaksin	Terpenuhinya Pengadaan obat dan vaksin sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terpenuhinya Pengadaan bahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		habis pakai sesuai standar								
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Ketepatan waktu distribusi obat dan BMHP ke Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	253.600 KK	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat</i>	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4	100%	87%	100%	88%	88%	100%	46%	46%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Daerah Kabupaten/ Kota</i>									
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	99,9%	99,8%	99,8%
		Cakupan pertolongan pesalinan dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	97,7%	100%	97%	97%	98,5%	49,3%	50%
		Cakupan pelayanan nifas	100%	92,1%	100%	92%	92%	92%	46,2%	50,2%
		Cakupan KN3	100%	99,1%	100%	98,8%	98,8%	100%	49,9%	49,9%
		Persentase Puskesmas santun lansia	30%	-						
		Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S)	90,3%	59,6%	90%	77,2%	85,7%	85,5%	73,69%	86%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Cakupan Balita yang naik berat badannya (N/D)	65%	54,9%	90%	61,33%	68,1%	60%	49,74%	82,8%
		cakupan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri	80%	88,4%	80%	81,79%	100%	88%	54,8%	62,2%
		Persentase Ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT	96%	99,2%	98%	96,1%	98,1%	95%	97,62%	102%
		Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil	100%	100%	100%	86,5%	86,5%	100%	77,45%	77,45%
		Puskesmas mampu tata laksana gizi buruk	15%	0,02%	10%	2,86%	2,86%	10%	2,86%	2,86%
		Persentase anak sekolah memiliki buku raport kesehatanku dan atau lembar pemantauan anak sekolah	10%	-	3%	1,7%	56,6%	5%	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Penduduk akses jamban sehat	85%	75,4%	75%	75%	100%	80%	100%	100%
		Persentase Penduduk Akses air minum berkualitas	92%	90%	100%	90%	90%	90%	84,61%	94%
		Persentase Desa/kel ODF	60%	49,48%	60%	47,48%	79%	50%	100%	100%
		Persentase TFU yang dibina	60%	45%	40%	20%	50%	55%	50%	91%
		Persentase puskesmas yang telah menerapkan K3 baik sektor formal maupun informal	70%	-	55%	10%	18%	65%	60%	92,3%
		Persentase kegiatan kesehatan olahraga yang terbentuk pada kelompok masyarakat di wilayahnya	70%	-	55%	12%	21,8%	65%	61%	93,8%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase kasus HIV yang diobati	85%	85,9%	80%	86,5%	108,1%	80%	42%	52,5%
		Persentase Pengobatan standar kasus malaria positif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Proporsi Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase puskesmas yang mempunyai posbindu desa/kel aktif minimal 75% di wilayahnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase puskesmas yang menyelenggarakan	90%	37,4%	50%	42,8%	5%	50%	42,8%	42,8%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pelayanan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan metode IVA								
		Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian ODGJ Berat	60%	6%	30%	17%	11%	50%	45,71%	45,71%
		Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada bayi (IDL)	95%	80,6 %	95 %	97,3 %	102 %	100 %	44 %	44 %
		Persentase vaksinasi Anak Sekolah	98%	93 %	98 %	96 %	98 %	98 %	Belum ada realisasi	0%
		Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa	4 kasus	4 kasus	4 kasus	5 kasus	125 %	4 kasus	5 kasus	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan usia dibawah 15 tahun								
		Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 (tidak ada KLB)	100 %
		Persentase calon jamaah haji tervalidasi di siskohat	100%	0 % (tidak ada haji)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama	43%	-	-	-	-	29%	28,6%	98,6%
		Persentase Klinik terakreditasi	18%	-	-	-	-	12%	0%	0%
		Persentase Laboratorium Kesehatan terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas pelayanan	78%	-	-	-	-	69%	75,8%	109,8%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kesehatan yang menyelenggarakan dan melaporkan penerapan Indikator Nasional Mutu (INM)								
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan insiden keselamatan pasien (IKP) pada aplikasi mutu Fasilitas pelayanan kesehatan	78%	-	-	-	-	69%	74,1%	107,3%
		Persentase fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelayanan telemedicine	42%							
		Persentase kasus gawat darurat pra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		rumah sakit yang tertangani								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.500 Ibu Hamil	86,9%	14.563	12.619	86,7%	15.000	6.900	46%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.900 Ibu Bersalin	97,9%	14.011	14.338	97,7%	14.338	7.068	49,3%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.700 BBL	99,1%	12.835	12.990	98,8%	12.990	6.482	49,9%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	61.000 Balita	79,1%	56.896	62.950	90,4%	62.000	33.170	53,5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kesehatan Sesuai Standar								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.000 anak	56,25%	119.329	137.671	86,7%	75.892	30.660	40,4%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Presentase Penduduk Usia Produktif (15-59) tahun yang mendapatkan skrining PTM Prioritas	672.323	31%	500.930	667.772	75%	467.440	200.532	42,9%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142.400 lansia	50,57%	96.086	134.118	71,6%	137,217	57,905	42,2%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase Penduduk Usia lebih dari 15 tahun yang mendapatkan pelayanan Hipertensi sesuai standar	325.624	35,17%	260.536	325.625	80%	247,475	115,376	46,6%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persentase Penduduk Usia lebih dari 15 tahun yang mendapatkan pelayanan Diabetes Mellitus sesuai standar	15.765	100%	15.765	15.765	100%	15,765	11,244	71,3%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	persentase penduduk usia>15 th dg risiko masalah keswa yg mndapatkan skrining keswa	2.997	65,2%	2.697	2.997	90%	2,697	1,781	66%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	10.525 orang	51,9%	10.639	10.639	100%	10,639	7,989	78,4%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Terduga Tuberkulosis	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18.879 Orang	96,2%	18.631	18.631	100%	18,715	10.985	58,7%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengadaan suplemen gizi (PMT)	1 paket	-	1 paket	0	0%	1 paket	1 paket	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya distribusi paket suplemen gizi (PMT) ke 35 UPT Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		Terlaksananya Pertemuan Tim GP2SP Kabupaten Banjarnegara	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	5 Dokumen	83,3%
		Jumlah Pembangunan Jamban Sehat	760 unit	80 unit	10 unit	10 unit	100 %	1.224 unit	206 unit	16,8%
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	20 Fasyan kes	-	-	-	-	14 fasyankes	8 fasyankes	60%
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang	44 Fasyan kes	40 fasyankes	40 fasyankes	40 fasyankes	100%	42 fasyankes	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terakreditasi di Kabupaten/Kota								
	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	<i>Persentase jaringan sistem informasi Puskesmas secara intranet dan internet</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	12 dokumen	10 dokumen	80%
	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>									
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	60 fasyankes	-	-	-	-	58 fasyankes	44 fasyankes	76,8%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar								
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60 fasyankes	-	-	-	-	58 fasyankes	44 fasyankes	76,8%
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase terpenuhinya puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	70%	54,3%	60%	63%	105%	65%	71,4%	91%
		Persentase puskesmas yang memiliki dokter	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rumah Sakit yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Fasyankes yang sudah menyusun perencanaan kebutuhan SDMK sesuai Anjab dan ABK</i>	100%	43%	50%	60%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes yang sudah melakukan update data pada aplikasi rencana kebutuhan SDMK	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	jumlah 9 nakes strategis	273 Orang	-	252 orang	262 orang	100%	262 Orang	216 orang	82,4%
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah nakes yang memiliki STR dan SIP aktif	2.000 nakes	88,2%	2.500	2.292	91,7%	3.089	2.913	94,3%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	100 orang	100 orang	100 orang	101 orang	100%	100 orang	120 orang	120%
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang melaksanakan kegiatan pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57%	57%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kefarmasian sesuai standar								
		Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT	100%	96%	100%	100%	100%	100%	44%	44%
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memperoleh Sertifikat Laik syarat kesehatan	45%	35%	35%	32%	91,4%	40%	44,8%	112%
	<i>Pemberian Izin Apotek. Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina sesuai peraturan perijinan yang berlaku</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57%	57%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT	80 ... DOKUMEN	65 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	100	75 Dokumen	38 Dokumen	50%
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80 ... SARANA	65 sarana	70 sarana	70 sarana	100	75 sarana	38 sarana	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)-- yankes	Jumlah Fasilitasi yang melakukan Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)--yankes	85 .. SARANA	65 sarana	70 sarana	70 sarana	100	75 sarana	38 sarana	50%
	<i>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</i>		-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10 ... DOKUMEN	-	4	3	75%	4	1	25%
	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh</i>		-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Industri Rumah Tangga</i>									
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemberian Sertifikat PIRT	100 sertifikat	100 sertifikat	100 sertifikat	100 sertifikat	100%	100 sertifikat	57 sertifikat	57%
	<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa</i>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>									
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Jumlah Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100 Sertifikat	100 sertifikat	100 sertifikat	100 sertifikat	100%	100 sertifikat	114 sertifikat	114%
	<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar	Jumlah sampel makanan yang dilakukan pengujian	25 UNIT	23 Sampel	25 Sampel	31 Sampel	125%	25 Sampel	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri	40%	24,8%	30%	27%	90%	30%	27%	90%
		Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga strata utama- paripurna tingkat kabupaten	92%	83,3%	85%	87,1%	102,5%	90%	87%	96%
		Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) institusi pendidikan	91%	88,6%	80%	87%	108,8%	90%	83%	92%
	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran</i>	<i>Persentase Regulasi Bidang Kesehatan yang ditetapkan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>									
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase puskesmas melaksanakan penyuluhan menggunakan media cetak dan elektronik</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase capaian Posyandu Strata Purnama - Mandiri</i>	87%	82,65%	70%	92%	131,42%	85%	83%	97,6%
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan pelayanannya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mengampu 14 Indikator Kinerja Kunci dan SPM .

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pada Tahun 2022, berdasarkan target yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2017 – 2022 maka 4 (Empat) indikator berstatus tercapai sesuai target renstra yaitu :

- 1) Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi,
- 2) Persentase orang dengan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(RPJMD SPM),
- 3) Persentase Orang dengan Terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (SPM)
- 4) Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM)

Sedangkan 8 (Delapan) indikator berstatus tidak tercapai sesuai target Renstra yaitu :

- 1) Rasio daya tampung rumah sakit rujukan
- 2) Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (SPM),
- 3) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM),
- 4) Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
- 5) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)

- 6) Persentase Orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
- 7) Persentase orang dengan penyakit HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RPJMD SPM)
- 8) Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)

Faktor - faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian indikator tersebut antara lain adalah:

1. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman.
2. Pelaksanaan ANC terpadu yang belum dapat berjalan optimal dikarenakan belum semua fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM yang melaksanakan ANC terpadu selain Puskesmas
3. Tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi
4. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah
5. Belum optimalnya dukungan Kebijakan Kesehatan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan jenis dan mutu pelayanan
6. Belum optimalnya Kerjasama Lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan
7. Mutu dan akses pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan yang masih terbatas

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Advokasi peningkatan daya tampung rumah sakit rujukan
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan kesehatan untuk mendukung tercapainya kinerja

3. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hisap bersih dan sehat melalui pendidikan dan pemberdayaan kesehatan
4. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan baik penyakit menular, tidak menular, wabah dan krisis masalah kesehatan
5. Melaksanakan pembinaan atau pengawasan mutu pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan
6. Melaksanakan upaya pemenuhan/pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
7. Melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan obat esensial, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan
8. Melaksanakan upaya perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan
9. Melaksanakan upaya peningkatan perencanaan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program
10. Melaksanakan optimalisasi pencatatan dan pelaporan antar fasilitas pelayanan kesehatan secara terpadu
11. Meningkatkan optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), dan hasil yang diharapkan (outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu urusan, yaitu Bidang Kesehatan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup satu urusan tersebut.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah Kualitas layanan kesehatan masih belum optimal.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Meningkatnya Angka Kematian Ibu
2. Meningkatnya Angka Kematian Bayi
3. Meningkatnya Angka Kematian Balita
4. Meningkatnya Balita Stunting
5. Meningkatnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular
6. Akses dan Pelayanan kesehatan tidak dapat optimal
7. Perilaku Hidup bersih dan sehat di masyarakat rendah
8. Meningkatnya penyakit berbasis lingkungan akibat akses dan kualitas kesehatan lingkungan yang rendah
9. Mutu dan Akses pelayanan kesehatan tidak sesuai standar dan tidak dapat dijangkau masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Adanya tantangan yaitu pelayanan kesehatan yang cepat, mudah dan terjangkau di era digital

2. Banyak karya inovatif yang telah di prakarsai oleh rekan-rekan puskesmas di ajang kompetensi Nasional Pelayanan Publik, inovasi-inovasi tersebut telah di tetapkan sebagai bagian dari *agen of change dan role model* dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara
3. Dukungan Kebijakan stakeholder

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan keluarga (ibu hamil, bersalin, bayi, balita, anak, remaja hingga lansia (terutama SPM) dan gizi masyarakat
2. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan lingkungan
3. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan tidak menular (terutama SPM).
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum optimal
5. Belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat
6. Belum terpenuhinya standar pelayanan di puskesmas dan rumah sakit
7. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
8. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.

9. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan, dan mutu terhadap pelayanan kesehatan baik aspek promosi, pencegahan, dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA		Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang ditetapkan	100%	121.777.629	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang ditetapkan	100%	121.777.629	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan yang tersusun	100%	120.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan yang tersusun	100%	120.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8 Laporan	45,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8 Laporan	45,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	75,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	75,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				118.178.154	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				118.178.154	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.215	117,749,794	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.215	117,749,794	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi				364.000	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi				364.000	

No	Rancangan Akhir RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kasi Keuangan SKPD					Keuangan SKPD					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		15.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		15.000	

No	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				130.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				130.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				30.000					30.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				505.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah				505.750	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				350.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				350.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				605.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				605.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 PAKET	80.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 PAKET	80.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Lainnya					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	10.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	200,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	200,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,171,993	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,171,993	

No	Rancangan Akhir RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		871.993	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		871.993	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				899.131	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				899.131	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan				30,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan				30,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				442.611	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				442.611	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000	
	Pemeliharaan/R ehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50,000	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50,000	

No	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/R ehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				285.000	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				285.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				97.204.212	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				97.204.212	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan				51.920.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah				51.920.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten/Ko ta					
	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	16.750.000	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	16.750.000	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 UNIT	750.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 UNIT	750.000	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 UNIT	500.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 UNIT	500.000	
	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan	1 UNIT	400.000	Pengembanga n Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan	1 UNIT	400.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			
	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	14.000.000	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	14.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	2 Unit	3.900.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	2 Unit	3.900.000	

No	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemeliharaan Oleh Puskesmas					Pemeliharaan Oleh Puskesmas			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	750.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	750.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	1.150,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	1.150,000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas				1.950.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas				1.950.000	

No	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Kesehatan					Pelayanan Kesehatan					
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.565.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.565.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah alat kesehatan wajib kalibrasi yang terkalibrasi	1 PAKET	180,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah alat kesehatan wajib kalibrasi yang terkalibrasi	1 PAKET	180,000	
	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	6.400,000	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	6.400,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 PAKET	3,500,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 PAKET	3,500,000	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 PAKET	9.500,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 PAKET	9.500,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga	253.600 KK	30.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga	253.600 KK	30.000	

No	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kesehatan Puskesmas					Kesehatan Puskesmas			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				44.884.212	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta				44.884.212	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.500 Ibu Hamil	195.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.500 Ibu Hamil	195.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.900 Ibu Bersalin	405.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.900 Ibu Bersalin	405.000	
	Pengelolaan Pelayanan		Jumlah Bayi Baru Lahir yang	14.700 BBL	80.000	Pengelolaan Pelayanan		Jumlah Bayi Baru Lahir yang	14.700 BBL	80.000	

No	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kesehatan Bayi Baru Lahir		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Kesehatan Bayi Baru Lahir		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.000 Balita	55.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.000 Balita	55.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasa		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.000 anak	300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasa		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.000 anak	300.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Presentase Penduduk Usia Produktif (15-59) tahun yang mendapatkan skrining PTM Prioritas	672.323	300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Presentase Penduduk Usia Produktif (15- 59) tahun yang mendapatkan skrining PTM Prioritas	672.323	300.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142.400 lansia	100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142.400 lansia	100.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi		persentase Penduduk Usia lebih dari 15 tahun yang mendapatkan pelayanan Hipertensi sesuai standar	325.624	90.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi		persentase Penduduk Usia lebih dari 15 tahun yang mendapatkan pelayanan Hipertensi sesuai standar	325.624	90.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus		persentase Penduduk Usia lebih dari 15 tahun yang mendapatkan pelayanan Diabetes Mellitus sesuai standar	15.765	115.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus		persentase Penduduk Usia lebih dari 15 tahun yang mendapatkan pelayanan Diabetes Mellitus sesuai standar	15.765	115.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		persentase penduduk usia>15 th dg risiko masalah keswa yg mndapatkan skrining keswa	100% 2.997	135.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		persentase penduduk usia>15 th dg risiko masalah keswa yg mndapatkan skrining keswa	100% 2.997	135.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10.525 orang	3,657.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10.525 orang	3,657.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18.879 Orang	680.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18.879 Orang	680.000	
	Pengelolaan Pelayanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	6 Dokume n	973.312	Pengelolaan Pelayanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	6 Dokume n	973.312	

No	Rancangan Akhir RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	150.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	150.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	265.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	265.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	5.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	5.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Surveilans Pengelolaan Pelayanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokume n	301.650	Pengelolaan Surveilans Pengelolaan Pelayanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokume n	301.650	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Terlaksananya PE dan pelacakan kontak erat pada penderita DBD	100 %	400.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Terlaksananya PE dan pelacakan kontak erat pada penderita DBD	100 %	400.000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokume n	34.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokume n	34.000.000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokume n	2.000.000	Penyelenggara an Kabupaten/Ko ta Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokume n	2.000.000	
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20 Fasyan kes	100.000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	57 Unit	100.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Kesehatan		(Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			Pelayanan Kesehatan		(Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	44 Fasyan kes	350.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	44 Fasyan kes	350.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase puskesmas memiliki jaringan sistem informasi Puskesmas secara intranet dan internet	100 persen	70,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase puskesmas memiliki jaringan sistem informasi Puskesmas secara intranet dan internet	100 persen	70,000	

No	Rancangan Akhir RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokume n	70,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokume n	70,000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				400.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta				400.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan	60 fasyanke s	25,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan	60 fasyanke s	25,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kesehatan Lainnya		Tata Kelola Sesuai Standar			Pelayanan Kesehatan Lainnya		Tata Kelola Sesuai Standar			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60 fasyanke s	200,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60 fasyanke s	200,000	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokume n	175,000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokume n	175,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.920.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.920.000	

No	Rancangan Akhir RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				55,000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				55,000	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		jumlah 9 nakes strategis	315 nakes	30.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		jumlah 9 nakes strategis	315 nakes	30.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		jumlah 9 nakes strategis	315 nakes	15.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		jumlah 9 nakes strategis	315 nakes	15.000	
	Pembinaan dan Pengawasan		jumlah nakes yang memiliki	2000 nakes	10.000	Pembinaan dan		jumlah nakes yang memiliki	2000 nakes	10.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sumber Daya Manusia Kesehatan		STR dan SIP aktif			Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		STR dan SIP aktif			
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.865.000	Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta				1.865.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM yg meningkat kompetensinya	200 pegawai	1.865.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM yg meningkat kompetensinya	200 pegawai	1.865.000	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				140.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				140.000	

No	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				70.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				70.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				30.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				30.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan				30.000	Penyediaan dan				30.000	

No	Rancangan Akhir RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				10.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				10.000	

No	Rancangan Akhir RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu		Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1	1 DOK	15,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan		Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1	1 DOK	15,000	

No	Rancangan Akhir RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perusahaan Rumah Tangga		Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				20.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				20.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak		Jumlah Pemberian Sertifikat PIRT	100	20,000	Pengendalian dan Pengawasan		Jumlah Pemberian Sertifikat PIRT	100	20,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)					Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan					

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100 Sertifikat	10.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot		Jumlah Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100 Sertifikat	10.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Air Minum (DAM)					
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak		Jumlah sampel makanan yang dilakukan pengujian	25 UNIT	25.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak		Jumlah sampel makanan yang dilakukan pengujian	25 UNIT	25.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lanjut Pengawasan					Lanjut Pengawasan					
	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				685.000	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				685.000	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000	Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta				100.000	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan		100.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan		100.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Masyarakat		Pemberdayaan Masyarakat			Pemberdayaan Masyarakat		Pemberdayaan Masyarakat			
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				350.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				350.000	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		350.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		350.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya				235.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber				235.000	

No	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta					
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		235.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		235.000	
					221.814.341					221.814.341	

Berdasarkan rancangan akhir RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Pentingnya Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi dan usia lanjut
2. Pentingnya Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi
3. Pentingnya Meningkatnya mutu sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman yang memenuhi syarat kesehatan
4. Pentingnya Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Internal Puskesmas sebagai Tempat Kerja
5. Pentingnya Peningkatan Preventif, promotif dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan
6. Pentingnya Penguatan dan Peningkatan pengendalian penyakit
7. Pentingnya Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
8. Pentingnya Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
9. Pentingnya Perencanaan, Distribusi dan Pemenuhan serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
10. Pentingnya Pemenuhan dan peningkatan kualitas farmasi dan alat kesehatan
11. Pentingnya Meningkatkan Implementasi sistem akuntabilitas
12. Pentingnya Meningkatkan nilai indek kepuasan masyarakat

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan:				
1.	Pembangunan Puskesmas	Pagentan	Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria sarana, prasarana, Alat Kesehatan sesuai standar peraturan perundang undangan yang berlaku	1 unit	Sebagai puskesmas sebagai Pusat pelayanan kepada masyarakat tidak layak, banyak kerusakan bangunan, Lokasi Sempit, tidak terdapat lokasi parkir, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak Optimal (Prima)
2.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Wanayasa	Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria sarana, prasarana, Alat Kesehatan sesuai standar peraturan perundang undangan yang berlaku	1 unit	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Puskesmas I Wanayasa
		Purworeja Klampok	Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria sarana, prasarana, Alat Kesehatan sesuai standar peraturan perundang undangan yang berlaku	1 unit	rumah dinas tenaga kesehatan belum ada yang representatif
		Purworeja Klampok	Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria sarana, prasarana, Alat Kesehatan sesuai standar peraturan perundang undangan yang berlaku	1 unit	kondisi bangunan puskesmas klampok 2 rusak, membutuhkan perluasan bangunan dan relokasi

2.6. PENELAAHAN USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan:				
1.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Hibah kepada Forum Masyarakat Peduli (FMPK) Desa Kutayasa Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara	?	1 unit	dibutuhkannya kendaraan operasional
		Pemindahan dan pembangunan Puskesmas Wanadadi 2 Kab. Banjarnegara	Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria sarana, prasarana, Alat Kesehatan sesuai standar peraturan perundang undangan yang berlaku		Pemindahan dan pembangunan Puskesmas Wanadadi 2

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia ke depan. Pada agenda ke 3 Pembangunan Nasional; meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; sektor kesehatan harus focus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Strategi yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, dan KB dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, serta penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Berdasarkan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2024 yakni “Pemantapan kondusivitas wilayah untuk mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pertanian” dengan prioritas yang didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah “Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada “Meningkatkan kesehatan keluarga

dan gizi masyarakat” dan “Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan”

Dalam rangka mencapai tujuan daerah tersebut maka ditetapkan sasaran daerah dalam bidang kesehatan yaitu :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Pelayanan Publik

Maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Meningkatkan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
3. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Dalam rangka tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan Kualitas sistem akuntabilitas kinerja yang baik
3. Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Program dan Kegiatan Usulan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9) Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia
 - 1) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2) Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)
 - 2) Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 - 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
 - 4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)
 - 5) Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 6) Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

MUSRENBANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (RENJA OPD) DINAS KESEHATAN KAB.
BANJARNEGARA
TAHUN
2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						221.000.000.000,00							323.980.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN						221.000.000.000,00							323.980.000.000,00	
	-	-						221.000.000.000,00							323.980.000.000,00	
1.	-	-	-	-			-	120.730.788.000,00						-	168.315.000.000,00	
	-	-	-	-			-	365.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	365.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	350.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	120.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	45.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	117.889.203.600,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	165.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1292 Orang/bulan	117.500.203.600,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		165.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	364.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		370.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	15.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-	-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	130.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-	-	130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	100.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	365.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	365.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	790.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	685.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	80.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	25.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	285.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	1.071.584.400,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	1.120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	871.584.400,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		900.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	350.000.000,0 0			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	475.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	30.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	150.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		150.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	20.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		20.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		75.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		200.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
2.	-	-	-	-			-	97.274.212.000, 00						-	152.900.000.000, 00	
	-	-	-	-			-	51.890.000.000,0 0			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	104.780.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				4 Unit	16.750.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava Saing	-		20.000.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	750.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara , Sigaluh, Sawal	DBH CUKAI HASIL TEMDAKA U (CHT)	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		3.000.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	500.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Sigaluh, Sigaluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		1.500.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	400.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		38.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	14.000.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semarang - Kab. Banjarnegara	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3.900.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Unit	1.150.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	750.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	1.950.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			-				-	1.565.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				35 Unit	180.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-B OK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	6.400.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		6.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	3.500.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan				1 Paket	95.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-B OK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	44.914.212.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	47.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				253.600 Keluarga	30.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14.500 Orang	195.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK_DAK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava Saing	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14.900 Orang	405.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK_DAK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava Saing	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14.700 Orang	80.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61.000 Orang	55.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85.000 Orang	300.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				560.000 Orang	300.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				142.400 Orang	100.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai				595.000 Orang	90.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700000 Orang	115.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2.997 Orang	135.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				525.000 Orang	3.657.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK_DAK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18.879 Orang	680.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				6 Dokumen	227.250.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	973.312.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	265.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	301.650.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-R	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	400.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	34.000.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		35.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat				6 Dokumen	2.000.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		2.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses				20 Unit	100.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota				44 Unit	350.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	400.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan				48 Unit	25.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan				60 Unit	200.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		250.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				2 Dokumen	175.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		200.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
3.	-	-	-	-			-	1.920.000.000,00						-	1.930.000.000,00	
	-	-	-	-			-	55.000.000,0 0			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	65.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				15 Dokumen	30.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		35.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				315 Orang	15.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				9 Dokumen	10.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	1.865.000.000,0 0			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-	-	1.865.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				200 Orang	1.865.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		1.865.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
4.	-	-	-	-			-	140.000.000,00						-	150.000.000,00	
	-	-	-	-			-	70.000.000,0 0			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	75.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				6 Dokumen	30.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat				50 Sarana	30.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				50 Sarana	10.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	10.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,				6 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	25.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				25 Unit	25.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	-	-	-	-			-	935.000.000,00						-	685.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	350.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	350.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	350.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	350.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	235.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	235.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
6.	-	-	-	-			-	140.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	15.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-B OK	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	20.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-B OK	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
7.	-	-	-	-			-	97.274.212.000,00						-	152.900.000.000,00	
	-	-	-	-			-	70.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
8.	-	-	-	-			-	120.730.788.000,00						-	168.315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	120.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	75.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H							221.000.000.000,00							323.980.000.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di
Sebagai berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA
OPD) DINAS KESEHATAN KAB. BANJARNEGARA
TAHUN
2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						221.000.000.000,00							323.980.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN						221.000.000.000,00							323.980.000.000,00	
	-	-						221.000.000.000,00							323.980.000.000,00	
1.	-	-	-	-			-	120.730.788.000,00						-	168.315.000.000,00	
	-	-	-	-			-	365.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	365.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	350.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	120.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	45.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	117.889.203.600,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	165.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1292 Orang/bulan	117.500.203.600,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		165.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	364.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		370.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	15.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-	-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	130.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-	-	130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	100.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	365.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	365.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	790.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	685.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	80.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	25.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	285.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	200.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	1.071.584.400,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	1.120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	871.584.400,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		900.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	350.000.000,0 0			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	475.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	30.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	150.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		150.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	20.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		20.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		75.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	-	-	-	-			-	97.274.212.000,00						-	152.900.000.000,00	
	-	-	-	-			-	51.890.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	104.780.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				4 Unit	16.750.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava Saing	-		20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	750.000.000,00	- Kab. Banjarnegara , Sigaluh, Sawal	DBH CUKAI HASIL TEMBAKA U (CHT)	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	500.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Sigaluh, Sigaluh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	400.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		38.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	14.000.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Banjarnegara, Semarang - Kab. Banjarnegara	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3.900.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Unit	1.150.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	750.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	1.950.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			-				-	1.565.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				35 Unit	180.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-B OK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	6.400.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		6.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	3.500.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan				1 Paket	95.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-B OK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	44.914.212.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-	-	47.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				253.600 Keluarga	30.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14.500 Orang	195.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK_DAK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14.900 Orang	405.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK_DAK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14.700 Orang	80.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61.000 Orang	55.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		60.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85.000 Orang	300.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		500.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				560.000 Orang	300.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia	-		350.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				142.400 Orang	100.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai				595.000 Orang	90.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		100.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700000 Orang	115.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia	-		115.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2.997 Orang	135.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				525.000 Orang	3.657.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK_DAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18.879 Orang	680.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				6 Dokumen	227.250.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	973.312.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	265.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	301.650.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-R	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	400.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	34.000.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		35.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat				6 Dokumen	2.000.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		2.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses				20 Unit	100.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota				44 Unit	350.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	400.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan				48 Unit	25.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan				60 Unit	200.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		250.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				2 Dokumen	175.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		200.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
3.	-	-	-	-			-	1.920.000.000,00						-	1.930.000.000,00	
	-	-	-	-			-	55.000.000,0 0			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	65.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				15 Dokumen	30.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		35.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				315 Orang	15.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				9 Dokumen	10.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	1.865.000.000,0 0			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya	-	-	1.865.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				200 Orang	1.865.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		1.865.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
4.	-	-	-	-			-	140.000.000,00						-	150.000.000,00	
	-	-	-	-			-	70.000.000,0 0			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	75.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				6 Dokumen	30.000.000,0 0	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,0 0	DINAS KESEHATAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat				50 Sarana	30.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				50 Sarana	10.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	10.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,				6 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	25.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				25 Unit	25.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	-	-	-	-			-	935.000.000,00						-	685.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	350.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	350.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	350.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	350.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	235.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	235.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
6.	-	-	-	-			-	140.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	15.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan				1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-B OK	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-	-	-			-	20.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-B OK	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
7.	-	-	-	-			-	97.274.212.000,00						-	152.900.000.000,00	
	-	-	-	-			-	70.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-	-	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
8.	-	-	-	-			-	120.730.788.000,00						-	168.315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	120.000.000,00			-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-	-	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	75.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkat a n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdava	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H							221.000.000.000,00							323.980.000.000,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Juli 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA



LATIFA HESTI PURWANINGTYAS

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	35
BAB V PENUTUP	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pekerjaan Umum

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 7 program, 15 kegiatan, dan sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp., dengan fokus utama pada (uraikan prioritas daerah tahun 2022 yang didukung oleh Perangkat Daerah). Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1.
2.
3.
4.
5. (sebutkan permasalahan pembangunan sesuai urusan dalam RKPD Tahun 2022).

Dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.....,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan total

anggaran sebesar Rp.....,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1.
2.
3.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah..... Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1.
2.
3.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1.
2.
3.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021
disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2....
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Pekerjaan umum									
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Survei kepuasan masyarakat			1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3 tahun	3 tahun

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlayannya administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	3 tahun
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlayannya administrasi umum Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	3 tahun
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan sarana dan prasarana dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	3 tahun
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	3 tahun
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah di dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	3 tahun
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berkuealitas								
	Pengelolaan SDA dan	Jumlah								

[illegible]

	dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota									
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik								
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik								
		Jumlah jembatan dalam kondisi baik								
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Persentase tersedianya penyedia jasa kontruksi yang bersertifikat								
	Penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil kontruksi	Jumlah tenaga kerja terampil bersertifikat								
8.	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang diterbitkan								
	Penetapan Rencana	Jumlah								

[illegible]

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu Indikator. Dari indikator tersebut, berstatus tercapai dan indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1.
2.
3.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1.
2.
3.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.....
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase Luas Area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik			76%	76%	80%	82%	98,88 %				
2	Presentase jalan yang memiliki system drainase yang memadai			3,36 %	3,36%	3,36%	3,36%	3,365 %				
3	Prosentase bangunan gedung negara asset daerah yang memenuhi			4,76 %	8,16%	11,56 %	14,96 %	87,07 %				

	standar teknis											
4	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan berkualitas			80%	80,25 %	80,50 %	80,75 %	81,22 %				
5	Prosentase kegiatan pemenuhan kebutuhan penataan ruang			20%	40%	60%	80%	71%				
6	Prosentase terlayannya administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	93,53 %				
7	Prosentase Tersedianya penyedia jasa konstruksi			40%	60%	80%	100%					

	yang bersertifikat											

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan, yaitu Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1.
2.
3.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1.
2.
3.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1.
2.
3.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan

tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1.
2.
3.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1.
2.
3.

Tabel 2

[illegible]

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

- 1.
- 2.
- 3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

	N o	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar negara, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.0 00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar negara, Banjar negara, Semua Kel/De sa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.593.000 .184	
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar negara, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000.00 0	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Banjar negara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar negara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.000.000	
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjar negara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	210.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar negara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar negara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	175.000.000	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar negara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.619.999.816	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar negara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	200.000.000	
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar negara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	150.000.000	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Banjar negara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3.020.000.000	
	2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Banjar negara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.000.000.000	
	3	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Kab. Banjar negara	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	150.000.000	
	4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	300.000.000	

				Rawa yang Disusun		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Banjar negara	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		
	2	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Banjar negara	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	60.000.0 00	
	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	40.000.0 00	
	4	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Banjar negara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1.930.00 0.000	
	5	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Banjar negara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	200.000. 000	
	3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
	1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Persentase Bangunan Gedung Negara Aset Daerah yang Memenuhi Standar Teknis	4.000.00 0.000	
	2	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Persentase Bangunan Gedung Negara Aset Daerah yang Memenuhi Standar Teknis	150.000. 000	
	3	Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	Kab. Banjar negara	Persentase Bangunan Gedung Negara Aset Daerah yang Memenuhi Standar	600.000. 000	

		Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Teknis		
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	1	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	250.000.000	
	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.100.000.000	
	3	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Banjar negara	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1.400.000.000	
	4	Penggantian Jembatan	Kab. Banjar negara	Jumlah Jembatan yang Diganti	4.200.000.000	
	5	Rekonstruksi Jalan	Kab. Banjar negara	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	15.850.000.000	
	6	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Banjar negara	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	15.000.000.000	
	7	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Banjar negara	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya		
	8	Pembangunan Jembatan	Kab. Banjar negara	Jumlah Jembatan yang Dibangun	300.000.000	
	9	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kab. Banjar negara	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	250.000.000	
	10	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Banjar negara	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	200.000.000	
	11	Rehabilitasi Jalan	Kab. Banjar negara	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	500.000.000	
	12	Pelebaran Jembatan	Kab. Banjar negara	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan		
5		PROGRAM PENGEMBANGAN				

		JASA KONSTRUKSI				
	1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. Banjar negara	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50.000.000	
	2	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. Banjar negara	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	150.000.000	
6		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				
	1	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	850.000.000	
	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kab. Banjar negara	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	150.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000	

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

(Isikan prioritas pembangunan dalam RKP yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Lalu sajikan juga kebijakan dalam Renja K/L).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

(Isikan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian RPD).

3.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di

Sebagai berikut

(mengacu pada bab 5 RKPD)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2023

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Banjarnegara

YUSUF WINARSONO, ST.,MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 197105071988031007

RANCANGAN AWAL (RANWAL)
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Rencana kerja DPKPLH Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh DPKPLH sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 89 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusun renja tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan dan bahan usulan kegiatan yang akan dibahas pada forum OPD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024. Hasil dari Musrenbang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah (PD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2024. Dengan adanya Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan DPKPLH Kabupaten Banjarnegara agar lebih terarah, tempat sasaran dan tempat waktu.

Banjarnegara,

2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJARNEGARA



Ir. SINGGIH HARYONO
NIP. 19631223 199203 1 002

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	63
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	64
3.3 Program dan Kegiatan	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
4.1 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	81
4.2 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	82
4.3 Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	85
BAB V PENUTUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 15 program, 26 kegiatan, dan 49 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 21.754.034.400 sesuai dengan KUA PPAS dengan memperhatikan kas daerah yang tersedia di Kabupaten Banjarnegara. Fokus utama pada Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar meliputi infrastuktur Sarana Air Bersih dan Limbah, Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Program/ kegiatan/ sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih rendahnya rumah tinggal yang dilengkapi dengan sanitasi yang baik
2. Masih terdapat daerah yang kekurangan air bersih di Kabupaten Banjarnegara
3. Masih perlu diadakan relokasi bagi warga korban bencana termasuk relokasi atas tanah dan rumah tinggal yang layak huni, termasuk penyediaan PSU
4. Masih perlunya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
5. Masih belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya
7. Masih belum optimalnya pengelolaan TPS 3R yang ada
8. Masih terdapat daerah yang belum memiliki saluran air limbah sesuai standar kesehatan
9. Masih ditemui limbah industri yang di buang ke sungai, sehingga menyebabkan pencemaran sungai
10. Masih ditemuinya pencemaran air, pencemaran udara dan pencemara tanah.

Dari 15 program, 26 kegiatan, dan 49 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 15 program, 26 kegiatan, dan 49 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 21.754.034.400.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa refocusing, perubahan/ pergeseran yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/ kegiatan/ sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan Fasiliatsi Pemenuhan Ketentuan dan

Kewajiban izin lingkungan dan/ atau Izin PPLH Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Tamsil/ TPP PNS Bulan Desember 2023 dibayarkan/ dicairkan di bulan Januari 2024
 2. Tamsil/ TPP PTT Bulan Desember 2023 dibayarkan/ dicairkan di bulan Januari 2024
 3. Keterlambatan Pengesahan perubahan/ pergeseran anggaran sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan
 4. Rasionalisasi anggaran pengawasan Lingkungan Hidup sehingga target pengawasan Lingkungan Hidup tidak dapat di capai
 5. Refocusing anggaran pada tahun 2023 yang menyebabkan program pengelolaan sampah tidak berjalan dengan optimal
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah (SPM)
3. Kegiatan Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/ kota
4. Kegiatan Perencanaan, Peanganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
5. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
8. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kabupaten/ kota
9. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota (SPM)
10. Kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
11. Progran Kawasan Permukiman
12. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

13. Progran Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan lingkungan hidup
 14. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
 15. Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota
 16. Program Penghargaan Lingkungan hidup untuk masyarakat, Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten / kota
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakcapaian tersebut antara lain adalah:
1. Belum adanya alokasi pendanaan untuk pendataan PSU baik yang dikelola oleh dinas maupun PSU lingkungan oleh pemerintah desa
 2. Kurangnya upaya pengelolaan oleh KPSPAM/BPSPAM/KPP terkait pemeliharaan, pengoprasian dan pengembangan jaringan layanan
 3. Pengelolaan air bersih yang kurang layak dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat dikarenakan tidak adanya BOP
 4. Pelaksanaan pendataan rumah korban bencana sebelum dan sesudah kejadian tidak tepat waktu (SPM)
 5. Meningkatnya volume sampah plastik baik yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun bukan
 6. Masih kurangnya pengelolaan di bidang RTH

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka diperlukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran khususya untuk program SPM dan program diluar SPM, diantaranya:

1. Alokasi pendanaan untuk penyusunan dokumen data dukung SPAM menjadi satu data (SPM)
2. Perlunya pendataan rumah tangga yang sudah terlayani sanitasi dan belum terlayani (SPM)

3. Perlunya percepatan pendataan rumah korban bencana baik yang sudah tertangani maupun belum (SPM)
4. Relokasi wilayah rawan bencana, sehingga perlu dianggarkan anggaran pada tahun 2024 (SPM)
5. Pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dari berbagai aspek yang ada pada kegiatan di lingkungan hidup

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (TW II)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TW II)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		-					-	-	-
1.03	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang									
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		

		yang disusun								
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang					100 Orang		
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/detik					Liter/detik		
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	750 Liter / detik		507 Liter / detik			750 Liter / detik		
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Unit		10 Unit			10 Unit		
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000 SR		1.000 SR			1.000 SR		
1.03.05	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah									

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MÂ³/Hari		1.200 Rumah Tangga			MÂ³/Hari		
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang							
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1-04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dok		7 Dok			7 Dok		
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan			6 Laporan		

1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	125 oraang / bulan		115 orang / bulan			125 oraang / bulan		
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket		1 Paket			1 Paket		
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peket bahan logistik kantor yang disediakan	13 Paket		13 Paket			13 Paket		
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.04.01.2.08.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	22 Unit		22 Unit			22 Unit		
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	36 Laporan		36 Laporan			36 Laporan		

		dan listrik yang disediakan								
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25 Laporan		25 Laporan			25 Laporan		
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit		23 Unit			23 Unit		
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit		2 Unit			2 Unit		
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan									
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dok					Dok		
1-04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten /	1 Dok		1 Dok			1 Dok		

		Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	100 orang		100 orang			100 orang		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	150 Unit Rumah		100 Unit Rumah			150 Unit Rumah		
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan									
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan	1 Lap		1 Lap			1 Lap		

		dan pengembangan perumahan								
1.04.03	Program Kawasan Permukiman									
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman									
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Lap		1 Lap			1 Lap		
1-04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
1-04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha									
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	2.500 Unit Rumah		1.339 Unit Rumah			2.500 Unit Rumah		
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/pere majaan permukiman kumuh	1 Lap		1 Lap			1 Lap		
1-04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data permukiman	1 Dok		1 Dok			1 Dok		

		kumuh yang terverifikasi								
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	25 Ha		25 Ha			25 Ha		
1-04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh									
1-04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota									
1-04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Unit		64 Unit			Unit		
1-04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)									
1-04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									
1-04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi		10 Lokasi			10 Lokasi		
1-04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	Jumlah laporan hasil koordinasi	1 Lap		1 Lap			1 Lap		

	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan								
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Lap		1 Lap			1 Lap		
1-04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
1-04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil									
1-04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi penegmbang perumahan dengan kualifikasi kecil	1 Lap		1 Lap			1 Lap		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota									

2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	3 Dok		3 Dok			3 Dok		
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota									
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	1 Dok		1 Dok			1 Dok		

		Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota									
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten / Kota	5,2 Ha		5,2 Ha			5,2		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dok		20 Dok			20 Dok		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan,									

	Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	18 Lembaga	-	18 Lembaga	-	-	18 Lembaga	-	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat / lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas		18 Entitas			18 Entitas		

2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah									
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	20 Kelompok		20 Kelompok			20 Kelompok		
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dok		1 Dok			1 Dok		
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan	1 Lap		1 Lap			1 Lap		

		sampah melalui pembatasan timbulan sampah								
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	270 Ton		260 Ton			270 Ton		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mampu 35 Indikator. Dari 35 indikator tersebut, 28 berstatus tercapai dan 7 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidak tercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Belum adanya perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dokumen data dukung SPM
2. Sumber air baku mengalami penyusutan debit air bahkan sebagian kering sehingga mempengaruhi kapasitas produksi/layanan
3. Capaian akses layanan air bersih sampai ke tingkat rumah tangga masih rendah
4. Belum adanya pendanaan untuk pendataan PSU baik yang dikelola oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa
5. Belum digantinya lahan kas desa yang dipakai sebagai relokasi, untuk 6 lokasi, baru dapat dilakukan penggantian 3 lokasi
6. Meningkatnya volume sampah plastik dan pengurangan sampah dari sumbernya belum optimal
7. Kurangnya perencanaan proses pengadaan sehingga memakan waktu yang lama
8. Adanya refocusing anggaran sehingga merubah target serta capaian kinerja

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Melakukan evaluasi mengenai program yang akan dilanjutkan di tahun berikutnya
2. Membagi pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan berdasarkan urutan prioritas
3. Mengoptimalkan pengolahan kembali / daur ulang sampah plastik

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023 (SM I)	2024	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	SPM	-	98.3%	100%	100%	100%	95.73%		98.3%	100%	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	SPM		72%	73%	75%	80%	71.99%		72%	73%	
3	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (pelaksanaan dilakukan oleh kementrian PUPR)	SPM		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (Pelaksanaan dilakukan oleh kementriaan PUPR)		IKK	100% 151 unit	100%	100%	100%	100% 51 unit		100%	100%	
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani		IKK	27.67%	55.35%	83.03%	100%	35.90 %		27.67%	55.35 %	
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		IKK	82%	89%	90%	91%	87.13 %		82%	89%	
7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		IKK	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	15 Lokasi			10 Lokasi	10 Lokasi	
8	Persentase jumlah rumah tangga yang Mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	SPM	IKK	98.3%	100%	100%	100%	95.73%		98.3%	100%	
9	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	SPM		72%	73%	75%	80%	71.99%		72%	73%	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten		IKK	67.5	68.5	68.75	69	64.08		67.5	68.5	
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							64.08				
12	Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)							56.9				
13	Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)							82.9				
14	IndeksTutupanHutan/Lahan (40%)							65.2				

15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		IKK	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	23 Dok		20 Dok	20 Dok	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar yang meliputi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman serta Urusan Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2024-2028, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 3 urusan dengan bidang urusan meliputi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman serta Urusan Bidang Lingkungan Hidup tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Masih tingginya RTLH di Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebesar 33.569 unit;
2. Masih terdapatnya kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu seluas 21,79 ha;
3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi);
4. Penurunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur, Konflik kawasan hutan, Keanekaragaman hayati , Penurunan Kualitas Lingkungan dan daya dukung lingkungan terutama ditandai oleh: terjadinya banjir dan gerakan tanah yang berpotensi longsor, meluasnya jumlah lahan kritis, degradasi tingkat kesuburan tanah, kerusakan lahan akibat cara budidaya yang salah, bertambahnya jumlah industri yang berpotensi menghasilkan limbah, menurunnya keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan, menurunnya kualitas air, meningkatnya jumlah timbulan sampah akibat pertumbuhan penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta masih rendahnya budaya dan kepedulian terhadap lingkungan.
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu peningkatan Perizinan dan pengawasan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup , peningkatan peralatan pengukuran dan pemantauan kualitas

lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi) serta peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

6. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (tidak memiliki akses sanitasi dan air minum / air bersih yang berstandar kesehatan)
7. Perlu Kerjasama Lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, RTLH dan Air minum, sanitasi, pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan
8. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pentingnya lingkungan yang bersih bebas polusi, udara, air dan bagaimanamembuang sampah pada tempatnya dan bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Tidak berkurangnya RTLH, dan akan smakin bertambah
2. Menurunnya tingkat kesehatan akibat minimnya air minum/ air bersih dan akses sanitasi yang tidak memadai sesuai standar kesehatan
3. Tidak berkurangnya wilayah permukiman kumuh, dan akan smakin bertambah luas wilayah perkumuhan
4. Pencemaran kualitas air, tanah dan udara smakin meningkat
5. Berkurangnya pengawasan terhadap kajian Lingkungan Hidup

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan inovasi baru khususnya penggunaan teknologi digital pada perangkat daerah terkait untuk menunjang percepatan pengolahan data

2. Banyaknya inovasi inovasi dari masyarakat terkait sampah rumah tangga yang masih dapat dimanfaatkan , bisa menjadi kerajinan berupa sampah daur ulang hingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar,

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Masih tingginya RTLH di Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebesar 34.569 unit;
2. Masih terdapatnya kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu seluas 21,79 ha;
3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi);
4. Penurunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur
5. Perlu adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Peningkatan penyelenggaraan infrastruktur daerah untuk menghubungkan antar wilayah potensi, dan memberikan nilai tambah pada ekonomi rakyat, serta membuka akses lapangan kerja baru dengan prioritas:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan jalan kabupaten melalui optimalisasi rekonstruksi jalan;
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap beban berlebihkendaraan;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pemeliharaan jaringan irigasi;

- d. Mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
 - e. Mengembangkan model penyediaan fasilitas sanitasi
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- a. Memperkuat lembaga, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
 - b. Meningkatkan kualitas kelembagaan pertanian dan perikanan;
 - c. Meningkatkan penanganan panen dan pasca panen pertanian dan perikanan;
 - d. Memperkuat kelembagaan di sektor pariwisata;
 - e. Memperkuat industri kreatif dalam pengembangan pariwisata;
 - f. Meningkatkan Kerjasama di bidang pemasaran dengan pelaku usaha wisata;
 - g. Fasilitasi penyelesaian konflik perusahaan dan pekerja;
 - h. Memfasilitasi peningkatan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual;
 - i. Meningkatkan volume perdagangan luar negeri;
 - j. Menjamin kecukupan pasokan dan pemerataan distribusi barang;
 - k. Penguatan manajemen cadangan pangan;
 - l. Fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat;
 - m. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sanitasi;
 - n. Memperkuat pengendalian mutu pendidikan;
 - o. Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan;
 - p. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, Upaya Percepatan Penurunan Stunting, kesehatan kerja dan olahraga;
 - q. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembiayaan Kesehatan
 - r. Memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial;
 - s. Fasilitasi pengiriman dan penempatan transmigrasi.
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi
- a. Meningkatkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif;

4. Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman yang berada di aset Pemda.
5. Melakukan pendataan terhadap PSU perumahan baik yang di kelola oleh pengembang maupun yang berada di kawasan permukiman di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Banjarnegara	Persentase akses cakupan air minum	100%	6.740.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Banjarnegara	Persentase akses cakupan air minum	100%	5.877.709	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penduduk berakses air minum	100%	6.740.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penduduk berakses air minum	100%	5.877.709	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dok	100.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dok	14.000	

			yang disusun			Penyediaan Air Minum (SPAM)		yang disusun			
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan /Perluasan/Op timalisasi SPAM	1 Dok	110.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	15.000	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat	800 SR	3.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat	Liter/ detik	2.618.709	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	750 Liter/ detik	2.190.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	750 Liter/ detik	40.000	
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan		Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10 Lokasi	340.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Lokasi	2.190.000	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui	1.000 SR	1.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem	1.000 SR	1.000.000	

			Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu					Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBA-NGAN SISTEM AIR LIMBAH					PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBA-NGAN SISTEM AIR LIMBAH				1.005.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase KK terlayani pengelolaan sistem air limbah	73%		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase KK terlayani pengelolaan sistem air limbah	73%	1.005.000	
	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dok	120.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	100 Orang	5.000	
	Pembangunan/Penye- diaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air	1.200 Rumah Tangga	1.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	MÂ³/Hari	1.000.000	

			Limbah Terpusat Skala Permukiman			Skala Permukiman		Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				13.621.324	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		SAKIP	67,25%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		SAKIP	67,25%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	67,25%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang disusun	67,25%	25.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	15.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	10.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	20.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000	
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			

			Realisasi Kinerja SKPD					SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	72%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	72%	9.546.763	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	10.804.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	9.446.763	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	255.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	100.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dukungan Penyediaan Administrasi Umum	14 Paket		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dukungan Penyediaan Administrasi Umum	14 Paket	454.969	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Peket	425.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Peket	424.969	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang diediakan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang diediakan		5.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Unit Sarana dan	22 Unit	200.000	Pengadaan Sarana dan		Jumlah Unit Sarana dan	22 Unit	5.000	

	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		2.655.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	147.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	147.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	2.508.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	2.508.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	934.591	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,		Jumlah Kendaraan Dinas	23 Unit	1.082.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas	23 Unit	850.000	

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	2 Unit	141.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	84.591	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni		1.000.000	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kab/ Kota	3 Dok		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kab/ Kota	3 Dok	750.000	
						Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dok	750.000	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi		Jumlah dokumen Identifikasi Perumahan di	1 Dok	45.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan	1 Dok	0	

	Program Kabupaten/Kota		Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota			Kabupaten/Kota		Bencana Kabupaten/ Kota			
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota a Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dok	20.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dok	0	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	100 Orang	50.000	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	100 Orang	0	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah		Persentase Jumlah			Pembangunan dan Rehabilitasi		Persentase Jumlah		250.000	

	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	3 Ha	9.500.000						
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota	150 unit	1.500.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	150 unit	250.000	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	30.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan		

	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase permukiman yang tertata			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase permukiman yang tertata			
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Laporan		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Laporan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	25.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Laporan		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Banjar-negara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 Dok	50.000	Penyusunan/Review /Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Banjar-negara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dok		

	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaik	2.500 unit	3.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaik	2.500 unit		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	120.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah luas pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	25 Ha	2.810.000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	25 Ha		
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggara- an Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	27.000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	1 Dokumen		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					

	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2.500 unit	2.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	100 unit		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				250.000	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				250.000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana,	10 Lokasi	80.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan	10 Lokasi	250.000	

	Hunian		Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			untuk Menunjang Fungsi Hunian		Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Lap		
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Lap	50.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Lap		
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan					Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan					

	Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Keci					Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Keci					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	20.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi penegmbang perumahan dengan kualifikasi kecil	1 Laporan		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					

	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dok	155.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dok		
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	3 Dok	100.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	3 Dok		
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Cakupan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Cakupan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis			
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 Dokumen	150.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 Dokumen		

	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,5%		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,5%		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	260.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/	5,2 Ha	950.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	5,2 Ha		

			Kota								
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup			
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	125.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen		

	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				446.050	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelo mpok Masyarakat/In stitusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	18 Lembaga	200.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kom unitas/kelompok masyarakat		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ko munitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	18 Lembaga		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dok	150.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dok		

	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan meningkatnya penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan meningkatnya penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota			
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitass	100.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah masyarakat / lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitass		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Cakupan area pelayanan sampah			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Cakupan area pelayanan sampah			
	Pengelolaan Sampah		Cakupan area pelayanan sampah			Pengelolaan Sampah		Cakupan area pelayanan sampah			
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan	1 Laporan	600.000	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan		

			Kembali								
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST /SPA Kabupaten /Kota	270 Ton	800.000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	270 Ton		
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok	250.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah	1 Dok	250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/	1 Dok		

			Kabupaten/ Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum				
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota				
	Sub kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Dusun Bulukuning dan Dusun Sabrangkidul Desa Kalijir Kecamatan Purwanegara	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/ SPAM berbasis masyarakat	SR	Rawan kekurangan air di musim kemarau
		RT 02 RW 05 Wangon, Kecamatan Banjarnegara			Pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih terutama pada musim kemarau
		RT 010 RW 011, Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara			Belum tersedia sarana air bersih
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah				
	Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten / kota				
	Sub kegiatan pembangunan penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	RW. 04, Wangon Kecamatan Banjarnegara	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	ODF Kelurahan Wangon baru 96%, blm bisa mencapai 100% karena terdapat 1 lokasi permukiman yang

					membutuhkan penanganan teknis khusus dan membutuhkan biaya besar untuk pembangunan jamban.
3	Program Kawasan Permukiman				
	Kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha				
	Sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Unit Rumah	Masih terdapat sejumlah rumah di Ampelsari yang belum layak huni
		Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara			Masih adanya rumah tidak layak huni
		RT.01 RW. 07, Wangon, Kecamatan Banjarnegara			Ada 3 rumah di wilayah RT. 01 RW. 07 yang belum layak dikategorikan rumah sehat
		Kel. Sokaandi, Kecamatan Banjarnegara			Masih adanya rumah yang tidak layak huni
		Rt.02 Rw.09, Krandegan Kecamatan Banjarnegara,			Tidak memiliki rumah yang layak
4	Program Pengelolaan Persampahan				
	Kegiatan Pengelolaan Sampah				
	Sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	RT. 02/07, Wangon Kecamatan Banjarnegara	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Ton	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota				
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun Lawangsari Desa Semangkung, Kab. Banjarnegara			
		Desa Gembol Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara			
		Wanatangi Desa Sambong Kec.Punggelan, Kab. Banjarnegara			
		Desa Bandingan Kec.Rakit, Kab. Banjarnegara			
		RW II (2) Kelurahan Semampir Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Ds. Bandingan Kec camatan Rakit, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Wanatangi Dsa Sambong Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegara			
		Rt 3 Rw 2 Desa Karang Sari Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Wringin Desa Purwodadi Kecamatan Karangobar, Kab. Banjarnegara			
		Rt 02 Rw 01 Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Karangobar Gunung Desa Karangobar Kecamatan Karangobar, Kab. Banjarnegara			

		Kelurahan Semarang RT. 02/02 Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Slimpet RW. 01/06 Kelurahan Argasoka Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Dusun Bakalan Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Beji Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Blok Siwinong Rt 02 Rw 01 Desa Lemahjaya Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		lingkungan Masjid Al Hikmah DEsa Lemahjaya Rt 01 Rw 01 Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		Blok Siwinong Rt 02 Rw 01 Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		lingkungan Masjid Al Hikmah DEsa Lemahjaya Rt 01 Rw 01 Kecamatan Wanadadi, Kab. Banjarnegara			
		Desa Paweden Kecamatan Karangobar, Kab. Banjarnegara			
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	RW 4 Dukuh Sirempu Kelurahan Semampir Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota				
	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rt 02 Rw 02 Dusun Tiparan Desa Beji Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
3	Program Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan				

	Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha				
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Talunamba Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Limbangan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
		Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara		10 Unit	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Rw 04 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Rw 02 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Dukuh Pandak Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Rt, 02 Rw. 02 Kelurahan Semarang Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		RT 02 RW 6 Kelurahan Parakancangah Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		RT 01 RW 3 Kelurahan Semarang Kidul			

		Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		RW 03 Kelurahan Kalibenda Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara			
		Kembang Widoro Rt 04 RW 03 Kelurahan Rejasa Madukara, Kab. Banjarnegara			
4	Program Pengembangan Perumahan				
	Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota				
	Sub Kegiatan pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana / relokasi program kabupaten / kota				
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Deesa Wanadadi, Pingit, Gumingsir, Badakarya, Wanakarsa, Medayu, dan Kandangwangi, Kab. Banjarnegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	
		Desa Madukara, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara			
		Desa Sikumpul Kecamatan Kalibening, Kab. Banjarnegara			
6	Program Pengelolaan Persampahan				
	Kegiatan Pengelolaan Sampah				
	Sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Desa Sokayasa, Kecamatan Banjarnegara			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- 2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan
- 3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*
- 4. Mendorong pemulihan dunia usaha
- 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi
- 8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Telaah terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara meliputi program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024 yakni berfokus pada 5 prioritas utama untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dan program pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim teknologi dan program prioritas meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Visi Kabupaten Banjarnegara “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”. Kemudian dijabarkan dalam pokok visi dan misi yang diampu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup digambarkan dalam tabel berikut:

NO	POKOK VISI	MISI	TUJUAN
1	Banjarnegara maju berbasis pertanian	Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan	Meningkatkan daya dukung dan daya tamping lingkungan

		serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai	
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung misi ketiga dan kelima, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara tujuan antara lain:

- a. Tujuan Renja DPKPLH:
 - Tujuan 1 : meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas
 - Tujuan 2 : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- b. Sasaran Renja DPKPLH:
 - Sasaran 1 : Meningkatkan cakupan rumah layak huni
 - Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan

3.3 Program dan Kegiatan

Berikut adalah tabel matriks program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara tahun 2024.

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Kepmendagri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.000) 2023	Perkiraan Maju (Rp.000) 2024	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota												
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	98,3%	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dok	Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah	98,3%	100.000	14.000	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang			110.000	15.000	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air					Kapasitas Sistem Penyediaan	Liter/detik			3.000.000	2.618.709	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	

					Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun						pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	750 Liter / detik			2.190.000	2.190.000	
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Lokasi			340.000	40.000	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000 SR			1.000.000	1.000.000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											

1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota											
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Cakupan akses sanitasi	73%	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi/ air limbah yang memadai	73%	120.000	5.000	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MÂ³/ Hari			1.000.000	1.000.000	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	04	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	04	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	04	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Meningkatnya penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	Jumlah dokumen yang disusun	13 Dok	15.000	15.000	
1	04	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan					Laporan	6 Dok			20.000	10.000	

					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
1	04	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
1	04	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Nilai survei kepuasan masyarakat	78,25	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Persentase tersedianya adminis-trasi keuangan Perangkat Daera	100 %	10.804.240	9.446.763	
1	04	1	2.02	0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok			255.660	100.000	
1	04	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
1	04	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perleng- kapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah paket Adminis- trasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	29.999	30.000	
1	04	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik	13 Paket			411.787	424.969	

										Kantor yang Disediakan							
1	04	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
1	04	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22 Unit	192.050	5.000		
1	04	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
1	04	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	37	144.000	147.000		
1	04	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan			2.508.119	2.508.000		
1	04	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
1	04	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa					Jumlah Kendaraan	23 Unit	umlah Barang milik	25 Unit	1.082.019	850.000		

					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		daerah Penunjang urusan pemerintah daerah				
1	04	1	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit			176.026	84.591	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota			Persentase penanganan rumah korban bencana	20%	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	1 Dok	Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota	1 Dok	45.000		
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi LahanLahan Potensial					Identifikasi Lahan-Lahan				-	750.000	

					sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dok			20.000		
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	100 Orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	25.000		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten	150 Unit			2.000.000	250.000	

										/Kota						
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan											
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Lap	Jumlah laporan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Lap	30.000		
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman											
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			Persen-tase cakupan rumah layak huni	84%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Lap	Jumlah izin yang di terbitkan	1 Lap	25.000		
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											
1	02	03	2.02	0008	Penyusunan/ Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview /Terlegalis	1 Dok	Jumlah dokumen penyusunan / review/ legalisasi kebijakan bidang PKP	1 Dok	50.000		

										asi						
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2.500 unti	Jumlah RTLH yang dipugar	2.500 unti	3.500.000		
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan			116.118		
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	25 Ha			2.730.000		
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelengg	1 Dok			25.000		

										araan Kawasan Permukima n Kumuh						
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota											
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkembangnya permukiman kumuh	2.500 Unit	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2.500 unit	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	2.500 unit	2.000.000		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			Jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU	10 Lokasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dok	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU	10 Lokasi	-	-	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan					Jumlah Lokasi Perumahan	10 Lokasi			150.000	250.000	

					Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian						
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan			20.000		
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan			50.000		
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN											
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan											

					Kecil												
1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			Jumlah laporan pelayanan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	1 lap	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan tingkat kemampuan kecil	1 Lap	20.000			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota												
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota			Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun	100%	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten /kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten /kota dan mengakom odir arahan RPPLH Provinsi	1 Dok	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakom odir arahan RPPLH Provinsi	4 Dok	100.000			
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH					Jumlah Dokumen Telaahan	3 Dok			50.000			

					Kabupaten/Kota					Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota						
2	11	02	2.02		Penyelenggara-an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota											
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 Dok	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis	1 Dok	150.000		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			IKLH	68,5	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	IKLH	68,5	200.000		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Persentase luasan RTH yang tertangani	18,5%	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	5,2 Ha	Luas Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5,2 Ha	450.000		
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH											

					diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	100%	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dok	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	20 Dok	76.000		
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat			Persentase masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup	100%	Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	18 Lembaga	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat /komunitas /kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	18 Lembaga	150.000		
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan	1 Dok			175.000		

										hidup yang dilaksanak an						
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Persentase masyarakat / lembaga sasaran yang mendapat- kan sosialisasi / pembinaan untuk penghar- gaan lingkungan hidup	75%	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Duni a Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota	18 Entitas	75.000		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah											
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			Persentase jumlah sampah yang tertangani	33,5%	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurang an sampah melalui pembata- san timbulan sampah	1 Laporan	Persentase Penanganan Pengelolaan Persampa- han	33,5%	524.333		
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional					Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrose- san akhir sampah di TPA/TPST	270 Ton			2.211.091		

										kabupaten /kota atau TPA/TPST Regional						
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					Jumlah Masyara- kat, Kelompok Masyaraka t atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelo- laan Sampah Berbasis Masyara- kat	20 Kelompok			125.679		
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkroni- sasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	1 Dok			186.835		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara.

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 kegiatan yang diarahkan pada :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
 - a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
 4. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
Terdiri dari pengadaan :
 - Pengadaan alat besar

- Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau laporan
 - b. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- Terdiri dari:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar
 - Pemeliharaan mebel
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - b. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - d. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - e. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - f. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 2) Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan kegiatan:
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
 - b. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan:
 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - b. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - c. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan
3. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

2) Program Kawasan Permukiman

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan:
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - c. Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh
 - d. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan:

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
- 2) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan kegiatan berikut:
 1. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
 - c. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan kegiatan berikut:
 1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum PSU tingkat Kemampuan Kecil, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil

3. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan lingkungan hidup, dengan kegiatan berikut:
 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:

- a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH
 - b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- 2) Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan berikut:
 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan berikut:
 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan berikut:
 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan berikut:
 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan berikut:

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Program Pengelolaan persampahan, dengan kegiatan berikut:
 1. Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan berikut:
 - a. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJARNEGARA



Ir. BINGGIL HARYONO
NIP. 19631223 199203 1 002

